



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT

INSPEKTORAT

Jln. Soekarno Hatta No. 29 Telp.(0753) 466169 Fax. (0753) 466170
Simpang Empat – Pasaman Barat 26366

PERNYATAAN TELAH DIREVIU

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP KABUPATEN PASAMAN BARAT

TAHUN ANGGARAN 2024

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman Barat untuk periode tahun 2024 sesuai pedoman reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman Barat.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan yang terbatas bahwa Laporan Kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan didalam laporan kinerja ini.

Simpang Empat, 21 Maret 2025
INSPEKTUR DAERAH


EMNITA NADIRUA, SE.MM, CGCAE
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP. 19750831 200604 2 005



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2024



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
TAHUN 2025**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur dipanjatkan ke hadirat Allah SWT, sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024 dapat diselesaikan.

Penyusunan LKjIP merupakan kewajiban sebagaimana diamanahkan dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, pelaporan kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya yang dipercayakan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman Barat dalam mengelola perencanaan pembangunan daerah berdasarkan Rencana Strategis (RENSTRA) Perubahan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021- 2026.

Dengan telah tersusunnya LKjIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024 ini, disampaikan ucapan terima kasih kepada para pihak dan yang telah banyak membantu pelaksana – pelaksana kegiatan yang bekerja secara maksimal dalam melaksanakan kegiatan selama Tahun 2024.

Penyusunan LKjIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024 ini telah diupayakan seoptimal mungkin, meskipun demikian masih terdapat kekurangan – kekurangan yang disebabkan adanya kendala – kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan. Semoga LKjIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman Barat ini bermanfaat .

Simpang Empat, Februari 2025
Kepala DPMPTSP



IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Pemerintah melalui Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini menjadi salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang baik.

Proses penilaian. Proses penilaian yang terukur ini menjadi bagian dari skema pembelajaran bagi organisasi pemerintah untuk terus meningkatkan kapasitas kelembagaan sehingga kinerjanya bisa terus ditingkatkan.

Pada dasarnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan Laporan yang memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman Barat selama Tahun 2024. Capaian kinerja (performance agreement) Tahun 2024 tersebut dibandingkan dengan Penetapan Kinerja (performance agreement) Tahun 2024 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi.

Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kerja ini akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja (performance gap) bagi perbaikan kinerja dimasa mendatang. Sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024 berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan LKjIP 2024 ini mengacu kepada Tujuan dan Sasaran Strategi yang ditetapkan pada dokumen Renstra Perubahan Tahun 2021-2026 dan Perjanjian Kinerja 2024. Tujuan ditetapkan dengan mengacu pada *logical frame*

work (cascading) yang telah disusun berdasarkan fungsi DPMPTSP dalam mendukung pencapaian sasaran kepala daerah pada misi I dan III RPJMD Kabupaten Pasaman Barat.

Adapun tujuan yang telah dirumuskan adalah:

1. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja
2. Meningkatkan Pelayanan Publik yang Berkualitas
3. Meningkatkan Investasi di daerah

Tujuan dari Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran dan kegiatan. Pengukuran dengan menggunakan Indikator Kinerja pada level sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kinerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas. Selain itu untuk memberikan penilaian yang lebih independen melalui indikator – indikator outcomes atau minimal output dari kegiatan yang terkait dengan sasaran yang diinginkan.

Berdasarkan hasil pengukuran, tingkat pencapaian sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024 dengan jumlah keseluruhan sasaran sebanyak 3 (Tiga) sasaran yaitu :

1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dengan indikator (Nilai SAKIP, Level Maturitas SPIP dan Penurunan Jumlah Temuan BPK)
2. Meningkatnya Pelayanan Publik yang Berkualiti dengan indikator (Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat/IKM)
3. Meningkatnya Nilai Investasi PMDN/PMA dengan indikator Kenaikan Nilai Investasi PMDN/PMA.

Hal ini menunjukkan bahwa seluruh sasaran program Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024 telah mencapai target bahkan melebihi target yang telah ditetapkan, dengan harapan semoga ditahun mendatang dapat dipertahankan dan lebih ditingkatkan untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi yang harus diupayakan semaksimal mungkin dalam pencapaiannya.

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	
Ikhtisar Eksekutif	
Daftar Isi	
Daftar Tabel	
BAB. I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Gambaran Umum DPMPTSP Kabupaten Pasaman Barat.....	2
1.2.1. Tugas Pokok dan Fungsi	2
1.2.2. Struktur Organisasi.....	4
1.2.3. Sumber Daya Manusia.....	6
1.4. Aspek Strategis dan Isu Strategis.....	16
1.5. Maksud dan Tujuan	20
1.6. Sistematika Penulisan.....	21
BAB. II PERENCANAAN KINERJA.....	23
2.1. Rencana Strategis.....	23
2.1.1 Visi dan Misi Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat	23
2.1.2 Tujuan	24
2.1.3 Sasaran	26
2.1.4 Strategi	28
2.1.5 Kebijakan	29
2.1.6 Program Untuk Pencapaian Sasaran	31
2.2. Perjanjian Kinerja DPMPTSP Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024.....	32
2.3. Program Kegiatan dan Anggaran.....	34

BAB. III	AKUNTABILITAS KINERJA	37
3.1.	Metodologi Pengukuran Kinerja	39
3.2.	Hasil Pengukuran Kinerja	32
3.3.	Capaian Kinerja DPMPTSP Kabupaten Pasaman Barat	44
3.4.	Realisasi Anggaran	69
BAB. IV	PENUTUP	79
LAMPIRAN		

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1. Daftar Tingkat Pendidikan Pegawai DPMPTSP Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024	7
Tabel 1.2. Daftar Golongan Pegawai DPMPTSP Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024	8
Tabel 1.3. Daftar Pejabat Fungsional DPMPTSP Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024	10
Tabel 1.4. Anggaran Program dan Kegiatan Tahun 2024	11
Tabel 1.5. Daftar Aset Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024	13
Tabel 1.6. Daftar Kendaraan Dinas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024	15
Tabel 1.7. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi DPMPTSP Kabupaten Pasaman Barat	17
Tabel 2.1. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Pada Renstra Perubahan Tahun 2021 – 2026 DPMPTSP Kabupaten Pasaman Barat	27
Tabel 2.2. Program untuk Pencapaian Sasaran Strategis Tahun 2024	32
Tabel 2.3. Perjanjian Kinerja DPMPTSP Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024	33
Tabel 2.4. Perjanjian Kinerja Perubahan DPMPTSP Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024	34
Tabel 2.5. Program Kegiatan dan Anggaran DPMPTSP Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2024	35
Tabel 2.6. Alokasi Anggaran per Sasaran Strategis Tahun Anggaran 2024	37
Tabel 3.1. Kategori Keberhasilan Indikator Kinerja Pengukuran Kinerja Tahun 2024	40
Tabel 3.2. Hasil Pengukuran Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman Barat	42

Tabel 3.3	Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Sasaran 1 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	44
Tabel 3.4	Perbandingan Realisasi, Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis Tahun 2021 dan Tahun 2022 dengan 2023 serta Target 2024	45
Tabel 3.5	Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Renstra DPMPTSP	47
Tabel 3.6	Program dan Kegiatan Mendukung Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Tahun 2024.....	49
Tabel 3.7	Kelas Interval Survei Indeks Kepuasan Masyarakat.....	52
Tabel 3.8	Realisasi dan Capaian Kinerja Indikator Kinerja Sasaran Strategis 2.2	53
Tabel 3.9	Perbandingan Realisasi, Capaian Tahun 2021 dan Tahun 2022 dengan Tahun 2023 Dan Target Indikator Kinerja Tahun 2024	54
Tabel 3.10	Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Renstra Perubahan DPMPTSP.....	55
Tabel 3.11	Program dan Kegiatan Mendukung Meningkatnya Pelayanan Perizinan yang Berkualitas Tahun 2024	57
Tabel 3.12	Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategi 3 Meningkatnya Investasi PMDN/PMA	58
Tabel 3.13	Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun 2021 , Tahun 2022 dan Tahun 2023 serta Target Kinerja 2025.....	59
Tabel 3.14	Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Renstra Perubahan (2021-2026)DPMPTSP.....	61
Tabel 3.15	Perbandingan Realisasi Investasi Tingkat Nasional, Propinsi Dan Daerah Kabupaten Pasaman Barat.....	64
Tabel 3.16	Program dan Kegiatan Mendukung Nilai Investasi PMDN/PMA Tahun 2024	64
Tabel 3.17	Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2024 65	
Tabel 3.18	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Tahun 2024.....	66
Tabel 3.19	Daftar Inovasi Yang Masih Digunakan Dpmptsp Tahun 2024	68
Tabel 3.20	Pagu dan Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan MendukungMeningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi Tahun 2024	70
Tabel 3.21	Pagu dan Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan Mendukung Meningkatnya Kualitas Pelayanan Terpadu Satu Pintu	74
Tabel 3.22	Pagu dan Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan Mendukung Meningkatnya Nilai Investasi di Daerah Tahun 2024	77

BAB I

PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang penyusunan Laporan Kinerja, tugas pokok dan fungsi, struktur organisasi Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman Barat dan sumber daya yang dimiliki untuk melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan di Tahun Anggaran 2024.

1.1. LATAR BELAKANG

Akuntabilitas kinerja menjadi salah satu azas umum penyelenggaraan Negara yang menentukan bahwa setiap dari kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat / rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku. Oleh karena itu, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman Barat sebagai penyelenggara negara ditingkat Organisasi Perangkat Daerah berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan hasil penyelenggaraan negara kepada masyarakat / rakyat dengan menyusun Laporan kinerja. Laporan Kinerja merupakan output dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang diartikan sebagai bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas pengguna anggaran.

Kewajiban menyusun Laporan Kinerja tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pasal 18 dan pasal 21 yang menyatakan bahwa SKPD menyusun Laporan Kinerja Tahunan dan disampaikan oleh Kepala SKPD kepada Bupati, paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Sehubungan dengan hal tersebut, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman Barat menyusun Laporan Kinerja tahun 2024. Penyusunan Laporan Kinerja ini berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara review atas Laporan Kinerja Pemerintah Daerah.

1.2. GAMBARAN UMUM DPMPSTP KABUPATEN PASAMAN BARAT

1.2.1. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman Barat berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 21 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pasaman Barat dan Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman Barat mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah di bidang Penanaman Modal.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksudkan dalam Peraturan Bupati di atas, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman Barat mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu satu pintu;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu satu pintu;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu satu pintu;
- d. Pengelolaan urusan ketatausahaan Dinas; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman Barat, sebagaimana diatur oleh dan Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman Barat, maka struktur organisasi yang dibentuk terdiri dari:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri dari;
 - Sub Bagian Umum;
 - Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Subtansi Keuangan.
 - Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Subtansi Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan
- c. Bidang Penanaman Modal, terdiri dari :
 - Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Subtansi Administrasi Penanaman Modal
 - Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Subtansi Promosi dan Kerjasama Penanaman Modal

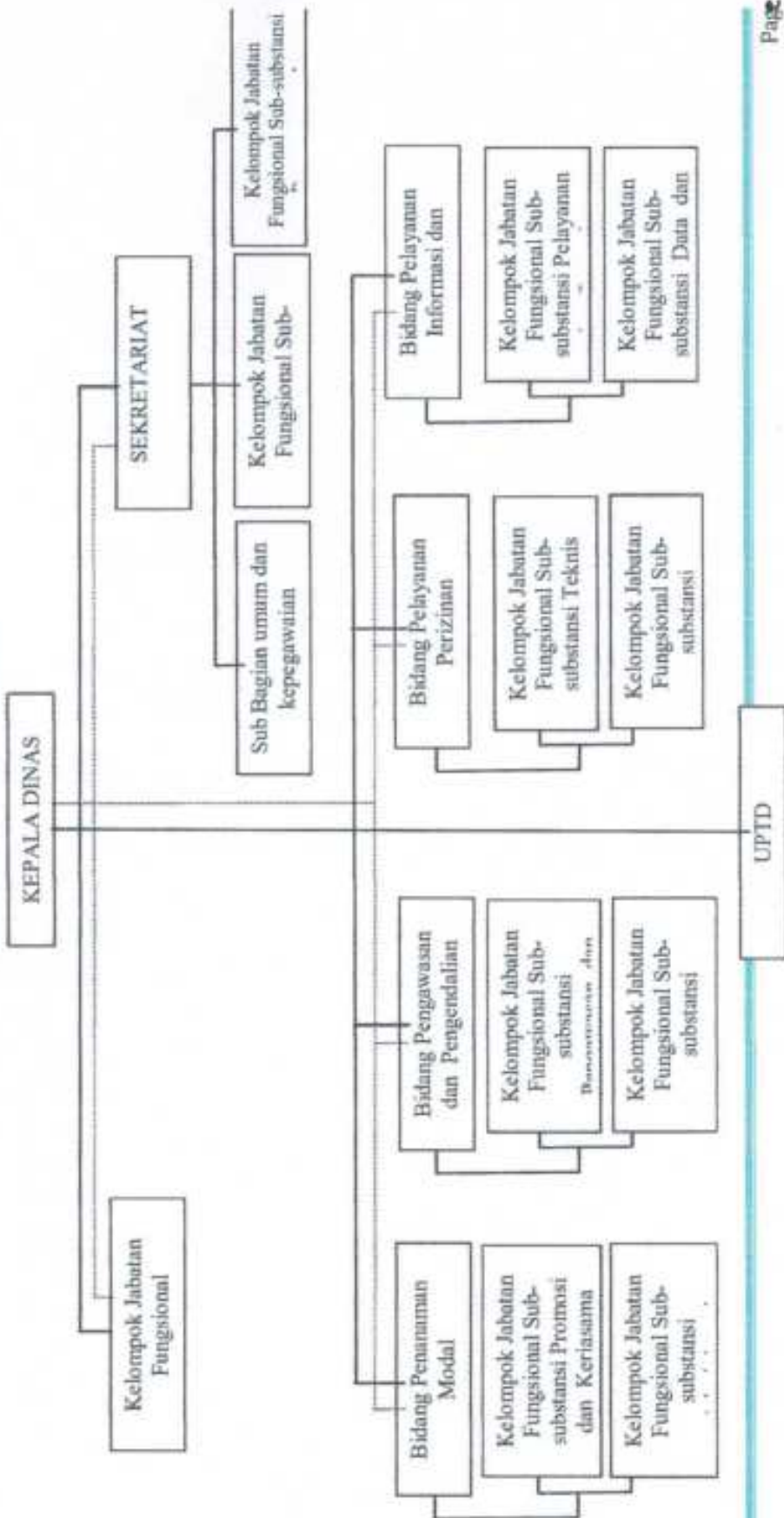
- d. Bidang Pengawasan dan Pengendalian, terdiri dari :
 - Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Subtansi Pengawasan dan Pengendalian Perizinan
 - Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Subtansi Subtansi Pengawasan dan Pengendalian Penanaman Modal
- e. Bidang Pelayanan Perizinan, terdiri dari :
 - Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Subtansi Teknis Perizinan
 - Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Subtansi Administrasi Perizinan
- f. Bidang Pelayanan Informasi dan Pengaduan, terdiri dari :
 - Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Subtansi Pelayanan dan Pengaduan
 - Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Subtansi Data dan Sistem Informasi

1.2.2. STRUKTUR ORGANISASI

Pada laporan kinerja ini, struktur organisasi dan tata kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat mengacu sesuai Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Kabupaten Pasaman Barat.

Adapun struktur organisasi yang menjelaskan kedudukan dari Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang hingga Kepala Sub Bagian dan Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman Barat yang menjelaskan koordinasi antar bidang dan dalam hal pendelegasian perintah dari atasan kebawahan sebagaimana gambar struktur organisasi berikut

STRUKTUR ORGANISASI TATA KERJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PASAMAN BARAT



1.3. SUMBER DAYA MANUSIA

Sumber Daya Manusia Aparatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman Barat yang menjadi pelaksana tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya diuraikan menjadi tugas pokok dan fungsi masing-masing bidang berjumlah 43 orang. Komposisi pegawai tersebut berdasarkan jenis kelamin terdiri dari 20 orang (46,51%) laki-laki dan 23 orang (53,48%) perempuan.

Grafik
1.1
Komposisi Pegawai Berdasarkan Jenis
Kelamin Pada DPMPTSP Kabupaten
Pasaman Barat Tahun 2024



Sumber : Subag Umum dan Kepegawaian DPMPTSP Kabupaten Pasaman Barat 2022

Dari data tersebut jumlah perempuan dengan laki-laki sebanding sehingga tidak memiliki pengaruh secara terhadap lingkungan dan budaya kerja serta kinerjanya.

Berikut adalah komposisi pegawai berdasarkan tingkat pendidikan pegawai, seperti dapat dilihat pada tabel berikut:

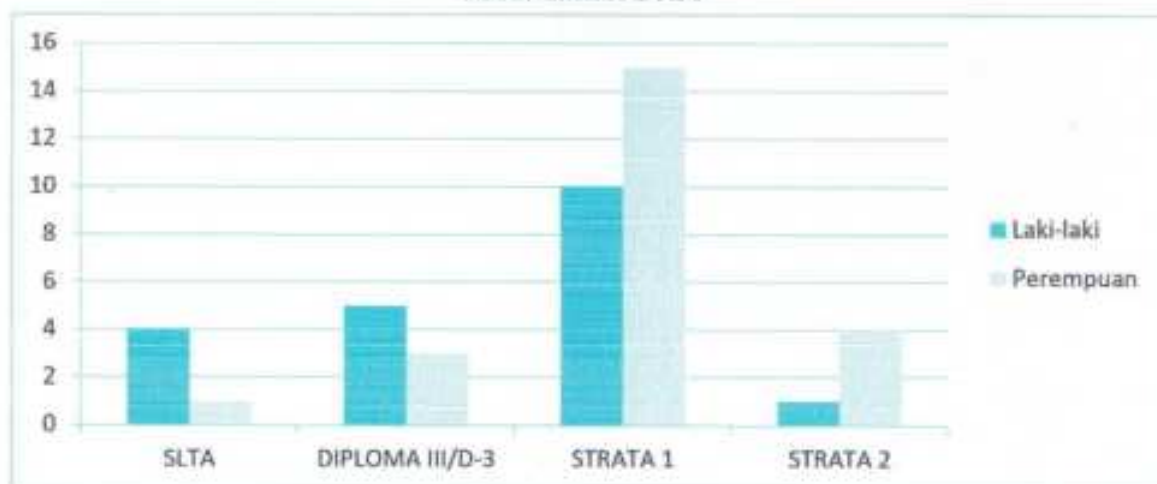
Tabel 1.1.
Daftar Tingkat Pendidikan Pegawai DPMPSTP Kabupaten
Pasaman Barat Tahun 2024

N O	TINGKAT PENDIDIKAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	%
1	2	3	4	5	6
1	SLTP	-	-	-	0%
2	SLTA	4	1	5	11,63%
3	DIPLOMA III/ D-3	5	3	8	
4	STRATA 1	10	15	25	58,14%
5	STRATA 2	1	4	5	11,63%
6	STRATA 3	-	-	-	0%
	JUMLAH	20	23	43	100,00

Sumber : Subag Umum dan Kepegawaian DPM PTSP Kabupaten Pasaman Barat 2024

Dilihat dari segi pendidikan, komposisi pegawai Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman Barat sangat memadai untuk melaksanakan tugas-tugas Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman Barat karena 58,13% pegawai sudah berpendidikan sarjana, diantaranya 11,62% pegawai sudah berpendidikan pasca sarjana. Khusus untuk bidang pelayanan perizinan perlu adanya penambahan pegawai yang berlatar belakang teknis terkait layanan perizinan disamping melalui diklat teknis, diklat gelar maupun diklat fungsional. Secara grafik komposisi pegawai berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat dibawah ini:

Grafik
1.2
Komposisi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan Pada DPMPPTSP Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024



Selanjutnya komposisi pegawai berdasarkan golongan seperti dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

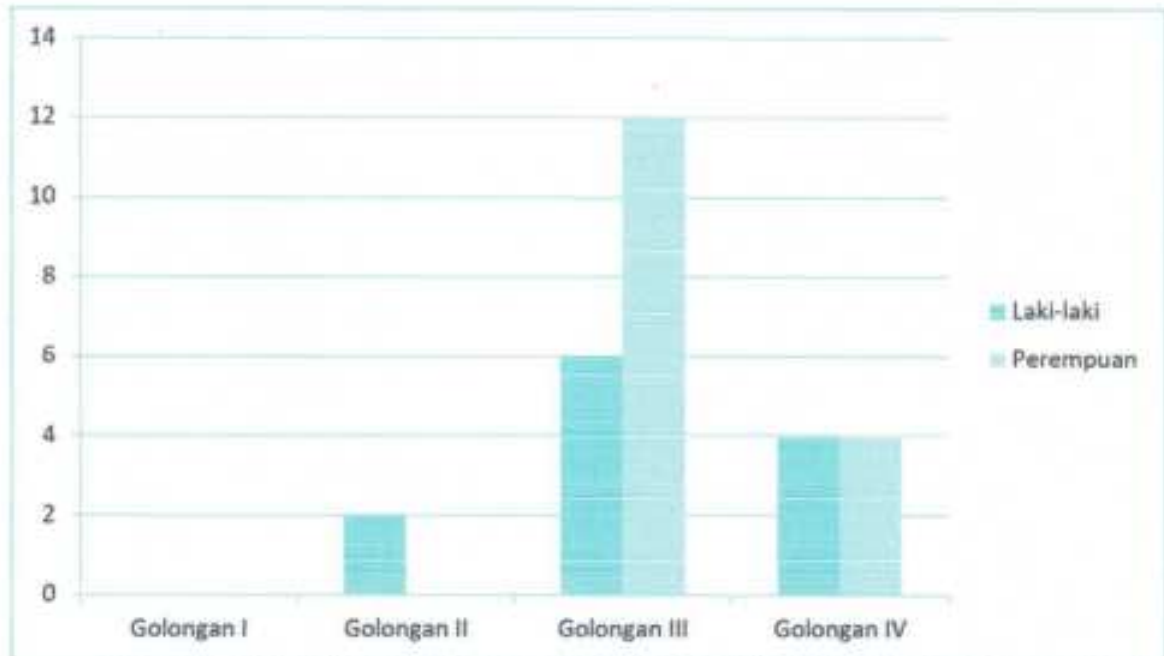
Tabel 1.2,
Daftar Golongan Pegawai DPMPPTSP
Kabupaten Pasaman Barat
Tahun
2024

NO.	URAIAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	%
1	2	3	4	5	6
1	Golongan I	-	-	-	0%
2	Golongan II	2	0	2	7,14%
3	Golongan III	6	12	18	64,28
4	Golongan IV	4	4	8	28,58
	JUMLAH	12	19	28	100,00

Sumber : *Subag Umum dan Kepegawaian DPM PTSP Kabupaten Pasaman Barat 2024*

Sebagaimana diuraikan pada tabel di atas, tercatat 92,86% pegawai Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman Barat adalah golongan III dan IV, merupakan pegawai yang berpendidikan Strata 2 dan Strata 1 dan Sarjana Muda. Pegawai yang berpendidikan Strata I pada umumnya sudah menduduki pangkat puncak pada jenjang kepangkatannya dan telah memiliki masa kerja lebih dari 10 tahun. Berikut jumlah PNS Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu per golongan:

Grafik
1.3
Komposisi Pegawai Berdasarkan
Golongan
Pada DPMTSP Kabupaten Pasaman
Barat
Tahun
2024



Sumber : *Subag Umum dan Kepegawaian DPM PTSP Kabupaten Pasaman Barat 2024*

Sesuai dengan hasil penyetaraan yang dilakukan pada akhir tahun 2021 atas semua jabatan struktural yang ada di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman Barat sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021

Tabel 1.3.
Daftar Pejabat Fungsional
DPMPPTSP Kabupaten Pasaman
Barat
Tahun
2024

NO.	URAIAN	LAKI-	PEREMPUAN	JUMLAH	%
1	2	3	4	5	6
1	Fungsional Analis Kebijakan Ahli Muda	1	3	4	73,68 %
2	Fungsional Perencana Ahli Muda	-	1	1	5,26 %
	JUMLA	1	4	5	100,00

Sumber : *Subag Umum dan Kepegawaian DPM PTSP Kabupaten Pasaman Barat 2024*

ANGGARAN

Pelaksanaan Program Kerja Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2024, didukung oleh Dana APBD Perubahan Kabupaten Pasaman Barat dan DAK Non Fisik Fasilitasi Penanaman Modal dengan total sebesar Rp. 4.886.701.897,- yang terdiri dari :

Belanja Daerah	:	Rp.	4.886.701.897,-
a. Belanja Operasi	:	Rp.	4.851.571.497,-
Belanja Pegawai	:	Rp.	3.257.322.745,-
Belanja Barang dan Jasa	:	Rp.	1.508.248.752,-
b. Belanja Modal	:	Rp.	35.130.400,-
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	:	Rp.	35.130.400,-
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Rp.		0,-

Terdiri dari 5 Program, 12 Kegiatan dan 27 Sub Kegiatan

Rincian Anggaran Program dan Kegiatan untuk mendukung pencapaian Tujuan dan Sasaran Strategis yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja sebagai berikut:

Tabel 1.4
Anggaran Program dan Kegiatan
Tahun 2024

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB	ANGGARAN
1	2	3
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	4.048.310.
A	PEKENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA	
1	PENYUSUNAN DOKUMEN	38.624.0
2.	EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	29.193.3
B.	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	3.340.182.7
3.	PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	3.241.612.
4.	PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN	
5.	PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN DAN	
C	ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT	11.050.0
6.	PENGAMANAN BARANG MILIK DAERAH SKPD	11.050.0
D	ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT	
7.	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	3.703.000
8.	BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI	
E	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	251.076.1
9.	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI	
10.	PERALATAN DAN PERLENGKAPAN	
11.	PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	
12.	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN	
13.	PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI	187.542.5
F	PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH	
14.	PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	
G	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH	
15.	PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	21.220.0
16.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI SUMBER DAYA AIR DAN	
17.	PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM	
G.	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH	
	PENUNJANG	

18.	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, JASA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL/ LAFANGAN	40.250.000
19.	PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN	119.349.800
20.	PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	16.116.000
II	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	43.540.400
A	PENYELENGGARAAN PROMOSI PENANAMAN MODAL YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	43.540.400
21.	PELAKSANAAN KEGIATAN PROMOSI PENANAMAN MODAL DAERAH KABUPATEN/KOTA	43.540.400
III	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	115.534.800
A	PENANAMAN MODAL YANG MENURUT KETENTUAN PERATURAN PERUNTANG – UNTANGAN MENJADI KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	115.534.800
22.	PENYEDIAAN PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA MELALUI SISTEM PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK	95.897.600
23.	PENYEDIAAN DAN PENGELOLAAN LAYANAN KONSULTASI PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO	19.637.200
IV	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	646.265.000
A	PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	646.265.000
24.	PENYELESAIAN PERMASALAHAN DAN HAMBATAN YANG DIHADAPI PELAKU USAHA DALAM MEREALISASIKAN KEGIATAN USAHANYA	92.132.000
25.	BIMBINGAN TEKNIS KEPADA PELAKU USAHA	337.820.000
26.	PENGAWASAN PENANAMAN MODAL	216.313.000
V	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	31.051.650
A	URUSAN PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI PERIZINAN DAN NON PERIZINAN PENANAMAN MODAL YANG TERINTEGRASI PADA TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	31.051.650
27.	PENGOLAHAN, PENYAJIAN DAN PEMANFAATAN DATA DAN INFORMASI PERIZINAN BERBASIS SISTEM PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK	31.051.650
Jumlah		4.886.701.897

INVENTARISASI ASET

Pada umumnya kondisi sarana dan prasarana yang dimiliki cukup memadai untuk mendukung pelayanan pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman Barat. Nilai aset yang dikelola Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman Barat per 31 Desember 2024 sebesar Rp. 5.533.214.034,- semuanya merupakan aset tetap yang terdiri dari Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung/Bangunan, KDP serta Aset Tetap Lainnya sebesar Rp. 5.056.022.734,-. Sedangkan Aset tak berwujud dan Aset Lainnya sebesar Rp. 477.191.300,-. Sarana dan prasarana yang dikelola oleh Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman Barat per 31 Desember 2024, sebagai berikut:

Tabel 1.5
Daftar Aset Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman Barat
Tahun 2024

NO	JENIS BARANG	JUMLAH
I	ASET TETAP	
1	Golongan Tanah - Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	2.282 M ²
2	Golongan Peralatan dan Mesin - Peralatan Komputer - Peralatan Olahraga - Alat Angkutan - Alat Kantor dan Rumah Tangga - Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar - Alat Kedokteran dan Kesehatan	63 Unit 3 Unit 15 Unit 176 Unit 24 Unit 1 Unit
3	Golongan Gedung dan Bangunan - Bangunan Gedung	-
4	Golongan Aset Tetap Lainnya - Bahan Perpustakaan	9 Buah
II	ASET LAINNYA	
1	Aset Tidak Berwujud	2 Unit
2	Aset Tidak Bermanfaat	2 Unit
III	KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan	
1	DED Gedung Kantor	1 Unit

Sumber : *Subag Umum dan Kepegawain DPM PTSP Kabupaten Pasaman Barat 2024*

SARANA DAN PRASARANA

Disamping sumber daya manusia yang profesional, ketersediaan sarana dan prasarana juga merupakan unsur penting dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman Barat telah dilengkapi sarana dan prasarana yang diharapkan mampu mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya.

Sarana dan prasarana gedung pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman Barat terdiri dari 2 gedung yaitu gedung utama terdiri dari ruangan Kepala Dinas, ruangan Sekretariat, ruangan tunggu Pelayanan dan *Front Office*, ruangan Bidang Pelayanan Perizinan, ruangan Bidang Pelayanan Informasi dan Pengaduan, ruangan Sub Bagian Perencanaan dan IT. Untuk Gedung ke dua terdiri dari dua ruangan yaitu ruang bidang Penanaman Modal dan bidang Pengendalian dan Pengawasan. Selain itu pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman Barat juga terdapat ruangan rapat, Mushala, Arsip dan lain sebagainya.

Dalam menunjang pelaksanaan tugas kedinasan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman Barat memiliki 3 (tiga) unit kendaraan dinas operasional roda empat dan 13 (empat belas) unit kendaraan dinas roda dua sebagaimana yang terlihat dalam tabel 1.5 dibawah:

Tabel 1.6
Daftar Kendaraan Dinas
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Pasaman Barat
Tahun 2024

NO	JENIS KENDARAAN	MERK / TYPE	DIPERGUNAKAN UNTUK	TAHUN PEMBUATAN
1	Mobil	Kijang Innova	Operasional	2009
2	Mobil	Toyota Rush	Operasional	2010
3	Mobil	Mitsubishi Kuda	Operasional	2004
4	Mobil	Toyota Hilux Double Cabin	Operasional	2013
5	Sepeda Motor	Honda Blade NF 11 A 1 C M/T	Operasional	2009
6	Sepeda Motor	Honda Beat C1C02N16M2 A/T	Operasional	2015
7	Sepeda Motor	Honda (blade R F1 Repsol)	Operasional	2014
8	Sepeda Motor	Yamaha Jupiter MX cw 1 s 7	Operasional	2010
9	Sepeda Motor	Honda/ nf 125 trf 125 cc	Operasional	2010
10	Sepeda Motor	Honda Supra X 125 CC	Operasional	2012
11	Sepeda Motor	Honda Beat NC 11 b 1 ca/t	Operasional	2009
12	Sepeda Motor	Honda Karisma X 125 cc	Operasional	2005
13	Sepeda Motor	Honda Supra X / NF 125 SD	Operasional	2007
14	Sepeda Motor	Honda GL 160 d	Operasional	2009
15	Sepeda Motor	Honda / NF 125 TR	Operasional	2008
16	Sepeda Motor	Yamaha Mio CW 28 DAL 115 S	Operasional	2010
17	Sepeda Motor	Honda Beat C1C02N16M2 A/T	Operasional	2015

Sumber : *Subag Umum dan Kepegawaian DPM PTSP Kabupaten Pasaman Barat 2024*

1.4. ASPEK STRATEGIS DAN ISU STRATEGIS

Berikut ini akan diuraikan Permasalahan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman Barat berdasarkan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat tahun 2021 -2026 yaitu :

Tabel 1.7
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi DPMPTSP
Kabupaten Pasaman Barat

Aspek Kajian	Capaian/ Kondisi Saat Ini	Standar yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan SKPD
			Permasalahan Pelayanan SKPD	Eksternal (Diluar Kewenangan SKPD	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Pelayanan perizinan	- Belum update SOP - Sarana dan prasarana belum optimal - Kapasitas SDM belum optimal	UU 25 Tahun 2009 tentang pelayanan public	- SOP Pelayanan Perizinan - sarana dan prasarana - Kualitas SDM	- Perubahan sistem dari kementerian / Lembaga - Dukungan dana dari TAPD	- Aturan dan mekanisme terkait perizinan yang bersifat dinamis atau sering berubah; - Sarana dan prasarana pendukung pelayanan perizinan yang belum memadai - Kualitas SDM yang belum optimal
Pengelolaan data dan informasi	- Belum tersedianya data dan informasi secara perizinan memadai	UU 25 Tahun 2009 tentang pelayanan public	Aplikasi yang digunakan belum optimal	Permintaan data dari dinas dan masyarakat	- Belum tersedianya data dan Informasi perizinan secara optimal
Kebijakan Penanaman modal	- Belum disusunnya aturan pendukung dokumen RUPM sebagai pedoman penentuan kebijakan Penanaman Modal. - Belum adanya aturan mengenai kebijakan pemberian insentif/fasilitas di bidang penanaman	Undang-undang No 25 tahun 2007 tentang penanaman modal	- Kapasitas SDM - Dukungan terhadap prioritas kegiatan yang akan dilaksanakan	Dukungan dan dari TAPD	- Belum disusunnya aturan pendukung dokumen RUPM sebagai pedoman penentuan arah kebijakan Penanaman Modal - Belum adanya aturan mengenai kebijakan pemberian insentif/fasilitas di bidang penanaman modal

Strategi promosi	modal Strategi Informasi belum optimal	Undang-undang No 25 tahun 2007 tentang penanaman modal	- Data potensi peluang investasi belum update - Pemanfaatan media yang belum optimal	- Dukungan dana dari TAPD - Keterlibatan tenaga ahli	- Desain strategis promosi berkaitan dengan potensi dan peluang investasi daerah yang belum dirumuskan secara optimal
Pengendalian Penanaman Modal	Rendahnya jumlah LKPM yang diterima	Perka BKPM no 6 tahun 2020 tentang Pedoman dan Tatacara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	- Kualitas dan kuantitas SDM belum memadai - Penerapan sanksi yang belum tegas	Belum tertibnya penyampaian LKPM PMA/PMDN	Kurangnya kesadaran PMA/PMDN dalam menyampaikan LKPM secara online.
Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan	Pelaksanaan Administrasi yang belum tersistem	Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan	- Kualitas SDM belum optimal - Belum adanya inovasi dalam pelaksanaan administrasi	- Dukungan Dana dari TAPD - Sistem yang digunakan belum optimal	- Kurangnya inovasi penyelenggaraan administrasi dan sistem pelayanan - Kualitas SDM belum optimal.

Untuk merencanakan strategi organisasi yang cenderung bersifat jangka panjang, maka lembaga perlu merumuskan beberapa isu strategis yang perlu diperhatikan. Isu strategis akan dijadikan sebagai basis permasalahan pokok untuk merumuskan program kerja lembaga. Selain itu, isu strategis yang ditetapkan merupakan manifestasi dari prioritas utama lembaga. Prioritas tersebut dapat dijadikan sebagai panduan dalam merumuskan arah dan kebijakan program dan teknis lembaga. Isu strategis bersifat mendasar, jangka panjang dan cenderung mendesak untuk dilaksanakan.

Analisis SWOT merupakan salah satu teknik analisis yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi posisi organisasi dan rancangan strategi yang akan digunakan. Analisis SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunity, Threats) adalah analisis proses assesment yang subyektif pada suatu organisasi secara terstruktur untuk mengidentifikasikan faktor-faktor strategis yang berupa faktor internal (kelemahan dan kekuatan) serta faktor eksternal (peluang dan ancaman). Analisa ini diperlukan untuk menetapkan pendekatan aksi dan merumuskan strategi yang tepat dan realistis serta relevan dengan visi dan misi. Analisa SWOT juga diperlukan untuk membuat aktivitas lebih fokus pada area dimana kekuatan dan peluang lebih besar. Analisis SWOT dapat menginspirasi untuk berpikir lebih proaktif dari pada perilaku yang reaktif bila terjadi suatu permasalahan dalam melaksanakan program maupun kegiatan.

Berdasarkan hasil analisa yang dilakukan, terdapat beberapa isu strategis yang perlu mendapat perhatian secara lebih detail oleh organisasi. Beberapa isu strategis Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMTSP) Kabupaten Pasaman Barat untuk periode ini adalah sebagai berikut:

1. Penyusunan SOP perizinan dan non perizinan
2. Penyusunan peta potensi investasi
3. Penetapan kebijakan pemberian fasilitas/insentif dibidang penanaman modal
4. Penyusunan aturan pendukung Dokumen RUPM

5. Peningkatan pelayanan perizinan dan non perizinan secara terpadu satu pintu yang terintegrasi
6. Peningkatan pemantauan pemenuhan komitmen perizinan dan non perizinan penanaman modal
7. Peningkatan pelayanan konsultasi dan pengelolaan pengaduan masyarakat terhadap pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan
8. Peningkatan pelaksanaan Kegiatan Penanaman Modal di daerah
9. Tersedianya data dan informasi perizinan dan non perizinan yang berkelanjutan
10. Peningkatan kualitas promosi penanaman modal yang memiliki daya tarik dan daya saing yang tinggi
11. Peningkatan pelaksanaan Kegiatan Penanaman Modal di daerah
12. Adanya pelatihan dan bimbingan teknis dalam menambah pengetahuan SDM
13. Terciptanya inovasi yang diimplementasikan pada setiap kegiatan

Percepatan pertumbuhan ekonomi daerah membutuhkan daya dorong dari penanaman modal yang besar dan dilakukan secara berkelanjutan. Karena itu, berbagai upaya untuk mendorong peningkatan investasi perlu dijadikan program prioritas. Langkah-langkah umum yang bersifat generic seperti perbaikan pelayanan perizinan, kepastian pelayanan dan keamanan bagi para calon investor, upaya penguatan implementasi regulasi, informasi yang akurat dan didukung oleh dokumen yang terkait dan insentif bagi para calon investor oleh Pemerintah Daerah perlu menjadi perhatian yang serius dan sungguh-sungguh. Selain langkah umum tersebut, Pemerintah Daerah juga perlu menentukan prioritas kebijakan yang relevan untuk mendorong pertumbuhan investasi daerah.

1.5. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman Barat tahun 2024 merupakan bentuk pemenuhan terhadap ketentuan pada pasal 18 dan pasal 21 Peraturan

Presiden Nomor 29 Tahun 2014 dan juga merupakan bentuk pertanggungjawaban Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat kepada masyarakat atas pencapaian Tujuan dan Sasaran yang berada pada Organisasi Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman Barat.

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman Barat tahun 2024 adalah untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada masyarakat atas apa yang telah dan seharusnya dicapai dan mengevaluasi pencapaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman Barat sebagai dasar untuk melakukan perbaikan yang berkesinambungan dimasa yang akan datang.

1.6.SISTIMATIKA PENULISAN

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- BAB I : Pendahuluan, Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi.
- BAB II : Perencanaan Kinerja, Menjelaskan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja Tahun 2024.
- BAB III : Akuntabilitas Kinerja, Menjelaskan :
- a. Capaian Kinerja DPMPTSP Kabupaten Pasaman Barat
Pada sub bab ini disajikan hasil pengukuran kinerja yang ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024, evaluasi dan analisis capaian kinerja dimaksud.

- d. Realisasi Anggaran.
Pada sub bab ini diuraikan tentang realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan dan pencapaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman Barat.

BAB IV : Penutup, berisikan kesimpulan umum atas capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024 dan langkah-langkah yang akan dilaksanakan di masa yang akan datang untuk peningkatan kinerja.

LAMPIRAN – LAMPIRAN.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA



Bab ini secara umum menjelaskan tentang arah kebijakan, program utama, strategi, program dan kegiatan, serta Rencana Strategis Implementatif Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman Barat 2021-2026 yang berisi rencana strategis, visi, misi, tujuan dan sasaran DPMTSP, Rencana Kerja Tahunan serta Penetapan kinerja Tahun 2024

2.1. RENCANA STRATEGIS

2.1.1. Visi dan Misi Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat

Mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, Rencana Strategis Perubahan Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perubahan Perangkat Daerah adalah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk periode selama 5 (lima) tahun. Dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan bersifat indikatif.

Dengan mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021 – 2026, Visi pembangunan jangka menengah Kabupaten Pasaman Barat, adalah :

“Mewujudkan Pasaman Barat Yang Bermartabat, Agamais, Maju dan Sejahtera”

Berdasarkan visi jangka menengah pemerintah daerah Kabupaten Pasaman Barat tahun 2021-2026, maka ditetapkan misi jangka menengah pemerintah daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021-2026 sebagai upaya dalam mewujudkan visi, sebagai berikut:

1. Misi ke-1: Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional dan inovatif
2. Misi ke-2: Membangun sumber daya manusia yang beriman dan bertaqwa, berbudaya, dan berdaya saing
3. Misi Ke-3: Mewujudkan perekonomian yang tangguh, berdaya saing, dan inklusif

Berdasarkan fungsinya sebagai OPD yang menangani urusan Penanaman Modal, DPMTSP menunjang pencapaian sasaran pada misi 1 dan misi 3 kepala daerah, yakni

- a. Misi ke-1: Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional dan inovatif
- b. Misi Ke-3: Mewujudkan perekonomian yang tangguh, berdaya saing, dan inklusif

Dari pernyataan misi di atas, terdapat dua poin penting yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMTSP) Kabupaten Pasaman Barat yaitu pada misi ke-satu dan ke-tiga. Misi ke-satu yang mengatakan pemerintah Kabupaten Pasaman Barat perlu Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional dan inovatif dan Misi ke-tiga yaitu Mewujudkan perekonomian yang tangguh, berdaya saing, dan inklusif

2.1.2. TUJUAN

Penetapan tujuan, sasaran pembangunan di dasarkan pada penetapan visi dan misi pembangunan. Tujuan dan sasaran dirumuskan dalam bentuk yang lebih tepat dan terarah dalam rangka mencapai visi dan misi. Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi

yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka menengah. Dengan diformulasikannya tujuan strategis ini maka Kabupaten Pasaman Barat dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan dalam memenuhi visi dan misi dengan mempertimbangkan sumber daya daerah dan kemampuan yang dimiliki baik aktual maupun potensial.

Sasaran pembangunan daerah Kabupaten Pasaman Barat merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis dan merupakan dasar yang kuat untuk mengendalikan dan memantau pencapaian kinerja pemerintah daerah Kabupaten Pasaman Barat serta lebih menjamin suksesnya pelaksanaan rencana jangka panjang yang sifatnya menyeluruh.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Pasaman Barat memainkan peran penting dalam upaya pelaksanaan misi ke-satu ini terutama dalam meningkatkan pelayanan perizinan yang berkualitas. Upaya ini dapat memberikan jaminan dan kepastian pelayanan administrasi pemerintah dalam melaksanakan program penanaman modal yang efektif dan efisien. Arah kebijakan yang diperlukan untuk mencapai sasaran ini adalah menyiapkan sarana dan prasarana pendukung pelayanan perizinan, meningkatkan kapasitas SDM aparatur pelayanan perizinan, membentuk tim pemantauan lapangan dalam pemenuhan komitmen perizinan dan meningkatkan pelayanan konsultasi pengaduan masyarakat terhadap pelayanan perizinan.

Tujuan lain pada misi ke-tiga yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Pasaman Barat adalah Mewujudkan perekonomian yang tangguh, berdaya saing dan inklusif. Peningkatan pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan nilai investasi di daerah dengan cara menetapkan kebijakan daerah mengenai fasilitas/insentif dan kemudahan penanaman modal, menyusun strategi promosi investasi, menyiapkan data dan informasi terkait dengan peluang investasi di daerah serta peningkatan pengawasan dan pengendalian kegiatan penanaman modal di daerah.

Mengembangkan dan mengimplementasikan program pelayanan satu pintu yang prima dalam konteks pelayanan perizinan dan penanaman modal. Penetapan tujuan, sasaran pembangunan di dasarkan pada penetapan

visi dan misi pembangunan. Tujuan dan sasaran dirumuskan dalam bentuk yang lebih tepat dan terarah dalam rangka mencapai visi dan misi. Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka menengah. Dengan diformulasikannya tujuan strategis ini maka Kabupaten Pasaman Barat dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan dalam memenuhi visi dan misi dengan mempertimbangkan sumber daya daerah dan kemampuan yang dimiliki baik aktual maupun potensial.

2.1.3. SASARAN

Sasaran pembangunan daerah Kabupaten Pasaman Barat merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis dan merupakan dasar yang kuat untuk mengendalikan dan memantau pencapaian kinerja pemerintah daerah Kabupaten Pasaman Barat serta lebih menjamin suksesnya pelaksanaan rencana jangka panjang yang sifatnya menyeluruh.

Sasaran yang akan dicapai untuk mencapai tujuan diatas adalah :

1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja
2. Meningkatnya Pelayanan Perizinan Yang Berkualitas
3. Meningkatnya Nilai Investasi PMA/PMDN

Sasaran yang ditetapkan di atas dijadikan sebagai indikator capaian tujuan untuk memudahkan institusi dalam mengukur, memantau, dan melakukan tindakan korektif jika dibutuhkan. Indikator di atas bersifat menantang tapi fleksibel.. Sehubungan dengan hal itu maka disusunlah target kinerja sasaran penanaman modal selama periode 2021-2026

Tujuan, sasaran strategis dan Indikator Kinerja sesuai dengan Renstra Perubahan Tahun 2021-2026 DPMPD Kabupaten Pasaman Barat dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut ini :

Tabel 2.1 Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Pada Renstra Perubahan
Tahun 2021 – 2026 DPMPTSP Kabupaten Pasaman Barat

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Target Kinerja Sasaran pada Tahun					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja		Nilai SAKIP	B	B	B	B	B	BB
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	1. Nilai SAKIP	B	B	B	B	B	BB
			2. Level Maturitas SPIP	3	3	3	3	3	3
			3. Persentase penurunan jumlah temuan BPK	30%	40 %	50 %	60 %	70 %	80%
2	Meningkatkan Pelayanan Publik Yang Berkualitas		Nilai IKM Perizinan	85,14	85,25	85,45	85,60	85,85	86
		Meningkatnya Pelayanan Perizinan Yang Berkualitas	Nilai IKM Perizinan	85,14	85,25	85,45	85,60	85,85	86
3	Meningkatkan investasi di daerah		Kenaikan Nilai Investasi daerah	50 Milyar	51 Milyar	1,96%	1,96%	1,96%	1,96%
		Meningkatnya Nilai investasi PMDN / PMA	Kenaikan Nilai Investasi PMDN/PMA	50 Milyar	51 Milyar	1,96%	1,96%	1,96%	1,96%

Sumber : Renstra Perubahan 2021-2026 DPMPTSP Kab Pasaman Barat

Pada table 2.1 dapat dilihat pada sasaran strategi Meningkatnya Nilai investasi PMDN / PMA dengan indikator Kenaikan Nilai Investasi

PMDN/PMA terjadi perubahan target pada tahun 2023 sampai dengan 2026 yaitu 1,96%. Pada tahun 2021 tahun 2022 target dalam bentuk nilai investasi tahun n yaitu 50 Milyar dan 51 Milyar dan pada perubahan target pada tahun 2023 sampai dengan 2026 target dalam bentuk persentase. Perubahan indicator ini dilakukan karena dari hasil evaluasi Renstra 2021-2026 dan Renja 2022, terjadi ketidak sesuaian antara target dengan indicator, sehingga perlu dilakukan perubahan target sasaran aitu dalam bentuk persentase.

Pencapaian tujuan secara umum pelaksanaan Meningkatnya Nilai Investasi PMA/PMDN di Kabupaten Pasaman Barat tidak sepenuhnya menjadi tanggung jawab Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman Barat. Meningkatnya Nilai Investasi PMA/PMDN di Kabupaten Pasaman Barat , banyak melibatkan Dinas/Badan/Kantor/Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam meningkatkan investasi sesuai dengan tugas dan kewenangan pada masing- masing Dinas/Badan/Kantor/Satuan Kerja Perangkat Daerah.

2.1.4. STRATEGI

Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai. Strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program – program indikatif untuk mendukung visi dan misi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, sesuai dengan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017. Selain itu, strategi juga berguna sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja birokrasi Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman Barat secara berkelanjutan. Sebagai salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah, rumusan strategi akan mengimplementasikan bagaimana sasaran pembangunan akan dicapai dengan serangkaian arah kebijakan dari pemangku kepentingan. Laporan Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024, telah menentukan strategi untuk lima tahun mendatang yaitu :

1. Strategi untuk mencapai sasaran Meningkatnya Nilai Investasi PMA/ PMDN, yaitu :
 - a. Meningkatkan kualitas promosi penanaman modal yang memiliki daya tarik dan daya saing yang tinggi;
 - b. Menyusun peta potensial investasi;
 - c. Menetapkan kebijakan pemberian fasilitas/insentif di bidang penanaman modal
 - d. Meningkatkan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Penanaman Modal di daerah;
2. Strategi untuk mencapai sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan perizinan, yaitu ;
 - a. Meningkatkan pelayanan, perizinan dan non perizinan secara terpadu satu pintu yang terintegrasi ;
 - b. Meningkatkan pemantauan pemenuhan komitmen perizinan dan non perizinan penanaman modal;
 - c. Meningkatkan pelayanan konsultasi dan pengelolaan pengaduan Masyarakat terhadap pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan;
 - d. Koordinasi dan sinkronisasi penetapan pemberian fasilitas/insentif daerah.
 - e. Menyediakan data dan informasi perizinan dan non perizinan yang berkelanjutan

2.1.5.KEBIJAKAN

Kebijakan yang ditempuh untuk mendukung misi pemerintah Kabupaten Pasaman Barat, adalah sebagai berikut :

1. Kebijakan untuk mencapai sasaran meningkatnya realisasi investasi, yaitu:
 - a) Menyusun strategi promosi di daerah
 - b) Menyiapkan bahan-bahan promosi potensi unggulan daerah.
 - c) Meningkatkan pelaksanaan promosi investasi melalui media cetak,elektronik dan sosial media

- d) Menyelenggarakan promosi investasi melalui pameran potensi investasi baik tingkat daerah maupun Nasional ;
 - e) Membuat peta investasi dan peluang usaha sebagai informasi bagi calon investor
 - f) Menentukan potensi daerah yang akan dikembangkan sebagai peluang investasi daerah melalui kajian kelayakan (feasibility study)
 - g) Memperkenalkan potensi unggulan daerah melalui profil daerah, booklet, leaflet.
 - h) Membuat peraturan daerah/kepada daerah mengenai kebijakan pemberian fasilitas/insentif di bidang penanaman modal.
 - i) Mengevaluasi kebijakan pelaksanaan pemberian fasilitas/insentif dan kemudahan penanaman modal
 - j) Meningkatkan pemantauan pelaksanaan penanaman modal
 - k) Mengadakan sosialisasi / pembinaan mengenai pelaporan LKPM bagi investor
 - l) Meningkatkan pengawasan kegiatan penanaman modal di daerah.
 - m) Memfasilitasi investor dalam penyelesaian permasalahan kegiatan penanaman modal dengan masyarakat
2. Kebijakan untuk mencapai sasaran Meningkatkan Kualitas Pelayanan perizinan, yaitu :
1. Menyiapkan sarana dan prasarana pendukung pelayanan perizinan yang berbasis IT.
 2. Meningkatkan kapasitas SDM aparatur pelayanan perizinan
 3. Menginventarisasi aturan perizinan sebagai dasar pemberian perizinan
 4. Melaksanakan perizinan berusaha secara Sistem OSS-RBA (berbasis resiko)
 5. Meningkatkan koordinasi dan peran aktif tim teknis dalam merumuskan rekomendasi perizinan
 6. Mengadakan pelayanan public yang terintegrasi (Mall Pelayanan Publik)
 7. Membentuk Tim Pemantauan lapangan dalam pemenuhan komitmen perizinan.
 8. Meningkatkan pelayanan konsultasi pengaduan masyarakat terhadap pelayanan perizinan

9. Menghitung nilai indeks kepuasan masyarakat untuk menentukan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perizinan
10. Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi dalam membuat kebijakan/aturan terkait pemberian fasilitas/insentif.
11. Melakukan pengolahan, penyajian dan pemanfaatan data dan informasi perizinan dan non perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha secara elektronik.

2.1.6. PROGRAM UNTUK PENCAPAIAN SASARAN

Berdasarkan visi, misi tujuan, sasaran strategi dan arah kebijakan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Perubahan (RENSTRA) 2021-2026, maka upaya pencapaiannya kemudian dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan program Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman Barat. Adapun program – program yang dilaksanakan untuk mendukung masing – masing sasaran tahun 2024, sebagai berikut:

Tabel 2.2
Program untuk Pencapaian Sasaran Strategis
Tahun 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	JUMLAH PROGRAM	PROGRAM
1	2	3	
1.	Meningkatnya Nilai Investasi PMA/PMDN	4 program	Program Promosi Penanaman Modal
			Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
			Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal
2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1 Program	Program Pelayanan Penanaman Modal
3.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi	1 Program	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

2.2. PERJANJIAN KINERJA DPMPTSP KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2024

Dokumen perjanjian kinerja merupakan dokumen pernyataan/ kesepakatan /perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan satu instansi. Dokumen ini memuat sasaran strategis, indikator kinerja utama beserta target kinerja dan anggaran.

Penyusunan Perjanjian Kinerja tahun 2024 dilakukan dengan mengacu kepada Rencana Strategis (Renstra) Perubahan, Rencana Kerja (Renja) 2024, IKU Perubahan sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor : 100.3.3.2/SSO/BUP-PASBAR/2023 tentang Perubahan Indikator Kerja Utama Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 dan APBD Perubahan TA. 2024, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman Barat tahun 2024 telah menetapkan Perjanjian Kinerja, sebagai berikut:

Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja DPMPTSP
Kabupaten Pasaman Barat
Tahun 2024

No	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA
1	2	6	4
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	Nilai SAKIP	B
		Level Maturitas SPJP	3
		Persentase penurunan jumlah temuan BPK	60%
2	Meningkatnya Pelayanan Perizinan Yang Berkualitas	Nilai IKM Perizinan	85,60
3	Meningkatnya Nilai investasi PMDN / PMA	Kenaikan Nilai Investasi PMDN /PMA	1,96%

Sumber : Perjanjian Kinerja Kepala DP PTSP Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024

No	Program	Anggaran
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 4.200.032.247,-
2.	Program Program Promosi Penanaman Modal	Rp. 60.994.050,-
3.	Program Pelayanan Penanaman Modal	Rp. 120.185.000,-
4.	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Rp. 646.265.000,-
5.	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Rp. 33.225.600,-

Sumber : DPA TA.2024 DPMPTSP Kab. Pasaman Barat.

Perjanjian Kinerja 2024 mengalami perubahan pada pagu anggaran program dan kegiatan sehingga perlu dilakukan revisi Perjanjian Kinerja 2024 untuk menyesuaikan pagu anggaran program dan kegiatan sesuai dengan DPA Perubahan 2024. Perjanjian Kinerja Perubahan 2024 dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 2.4
Perjanjian Kinerja Perubahan
DPMPTSP Kabupaten Pasaman Barat
Tahun 2024

No	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA
1	2	6	4
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	Nilai SAKIP	B
		Level Maturitas SPIP	3
		Persentase penurunan jumlah temuan BPK	60%
2	Meningkatnya Pelayanan Perizinan Yang Berkualitas	Nilai IKM Perizinan	85,60
3	Meningkatnya Nilai investasi PMDN / PMA	Kenaikan Nilai Investasi PMDN /PMA	1,96%

Sumber : Revisi Perjanjian Kinerja Kepala DPMPTSP Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024

No	Program/Kegiatan	Anggaran
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 4.048.310.047,-
2.	Program Program Promosi Penanaman Modal	Rp. 45.540.400,-
3.	Program Pelayanan Penanaman Modal	Rp. 115.534.800,-
4.	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Rp. 646.265.000,-
5.	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Rp. 31.051.650,-

Sumber : DPA Perubahan TA.2024 DPMPTSP Kab. Pasaman Barat.

2.3. PROGRAM KEGIATAN DAN ANGGARAN

Pada Tahun Anggaran 2024 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman Barat mendapatkan alokasi anggaran Belanja pada APBD Perubahan sebesar Rp. 4.851.571.497,- yang digunakan untuk Belanja Operasi dan Belanja Modal. Secara rinci Anggaran Belanja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman Barat pada Tahun Anggaran 2024, dapat dilihat pada tabel di bawahini.

Tabel 2.5
Program Kegiatan dan Anggaran DPMPPTSP Kabupaten Pasaman Barat
Tahun Anggaran 2024

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN
1	2	3
I.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA	4.048.310.047
A.	PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	67.817.300
1.	PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	38.624.000
2.	EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	29.193.300
B.	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	3.340.182.745
3.	PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	3.241.612.745
4.	PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN	22.550.000
5.	PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN DAN PENGUJIAN/VERIFIKASI KEUANGAN SKPD	76.020.000
C.	ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH	11.050.000
6.	PENGAMANAN BARANG MILIK DAERAH SKPD	11.050.000
D.	ADMINISTRASI KETEGAWALAN PERANGKAT DAERAH	13.542.450
7.	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	3.703.000
8.	BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN	9.839.450
E.	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	251.076.120
9.	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	11.085.000
10.	PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	37.043.700
11.	PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	10.754.920
12.	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGAANDAAAN	4.650.000
13.	PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	187.542.500
F.	PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	35.130.400
14.	PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	35.130.400
G.	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	153.795.232
15.	PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	21.220.000
16.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	49.785.720
17.	PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	82.789.512
G.	PEMILIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	175.715.600

18.	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, JASA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL/ LAFANGAN	40.250.000
19.	PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN	119.349.800
20.	PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	16.116.000
II	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	43.540.400
A	PENYELENGGARAAN PROMOSI PENANAMAN MODAL YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	43.540.400
21.	PELAKSANAAN KEGIATAN PROMOSI PENANAMAN MODAL DAERAH KABUPATEN/KOTA	43.540.400
III	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	115.534.800
A	PENANAMAN MODAL YANG MENURUT KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN MENJADI KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	115.534.800
22.	PENYEDIAAN PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA MELALUI SISTEM PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK	95.897.600
23.	PENYEDIAAN DAN PENGELOLAAN LAYANAN KONSULTASI PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO	19.637.200
IV	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	646.265.000
A	PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	646.265.000
24.	PENYELESAIAN PERMASALAHAN DAN HAMBATAN YANG DIHADAPI PELAKU USAHA DALAM MEREALISASIKAN KEGIATAN USAHANYA	92.132.000
25.	BIMBINGAN TEKNIS KEPADA PELAKU USAHA	337.820.000
26.	PENGAWASAN PENANAMAN MODAL	216.313.000
V	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	31.051.650
A	URUSAN PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI PERIZINAN DAN NON PERIZINAN PENANAMAN MODAL YANG TERINTEGRASI PADA TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	31.051.650
27.	PENGOLAHAN, PENYAJIAN DAN PEMANFAATAN DATA DAN INFORMASI PERIZINAN BERBASIS SISTEM PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK	31.051.650
Jumlah		4.886.701.897

Alokasi anggaran perubahan Tahun Anggaran 2024 yang dialokasikan untuk membiayai program dan kegiatan yang langsung mendukung pencapaian sasaran strategis adalah sebagai berikut :

Tabel 2.6
Alokasi Anggaran per Sasaran Strategis
Tahun Anggaran 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	ANGGARAN	% ANGGARAN
1	2	3	4	5
1.	Meningkatnya Nilai investasi PMDN / PMA	Kenaikan Nilai Investasi PMDN /PMA	687.726.650,-	14,17 %
2.	Meningkatnya Pelayanan Perizinan Yang Berkualitas	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	115.534.800,-	2,39 %
3.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi	Nilai SAKIP	4.048.310.047,- (termasuk gaji dan tunjangan ASN)	83,44 %
		Level Maturitas SPIP		
		Persentase penurunan jumlah temuan BPK		
TOTAL ANGGARAN			4.851.571.497	100,00 %

Sumber : DPA DPMPD Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024

Pada tabel di atas, jumlah anggaran perubahan untuk rogram/kegiatan sebesar Rp.4.851.571.497,- dengan persentase terbesar untuk mendukung sasaran strategis Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Organisasi dengan anggaran sebesar Rp. 4.048.310.047,- atau sebesar 83,44% yang didalamnya termasuk Gaji dan Tunjangan ASN, kemudian untuk sasaran strategis Meningkatkan Nilai Investasi PMDN/PMA dengan anggaran sebesar Rp. 687.726.650,- atau sebesar 14,17% serta untuk sasaran strategis Meningkatkan Kualitas Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan anggaran sebesar Rp. 115.534.800,-atau sebesar 2,39 % dari total anggaran belanja operasi dan belanja modal, yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja tahun 2024.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Bab ini secara umum menjelaskan tentang Pengukuran Kinerja, Evaluasi dan Analisis Pencapaian Kinerja, pencapaian indikator kinerjanya yang dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman Barat, dan membahas Akuntabilitas Keuangan.

Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapaitujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Sistem akuntabilitas kinerja mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Sistem akuntabilitas kinerja pemerintah bertujuan untuk membangun pemerintah yang akuntabel dan terukur serta mampu mempertanggungjawabkan hasil atau manfaat kerjanya bagi masyarakat termasuk atas penggunaan anggaran yang dikelolanya.

Salah satu pendekatan yang dapat digunakan untuk mengukur akuntabilitas kinerja perangkat daerah dapat dilakukan melalui pendekatan manajemen pembangunan berbasis kinerja, yaitu pembangunan diorientasikan pada pencapaian menuju perubahan yang lebih baik. Hal ini mengandaikan bahwa fokus dari pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program/kegiatan yang sudah direncanakan. Esensi dari

manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perbaikan, di mana program/kegiatan dan sumber daya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level keluaran, hasil maupun dampak.

Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip *good governance* di mana salah satu pilarnya, yaitu akuntabilitas, akan menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Sehingga, pengendalian dan pertanggungjawaban program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah dicapai.

Sebagai bagian dari komitmen Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman Barat untuk membangun akuntabilitas kinerja ini, pengembangan web-monev adalah bagian kunci untuk mendorong kelembagaan pengendalian, evaluasi yang transparan dan berorientasi pada perbaikan pelayanan publik.

Dalam hal ini, laporan akuntabilitas kinerja pemerintah merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja (Permenpan No. 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah). Pencapaian 3 Tujuan dengan 3 (tiga) Indikator Kinerja Tujuan dan 3 (tiga) Sasaran Strategis dengan 3 (tiga) Indikator Kinerja Sasaran Strategis serta anggaran pelaksanaan program dan kegiatan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan sumber dana lainnya yang mendukung pencapaian kinerja tersebut.

3.1. METODOLOGI PENGUKURAN KINERJA

Metode pengukuran capaian kinerja yang digunakan dalam laporan kinerja ini adalah membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja dengan kriteria sebagai berikut :

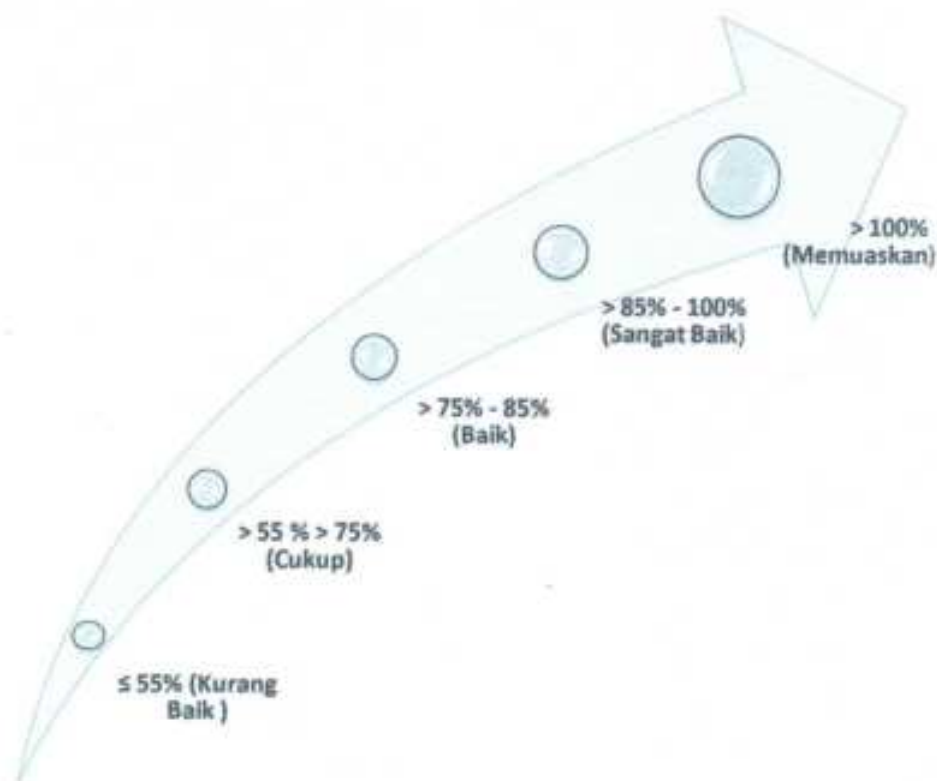
1. Jika realisasi tinggi menunjukkan kinerja yang baik, % capaian kinerjanya dihitung dengan menggunakan rumus:

$$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

2. Jika realisasi tinggi menunjukkan kinerja yang tidak baik, % capaian kinerjanya dihitung dengan menggunakan rumus:

$$\frac{2 \times \text{Target} - \text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Hasil pengukuran kinerja dimaksud digunakan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran strategis dalam rangka mewujudkan pencapaian tujuan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman Barat yang telah ditetapkan sejalan dengan pencapaian sasaran gubernur serta menganalisis penyebab keberhasilan/kegagalan pencapaian target kinerja yang ditetapkan. Hasil pengukuran kinerja tersebut dikategorikan mulai dari Kurang Baik dengan capaian kinerja $\leq 55\%$ sampai Memuaskan dengan capaian kinerja $> 100\%$, sebagai berikut:



Hasil pengukuran capaian kinerja dari 2 (dua) sasaran strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman Barat tahun 2024 dengan 2 (dua) indikator kinerja yang termasuk dalam Indikator Kinerja Utama OPD dan 2 (dua) sasaran strategis dengan 2 (dua) indikator kinerja pendukung dapat dilihat dalam table 3.1., sebagai berikut:

Tabel 3.1
Kategori Keberhasilan Indikator Kinerja
Pengukuran Kinerja Tahun 2024

NO	KATEGORI KEBERHASILAN	JUMLAH INDIKATOR KINERJA
1.	Memuaskan	2 Indikator Kinerja
2.	Sangat Baik	1 Indikator Kinerja
3.	Baik	-
4.	Cukup	-
5.	Kurang Baik	-

3.2. HASIL PENGUKURAN KINERJA

Hasil pengukuran pencapaian capaian kinerja dari 2 (dua) tujuan dengan 2 (tiga) indikator kinerja tujuan serta 3 (tiga) sasaran strategis dengan 3 (tiga) indikator kinerja sasaran strategis dimana 2 (dua) indikator kinerja utama dan 1 (satu) indikator kinerja pendukung, yang telah ditetapkan dalam dokumen Perubahan Perjanjian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024, dapat dilihat pada tabel 3.2 berikut:

Tabel 3.2
Hasil Pengukuran Kinerja
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Pasaman Barat

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja
1	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	1. Nilai SAKIP	B	BB	>100%
			1. Nilai SAKIP	B	BB	>100%
			2. Level Maturitas SPIP	3	3	100%
			3. Persentase penurunan jumlah temuan BPK	60 %	100%	>100%
2	Meningkatkan Pelayanan Publik Yang Berkualitas		Nilai IKM Perizinan	85,60	88,16	97,49%
			Nilai IKM Perizinan	85,60	88,16	97,49%
3	Meningkatkan investasi di daerah		Kenaikan Nilai Investasi daerah	1,96 %	64,63%	-823,97%
			Kenaikan Nilai Investasi PMDN /PMA	1,96 %	64,63%	-823,97%

Dari tabel 3.2 diketahui dari 3 (tiga) indikator kinerja sasaran strategis yang digunakan untuk mengukur capaian kinerja, yakni 2 (dua) indikator kinerja utama dan 1 (satu) kinerja pendukung yang telah ditetapkan dalam dokumen Perubahan Perjanjian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman Barat tahun 2024, dimana 2 (dua) indikator kinerja utama sasaran strategis Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) berada pada level Memuaskan dengan hasil 88,16 dari target dimana capaian kinerja >100% dan indikator kinerja sasaran strategis Kenaikan Nilai Investasi PMA/PMDN tahun 2024 dengan hasil 64,63% serta capaian kinerja >100 %, 1 (satu) indikator kinerja pendukung sasaran strategis Memuaskan dengan hasil capaian kinerja >100% yaitu Nilai SAKIP capaian kinerjanya sudah >100%, realisasi kinerja yaitu BB melebihi dari yang ditargetkan yaitu B dan data diambil dari Laporan Hasil Evaluasi LKjIP Tahun 2023. Level Maturitas SPIP menggunakan data penilaian Tahun 2024. Persentase penurunan jumlah temuan BPK realisasinya sesuai dengan target yaitu 60% dengan capaian kinerja >100% . Data ini diambil dari hasil pemeriksaan Laporan Keuangan Tahun 2023.

Dibandingkan dengan hasil capaian kinerja indikator kinerja tahun 2023, Kenaikan Nilai Investasi PMA dan PMDN tahun 2024 mengalami peningkatan sebesar 64,63 % dan hasil capaian indikator kinerja Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat tahun 2024 juga mengalami peningkatan dari tahun 2023 yaitu sebesar 4,85%.

3.3. CAPAIAN KINERJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2023.

Sasaran I

“Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja”

A. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Sasaran strategis yang pertama yaitu Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja dengan indikator kinerja Nilai SAKIP OPD. Indikator kinerja dari sasaran strategis yang menjadi bagian dari pencapaian tujuan pertama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman Barat sama dengan indikator kinerja tujuan

Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja, dimana pencapaian indikator sasaran strategis tersebut dapat dilihat dari realisasi dan capaian kinerja dari indikator kinerja, sebagaimana terlihat pada tabel 3.3, berikut:

Tabel 3.3
Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Sasaran 1
“Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja”

NO	TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Tahun 2023			Target 2024
			TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	
1	2	3	4	5	6	7
2.	Meningkatka Akuntabilitas Kinerja	Nilai SAKIP	B	BB	>100%	B
2.1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	- Nilai SAKIP - Level Maturitas - Persentase penurunan jumlah temuan BPK	B 3 60%	BB 3 100%	>100% 100% >100%	B B 50%

Dari tabel 3.3 di atas terlihat bahwa hasil capaian dari indikator kinerja pertama Nilai SAKIP capaian kinerja nya sudah >100%, realisasi kinerja yaitu BB melebihi dari yang ditargetkan yaitu B dan data diambil dari Laporan Hasil Evaluasi LKJIP Tahun 2023. Level Maturitas SPIP menggunakan data 2024 dengan capaian realisasi 100%. Indikator Persentase penurunan jumlah temuan BPK realisasinya sesuai dengan target yaitu 60% dengan capaian kinerja

100% . Data ini diambil dari hasil pemeriksaan Laporan Keuangan Tahun 2023 oleh BPK RI.

B. Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun 2021, Tahun 2022 dan Tahun 2023 serta Target Kinerja 2025

Perbandingan realisasi indikator kinerja Nilai SAKIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman Barat tahun 2024 dengan tahun 2021, tahun 2022 dan tahun 2023 serta target tahun 2025, seperti digambarkan pada tabel 3.4 berikut ini:

Tabel 3.4
Perbandingan Realisasi, Capaian Indikator Kinerja Sasaran
Strategis Tahun 2021 dan Tahun 2022 dengan 2023 serta Target 2024

NO	TUJUAN / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	REALISASI				CAPAIAN KINERJA				Target 2025
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja	Nilai SAKIP	B	BB	BB	BB	100%	100%	100%	>100%	B
2.1	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja	- Nilai SAKIP - Level Maturitas - Persentase penurunan jumlah temuan BPK	B 3 30%	BB 3 40%	BB 3 50%	BB 3 100%	100% 100% 100%	100% 100% 100%	100% 100% 100%	>100% 100% >100%	B 3 70%

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGI

1. Nilai SAKIP

Nilai SAKIP tahun 2024 capaian kinerja nya sudah 100%, realisasi kinerja yaitu BB melebihi dari yang ditargetkan yaitu B dan data diambil dari Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Insytansi Pemerintah Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2024 Nomor : 700.1.2.1/18/Inspekt-LHE/V/2024 tanggal 13 Mei 2024. Realisasi Nilai SAKIP Tahun 2023 sama dengan tahun 2024 yaitu BB dengan capaian kinerja >100%. Nilai SAKIP Tahun 2021 yaitu B diambil

berdasarkan Laporan hasil Evaluasi Tahun 2020 dan Untuk target tahun 2025 Nilai SAKIP ditargetkan benilai B. Berikut interval realisasi Nilai SAKIP Tahun 2021-2024 :



2. Level maturitas SPIP

Untuk indikator capaian level maturitas SPIP, penilaian dilaksanakan secara mandiri dan hasilnya dievaluasi oleh BPKP Propinsi Sumatera Barat berdasarkan Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas SPIP terintegrasi pada K/L/D. Dari laporan hasil evaluasi penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP pada Kabupaten Pasaman Barat Nomor : PE.09.03/S-543/D3/04/2024, Tanggal : 31 desember 2024. Penilaian dievaluasi secara menyeluruh yaitu tingkat Kabupaten Pasaman Barat, hasil penilaian maturitas Penyelenggaraan SPIP hasil evaluasi yaitu berada pada level 3 (tiga) dapat dilihat pada table dibawah ini :

No. Urut	Kode Pa	No	Perwakilan	SPIP Terintegrasi							Kap APIP	
				SPIP		MR		IEPK				
				Skor	Level	Skor	Level	Skor	Level	Keterangan	Skor	Level
70	PW03	14	Kabupaten Sijunjung	2.850	3	2.800	2	2.740	2		3.000	3
71	PW03	15	Kota Sawahlerto	3.050	3	2.800	2	2.920	2		3.000	3
72	PW03	16	Kabupaten Solok Selatan	2.850	2	2.600	2	2.630	2		3.000	3
73	PW03	17	Kabupaten Pasaman Barat	3.350	3	3.350	3	3.000	3		3.000	3
74	PW03	18	Kota Padang Panjang	3.050	3	2.800	2	3.000	3		3.000	3
75	PW03	19	Kabupaten Kepulauan Meranti	3.000	3	2.850	2	2.810	2		3.000	3

Sumber : Surat Penetapan hasil evaluasi penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi dan Kapabilitas APIP Daerah tahun 2024, 2024

3. Persentase penurunan jumlah temuan BPK

Indikator capaian Persentase penurunan jumlah temuan BPK tahun 2024 yaitu 100% dari hasil pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2023 pada Kabupaten Pasaman Barat oleh BPK RI, Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu satu Pintu tidak terdapat temuan yang harus ditunda lanjut Untuk Tahun 2023 dan tahun 2022 capaian kinerja juga 100% , data diambil dari hasil pemeriksaan Laporan Keuangan Tahun 2023 dan Tahun 2022 dan ditargetkan pada tahun 2025 penurunan jumlah temuan BPK yaitu 70%.

Cara pengukuran indikator :

Persentase penurunan temuan BPK =

= $\frac{\text{Jumlah temuan BPK tahun 2024} - \text{Jumlah temuan BPK tahun 2023}}{\text{Jumlah temuan BPK tahun 2023}} \times 100\%$

Jumlah temuan BPK dan/atau inspektorat tahun 2023

= $\frac{0-1}{1} \times 100\%$

1

= 100 %

C. Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Renstra Perubahan DPMPTSP

Tabel 3.5

Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Renstra DPMPTSP

NO	TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Tahun 2024			Tingkat Kemajuan
			TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	
1	2	3	4	5	6	7
2.	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja	Nilai SAKIP	B	BB	100%	Tercapai
2.1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	- Nilai SAKIP - Level Maturitas SPIP - Persentase penurunan jumlah temuan BPK	B 3 50%	BB 3 100%	100% 100% 100%	- Tercapai - Tercapai - Tercapai

Pada tabel diatas terlihat bahwa Indikator Nilai SAKIP sudah mencapai target 100% berdasarkan data Laporan Hasil Evaluasi LKjIP Tahun 2023. Untuk Level Maturitas SPIP capaian kinerja tahun 2024 sudah mencapai 100 %, data diambil dari Laporan hasil evaluasi penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP pada Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024. Untuk indikator Persentase penurunan jumlah temuan BPK hasil capaian kinerja tahun 2024 yaitu 100%, data diambil dari pemeriksaan Laporan Keuangan DPMPTSP Tahun 2023 oleh Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK RI). Dari 3 (tiga) indikator strategis tersebut dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja sudah tercapai sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan pada dokumen Renstra Perubahan DPMPTSP (2021-2026).

D. Analisis Penyebab Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Upaya yang Telah Dilakukan

Dengan 3 (Tiga) Indikator Kinerja yaitu Nilai SAKIP, Level Maturitas SPIP dan Persentase penurunan jumlah temuan BPK Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman Barat tahun 2024. Realisasi kinerja ketiga indikator diatas telah mencapai target yang ditetapkan. Dari capaian kinerja tersebut tidak ada permasalahan yang signifikan.

Faktor Pendukung Pencapaian kinerja :

1. Komitmen tinggi mulai dari unsur pimpinan sampai ke level staf dalam pelaksanaan program dan kegiatan.
2. Monitoring dan Evaluasi berkala yang dilakukan untuk melihat sampai dimana kemajuan pelaksanaan program dan kegiatan serta pencapaian kinerja
3. Penegakan pemberian reward dan punishment berupa pengurangan tambahan penghasilan kepada beberapa aparatur.

Upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan nilai evaluasi SAKIP, adalah:

- 1 . Menyempurnakan dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja, dengan:

- a. Melakukan pembahasan cascading kinerja dan dokumen perencanaan kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman Barat (keterkaitan tujuan, sasaran, indikator kinerja tujuan/sasaran, penetapan kinerja).
 - b. Melakukan keselarasan indikator kinerja yang ada dengan dokumen perjanjian kinerja dengan SKP
2. Penyusunan Perjanjian Kinerja sampai Perjanjian Kinerja level Staf
 3. Penyusunan SKP sudah diselaraskan dengan Perjanjian Kinerja
 4. Monitoring pencapaian target indikator kinerja yang telah disepakati dalam dokumen Perjanjian Kinerja.

E. ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN ATAUPUN KEGAGALAN PENCAPAIAN PERNYATAAN KINERJA

Untuk mencapai Sasaran Strategis DPMPPTSP Kabupaten Pasaman Barat didukung oleh Program dan Kegiatan dalam upaya pencapaian kinerja. Ada Beberapa Program dan Kegiatan yang menunjang Kinerja yaitu :

Tabel 3.6
Program dan Kegiatan Mendukung Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Tahun 2024

NO	URAIAN PROGRAM dan KEGIATAN	INDIKATOR
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah
1.1	PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	Persentase Capaian Target Kinerja sesuai dengan perencanaan dan penganggaran
1.2	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Gaji, Tunjangan, dan Honorarium Pegawai
1.3	ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH	Jumlah BMD yang dikelola DPMPPTSP
1.4	ADMINISTRASI KEPENGAWALAN PERANGKAT DAERAH	Persentase peningkatan kapasitas Pegawai DPMPPTSP
1.5	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi dan Operasional Kantor
1.7	PENGALIHAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase pengadaan sarana dan prasarana penunjang perkantoran
1.8	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase pemenuhan penyediaan jasa layanan penunjang urusan kantor
1.9	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase pemeliharaan BMD di DPMPPTSP

Sumber Data : Renja DPMPPTSP 2024

Dari table 3.6 dapat dilihat ada 1 program dan 9 kegiatan yang menunjang kinerja sasaran strategis Akuntabilitas Kinerja. Program dan kegiatan ini berupa Meningkatkan kapasitas SDM, menyediakan gaji dan tunjangan aparatur dan menyediakan sarana dan prasarana yang mendukung terlaksana kegiatan perkantoran serta menyediakan pemeliharaan Barang Milik Daerah yang ada di DPMPPTSP Kabupaten Pasaman Barat

Sasaran Strategi 2 “ Meningkatkan Pelayanan Perizinan yang Berkualitas “

Sasaran Strategi ke dua yaitu “ Meningkatkan Pelayanan Perizinan yang Berkualitas “ dilihat berdasarkan realisasi dan capaian kinerja indikator kinerja.

Dalam pasal 38 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik bahwa setiap Penyelenggara Pelayanan Publik berkewajiban melakukan penilaian kinerja penyelenggara pelayanan publik secara berkala (sekurang-kurangnya sekali dalam satu tahun) dengan menggunakan indikator kinerja berdasarkan standar pelayanan.

Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) bertujuan untuk mengetahui tingkat kinerja unit pelayanan secara berkala sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik selanjutnya. Dalam rangka survei ini, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman Barat berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Dalam Permen PANRB tersebut, yang dimaksud dengan Survei Kepuasan Pelayanan adalah pengukuran secara komprehensif kegiatan tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari penyelenggara pelayanan publik. Unsur pelayanan adalah faktor atau aspek yang terdapat dalam penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat sebagai variabel penyusunan survei kepuasan masyarakat untuk mengetahui kinerja pelayanan. Terdapat 9 (Sembilan) unsur yang dipakai, yaitu : persyaratan, waktu penyelesaian, biaya/tarif, produk spesifikasi jenis pelayanan, kompetensi pelaksana, perilaku pelaksana, penanganan pengaduan serta sarana dan prasarana.

Dalam melaksanakan survei kepuasan masyarakat ini dilakukan dengan memperhatikan 6 (enam) prinsip, yaitu : transparan, partisipatif, akuntabel, berkesinambungan, keadilan dan netralitas.

Pengukuran kepuasan merupakan elemen penting dalam proses evaluasi kinerja dimana tujuan akhir yang hendak dicapai adalah menyediakan pelayanan yang lebih baik, lebih efisien, dan lebih efektif berbasis dari kebutuhan masyarakat.

Berikut ini proses pengolahan data hasil Survei Kepuasan Masyarakat di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman Barat. Nilai IKM dihitung dengan menggunakan “Nilai Indeks Kepuasan Tertimbang” masing-masing unsur pelayanan. Dalam penghitungan Indeks Kepuasan Masyarakat terdapat 9 (Sembilan) unsur pelayanan yang dikaji, setiap unsur pelayanan memiliki penimbang yang sama dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Bobot Nilai Rata - Rata} = \text{Jumlah Bobot Jumlah Unsur} = 1 / 9 = 0.111$$

Untuk memperoleh nilai IKM unit pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman Barat, digunakan pendekatan nilai rata-rata tertimbang dengan rumus sebagai berikut :

$$IKM = \frac{\text{Total dari Nilai Persepsi Per Unsur}}{\text{Total Unsur yang Terisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$$

Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian SKM Unit Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman Barat, yaitu 25-100 maka penilaian tersebut di atas dikonversikan dengan nilai dasar 25, dengan rumus sebagai berikut :

$$IKM \text{ Unit Pelayanan} \times 25$$

Tabel 3.7
Kelas Interval Survei
Indeks Kepuasan Masyarakat

NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL IKM	NILAI INTERVAL KONVERSI IKM	MUTU PELAYANAN	KINERJA PELAYANAN
1	2	3	4	5
1	1,0000 – 2,5996	25,00 – 64,99	D	TIDAK BAIK
2	2,6000 – 3,0643	65,00 – 76,60	C	KURANG BAIK
3	3,0644 – 3,5323	76,61 – 88,30	B	BAIK
4	3,5324 – 4,0000	88,31 – 100,00	A	SANGAT BAIK

Sumber : Permenpan RB Nomor 17 Tahun 2017

Melalui 3 tahapan itulah diketahui hasil nilai Survei Kepuasan Masyarakat pada semua jenis layanan yang dilakukan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman Barat.

Berikut ini merupakan nilai rata-rata unsur pelayanan hasil pengisian kuesioner yang dilakukan oleh responden.

Tabel 3.8
Nilai Rata-Rata Unsur Pelayanan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024

Unsur Pelayanan	Unsur Pelayanan	Nilai Rata-rata
U1	Persyaratan pelayanan	3,429
U2	Prosedur pelayanan	3,449
U3	Waktu pelayanan	3,294
U4	Biaya/Tarif	3,961
U5	Produk spesifikasi jenis	3,404
U6	Kompetensi pelayanan	3,410
U7	Perilaku pelayanan	3,468
U8	Sarana dan Prasarana	3,449
U9	Penanganan Pengaduan	3,872
Jumlah Nilai Unsur		4951
NRR Per Unsur		31,737
NRR tertimbang*		3,526
IKM**		88,159

Keterangan :

- U1 s.d. U9 = Unsur-Unsur pelayanan
- NRR = Nilai Rata-rata

- IKM = Indeks Kepuasan Masyarakat
- *) = Jumlah NRR IKM tertimbang
- **) = Jumlah NRR Tertimbang x 25
- NRR Per Unsur = Jumlah nilai per unsur dibagi jumlah kuesioner yang terisi
- NRR Tertimbang = NRR per unsur x 0,111 per unsur

Berdasarkan tabel 3.7 diatas menyajikan data-data hasil perhitungan IKM dari responden yang pernah mendapat layanan dari DPMPPTSP Kabupaten Pasaman Barat. Dapat dilihat bahwa Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap kualitas pelayanan DPMPPTSP Kabupaten Pasaman Barat adalah sebesar 88,16%. Nilai ini menunjukkan bahwa rata-rata masyarakat merasa sangat puas dengan pelayanan yang telah diberikan oleh DPMPPTSP Kabupaten Pasaman Barat.

Dari penilaian 9 (Sembilan) unsur pada table 3.7 tersebut, maka kesimpulannya penilaian secara keseluruhan sub unsur pelayanan dimasukan dalam kategori “Baik” dan tidak ada permasalahan yang signifikan dalam proses pelayanan perizinan di DPMPPTSP Kabupaten Pasaman Barat

A. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Tabel 3.8
Realisasi dan Capaian Kinerja Indikator Kinerja
Sasaran Strategis 2.2

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
1	2	3	4
Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)	85,60	88,16	97,49%

Sumber : Laporan Survei Indeks Kepuasan Masyarakat DPMPPTSP Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024

Dari tabel 3.8 di atas terlihat bahwa indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) tahun 2024 realisasinya belum mencapai target yang ditetapkan dengan hasil capaian kinerja “Memuaskan “ sebesar >100%.

B. Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun 2021, Tahun 2022 dan Tahun 2023 serta Target Kinerja 2025

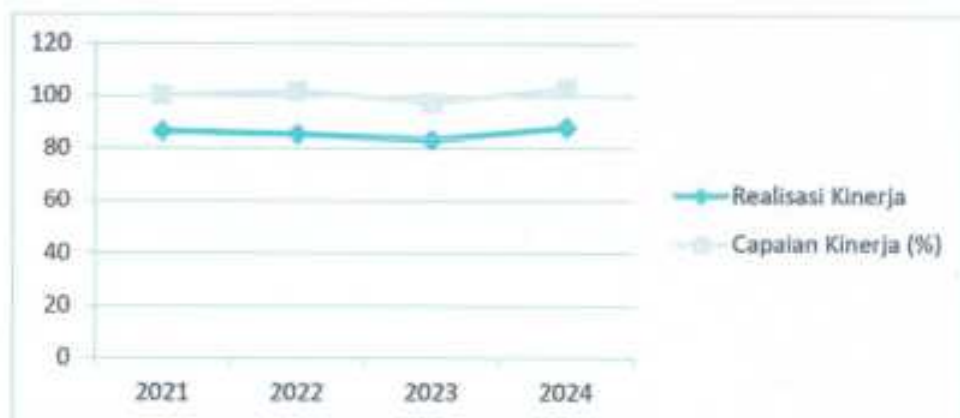
Perbandingan realisasi dan capaian indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) tahun 2024 dengan tahun 2021, tahun 2022 dan tahun 2023, digambarkan pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.9
Perbandingan Realisasi, Capaian Tahun 2021 dan Tahun 2022 dengan Tahun 2023 Dan Target Indikator Kinerja Tahun 2024

No	INDUKATOR KINERJA	REALISASI				CAPAIAN				TARGET
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2025
I.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Terpadu Satu Pintu									
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	86,73	85,56	83,31	88,16	100%	100%	97,49%	>100%	85,85

Sumber Data : Renja 2024 DPMPTSP

Dari tabel 3.19 dapat dilihat indikator kinerja capaian kinerja indikator kinerja nilai survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dari target Nilai Interval Konversi IKM 85,60 terealisasi sebesar 88,16 dengan tingkat capaian kinerja sebesar >100% dibandingkan dengan tahun 2021, tahun 2022 dan Tahun 2023 mengalami peningkatan, yakni sebesar 4,85%. Tingkat capaian kinerja ini mengalami sedikit peningkatan yakni sebesar 2,87% dibandingkan dengan Tahun 2023, tahun 2022 dan tahun 2021, dapat dilihat pada grafik dibawah ini.



C. Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Renstra Perubahan DPMPTSP

Tabel 3.10

Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Renstra Perubahan DPMPTSP

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	
Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)	85,60	88,16	>100%	Tercapai

Sumber : Laporan Keuangan DPMPTSP Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024

Indikator capaian kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat berdasarkan tabel diatas Target 85,60 dengan Realisasi 88,16 belum mencapai target , dengan capaian kinerja yaitu > 100%.

D. Analisis Penyebab Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Upaya yang Telah Dilakukan

Dari persentase capaian kinerja sasaran strategi “ Meningkatkan Pelayanan Perizinan Yang Berkualitas” sudah tercapai yaitu >100 %, dengan kategori “Memuaskan”.

Faktor Pendukung pencapaian kinerja sasaran strategis ini adalah :

1. Adanya peningkatan kinerja pegawai dalam pelayanan perizinan
2. Saranan dan prasarana yang mendukung dalam proses pelayanan perizinan
3. Sudah banyaknya masyarakat yang mengerti prosedur pelayanan perizinan
4. Proses perizinan sudah menggunakan system aplikasi yang terintegrasi secara elektronik, sehingga masyarakat dapat mengurus izin secara mandiri.

Faktor penghambat pencapaian kinerja sasaran strategis yaitu :

1. Ada unsur penilaian yang menjadi prioritas utama untuk diperhatikan dan ditingkatkan oleh DPMPTSP dan menjadi keluhan bagi masyarakat, yaitu: Jangka waktu yang lama untuk menyelesaikan proses izin tertentu

Untuk meningkatkan “Meningkatkan Pelayanan Perizinan yang Berkualitas”, upaya yang telah dilakukan antara lain:

1. Memberikan Pemahaman kepada Masyarakat tentang Aturan – Aturan yang selalu Berubah dengan Mengadakan Layanan Langsung kepada Pelaku Usaha;
2. Memberikan sosialisasi dan pendampingan terhadap penggunaan aplikasi perizinan SIP Sakato dan OSS bagi masyarakat, pelaku usaha dan SKPD Teknis Terkait;
3. Meningkatkan kualitas layanan melalui pelayanan langsung kepada masyarakat;
4. Meningkatkan intensitas koordinasi dengan Kementrian / Lembaga terkait;
5. Meningkatkan koordinasi yang baik dengan SKPD melalui Tim Teknis atau penyelenggara perizinan di Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat.

E. ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN ATAUPUN KEGAGALAN PENCAPAIAN PERNYATAAN KINERJA

Untuk mencapai Sasaran Strategis Meningkatnya Pelayanan Perizinan yang Berkualitas DPMPTSP Kabupaten Pasaman Barat didukung oleh Program dan Kegiatan dalam upaya pencapaian kinerja. Ada Beberapa Program dan Kegiatan yang menunjang Kinerja yaitu :

Tabel 3.11
Program dan Kegiatan Mendukung Meningkatnya Pelayanan Perizinan yang Berkualitas Tahun 2024

NO	URAIAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR
4	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan perizinan
4.1	PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN SECARA TERPADU SATU PINTU DEBIDANG PENANAMAN MODAL YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Perizinan yang diterbitkan tepat waktu Persentase Perizinan yang diterbitkan tepat waktu

Sumber Data : Renja DPMPTSP 2024

Dari table 3.7 dapat dilihat ada 1 program dan 1 kegiatan yang menunjang kinerja sasaran strategis Meningkatnya Pelayanan perizinan yang Berkualitas. Program dan kegiatan ini berupa Meningkatkan pelayanan perizinan bagi masyarakat dan melayani pengaduan terkait proses perizinan serta melayani konsultasi perizinan di DPMPTSP Kabupaten Pasaman Barat.

Sasaran Strategi 3

“ Meningkatnya Nilai Investasi PMDN/PMA “

A. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Pencapaian sasaran strategis “ Meningkatnya Investasi PMDN/PMA “ dengan indikator kinerja “Kenaikan Nilai Investasi Daerah “ sesuai dengan RPJMD tahun 2021 – 2026 serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi

Penyelenggaraan Pemerintahan dapat dilihat bahwa dari realisasi dan capaian indikator kinerja sasaran.

Setelah dievaluasi dalam perubahan Rencana Strategi 2021-2026, perlu ada koreksi mengenai formulasi dalam pencapaian indikator kinerja, seharusnya untuk mendapatkan nilai indikator kinerja “Kenaikan Nilai Investasi PMDN/PMA yaitu Nilai Realisasi Investasi Tahun n dikurang Nilai Realisasi Investasi Tahun $n-1$ dibagi Nilai Realisasi Tahun $n-1$ dikali 100%, yang datanya diambil dari realisasi investasi pada Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) setiap triwulan/semester. Realisasi capaiannya dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 3.12
Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja
Sasaran Strategi 3
“ Meningkatnya Investasi PMDN/PMA “

NO	INDIKATOR KINERJA	Tahun 2023		
		TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
1	2	3	4	5
1.	Kenaikan Nilai Investasi PMDN/PMA *)	1.96%	64,63%	>100%

Sumber data : LKPM DPMDTSP Kabupaten Pasaman Barat, 2024

Meningkatnya Nilai Investasi PMDN/PMA di Pasaman Barat diukur dari Nilai Investasi PMA dan PMDN dengan menggunakan 1 (satu) indikator kinerja sebagai tolok ukurnya yaitu Kenaikan Nilai Investasi PMDN/PMA.

Dari tabel diatas, dapat dilihat bahwa target indikator kinerja Sasaran “Kenaikan Nilai Investasi PMDN/PMA” tahun 2024 dari yang ditargetkan dalam RPJMD dan Renstra Perubahan OPD sebesar 1,96% belum dapat direalisasikan sesuai target sebesar 64,63% sehingga didapat tingkat capaian kinerja sebesar >100% termasuk kategori keberhasilan Memuaskan.

Formulasi terkait dengan indikator kinerja Sasaran Strategis pertama yakni Meningkatnya Nilai Investasi Investasi PMDN/PMA di Kabupaten

Pasaman Barat diperoleh dari memperbandingkan Kenaikan Realisasi Nilai Realisasi Investasi PMA dan PMDN tahun n dengan Target Kenaikan Nilai Realisasi Investasi PMA dan PMDN tahun n, seperti di berikut ini:

Capaian Kinerja Total Nilai Realisasi Investasi PMA dan PMDN

$$= \frac{\text{Kenaikan Nilai Realisasi Investasi PMDN/PMA tahun n}}{\text{Target Kenaikan Nilai Investasi tahun n}} \times 100\%$$

$$= \frac{64,63\%}{1,96\%} \times 100\%$$

$$= 3297,4\%$$

B. Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun 2021, Tahun 2022 dan tahun 2023 serta Target Kinerja 2025

Tabel 3.13

Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun 2021 , Tahun 2022 dan Tahun 2023 serta Target Kinerja 2025

NO	INDIKATOR KINERJA	REALISASI				CAPAIAN				TARGET
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2025
1.	Meningkatnya Nilai Investasi PMDN/PMA									
	*Kenaikan Nilai Investasi PMDN/PMA	268,63 Milyar	35,068 Milyar			537,3%	186,4%			
	**Kenaikan Nilai Investasi PMDN/PMA	-49,64%	168,40%	-16,13%	64,63%			-823,97%	100%	1,96%
	*Perhitungan			Nilai Investasi Tahun n						
	**Perhitungan			$\frac{\text{Nilai Realisasi Tahun n} - \text{Nilai Realisasi Tahun n-1}}{\text{Nilai Realisasi Tahun n-1}} \times 100 \%$						

Dari tabel di atas terlihat bahwa realisasi indikator kinerja Kenaikan Nilai Investasi PMA dan PMDN melebihi dari target yang ditetapkan dengan hasil dengan hasil capaian kinerja Sangat Baik sebesar

>100%, dimana Kenaikan Nilai Investasi PMA dan mengalami penurunan pada tahun 2024. Untuk tahun 2024, Kenaikan Nilai Investasi PMA dan PMDN secara total ditargetkan sebesar 1,96% dan terealisasi sebesar 64,63%.

Berdasarkan Rencana Strategi Perubahan tahun 2021-2026 pada tahun 2023 terjadi perubahan perhitungan target indikator Sasaran Strategis “Kenaikan Nilai Investasi PMDN/PMA”. Pada tahun 2021 dan Tahun 2022, perhitungan target indikator yaitu nilai realisasi tahun n yang datanya bersumber dari rencana awal investasi yang dilaporkan investor pada Nomor Induk Berusaha (NIB) dengan modal usaha >500juta, sedang tahun 2023 target indikator yaitu pertumbuhan nilai realisasi investasi yang datanya bersumber dari jumlah realisasi investasi yang dilaporkan investor melalui Laporan Kegiatan Penanaman Modal setiap triwulan/semester, dengan perhitungan :

$$\left(\frac{\text{jumlah realisasi investasi tahun } n - \text{jumlah realisasi investasi tahun } n-1}{\text{jumlah realisasi investasi tahun } n-1} \right) \times 100\%$$

Sehingga untuk capaian kinerja Tahun 2021, Tahun 2022 dan Tahun 2023 dengan Tahun 2024 tidak dapat dibandingkan sesuai dengan target dan realisasi.

C. Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Renstra Perubahan DPMPTSP

Tabel 3.14

Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Renstra Perubahan (2021-2026)DPMPTSP

NO	INDIKATOR KINERJA	Tahun 2024			Tingkat Kemajuan
		TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	
1	2	3	4	5	6
1.	Kenaikan Nilai Investasi PMDN/PMA	1,96%	64,63%	>100%	Tercapai

Sumber Data : Renja DPMPTSP 2024

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa realisasi indikator kinerja Kenaikan Nilai Investasi PMDN/PMA belum mencapai target yang ditetapkan yaitu 64,63% dengan target 1,96% dan persentase capaiannya - >100%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa program dan kegiatan pendukung sasaran strategi “Meningkatnya Nilai Investasi PMDN/PMA” belum berhasil dan mencapai target.

D. Analisis Penyebab Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Upaya yang Telah Dilakukan

Ada beberapa faktor pendukung dalam usaha pencapaian target realisasi nilai investasi di daerah, , yaitu :

1. Terlaksananya pengawasan / inspeksi langsung lapangan ke lokasi proyek untuk memastikan kondisi riil dan laporan yang diberikan;
2. Terlaksananya fasilitasi penyelesaian permasalahan investasi pada perusahaan;
3. Adanya data – data perusahaan dalam penentuan target dan pengawasan serta pembinaan;
4. Terlaksananya bintek bagi perusahaan yang Wajib LKPM dan tenaga pendamping yang berperan dalam pencapaian dan kelancaran laporan kegiatan berusaha penanaman modal perusahaan ;

5. Adanya kerjasama OPD teknis untuk memberikan kemudahan dalam perizinan;
6. Adanya percepatan dalam pengumpulan data yang dibutuhkan dari dalam menghitung Nilai Investasi di daerah.
7. Adanya Rencana Umum Penanaman Modal sebagai pedoman arah kebijakan investasi di Daerah

Faktor penghambat dalam pencapaian target realisasi investasi di daerah , yaitu :

1. Promosi investasi tidak didukung oleh data yang akurat dan kegiatan promosi tidak terlaksana karena keterbatasan anggaran.
2. Penyampaian Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) yang tidak tertib oleh perusahaan/investor yang dinyatakan wajib LKPM dan laporan tidak transparan mengenai investasi awal atau penambahan investasi .

Untuk meningkatkan Nilai Investasi di Kabupaten Pasaman Barat, upaya yang telah dilakukan antara lain:

1. Peningkatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan serta mengupayakan Tim Teknis yang ada di OPD Teknis agar berada di PTSP.
2. Memfasilitasi investor dalam penyelesaian masalah terkait dengan investasi.
3. Penginputan data penanaman modal dan perizinan menggunakan aplikasi yang terintegrasi.
4. Melakukan Bimbingan kepada Masyarakat dalam pengisian Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) dan membuka Layanan Pendampingan dan Konsultasi Pengisian Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM).
5. Mempercepatan ketersediaan Sarana dan Prasarana Pendukung dalam Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan.

6. Mendorong OPD teknis terkait untuk melakukan revisi RTRW dan RDTR yang terbuka untuk Investasi.
7. Melakukan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal terhadap perusahaan PMA dan PMDN (Pemantauan, Pengawasan dan Pembinaan)
8. Melakukan Sosialisasi Produk Hukum terkait Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan
9. Melakukan revisi Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Perizinan dan Non Perizinan yang menjadi kewenangan DPM PTSP Kabupaten Pasaman Barat
10. Melakukan Pemetaan Potensi dan Peluang Investasi
11. Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Aparatur Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan.

E. PERBANDINGAN REALISASI INVESTASI TAHUN 2024 PADA TINGKAT NASIONAL, PROPINSI DAN DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT

Realisasi Investasi Januari – Desember Tahun 2024



Realisasi investasi tingkat Nasional tahun 2024 mencapai Rp 1.714,2 triliun atau melampaui target Renstra Rp 1.239,3 triliun. Sebanyak 52,5% dari realisasi investasi tersebut merupakan penanaman modal asing atau PMA. Untuk tingkat

Propinsi Nilai Realisasi Investasi PMA dan PMDN tahun 2024 masih dalam proses pengolahan data. Sedangkan untuk daerah Kabupaten Pasaman Barat capaian realisasi investasi Tahun 2024 sebesar 1,337 Triliun, dimana terjadi kenaikan nilai investasi sebesar 64,63% dari tahun sebelumnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini

Tabel 3. 15
Perbandingan Realisasi Investasi Tingkat Nasional, Propinsi Dan Daerah
Kabupaten Pasaman Barat

NO	Uraian	Tahun 2023		
		Nasional	Propinsi	Daerah (Kab.Pasaman Barat)
1	2	3	4	5
1.	Realisasi Investasi	1.714,2 Triliun	15,76 Triliun	1,337 Triliun

Sumber data: Press Release Capaian Kinerja INVESTASI Triwulan IV, Januari-Desember 2024, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, 2024

F. ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN ATAUPUN KEGAGALAN PENCAPAIAN PERNYATAAN KINERJA

Untuk mencapai Sasaran Strategis Meningkatnya Nilai Investasi PMDN/PMA. DPMTSP Kabupaten Pasaman Barat didukung oleh Program dan Kegiatan dalam upaya pencapaian kinerja. Ada Beberapa Program dan Kegiatan yang menunjang Kinerja yaitu :

Tabel 3.16
Program dan Kegiatan Mendukung Nilai Investasi PMDN/PMA Tahun 2024

NO	URAIAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR
1.	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Jumlah kesepakatan investasi yang dikeluarkan
1.1	PENYELENGGARAAN PROMOSI PENANAMAN MODAL YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Jumlah dokumen pernyataan minat investasi dari calon investor terhadap potensi dan peluang investasi
2	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	% Kenaikan/penurunan realisasi investasi PMDN dan PMA

2.1	PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL YANG MENJALM KEWENANGAN DAERAH	Jumlah Laporan Kegiatan Penanaman Modal FMA/TMDN yang dilaporkan oleh PMDN/TMA
3	PROGRAM PENGELC'LAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI TENANAMAN AKODAL	Tersedianya sistem data penanaman modal yang terintegrasi Berbasis Teknologi Informasi
3.1	PENGELC'LAAN DATA DAN INFORMASI PERIZINAN DAN NON PERIZINAN PENANAMAN AKODAL YANG TERINTEGKASI PADA TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan data dan informasi perizinan dan non perizinan yang terintegrasi

Sumber Data : Renja DPMPTSP 2024

Dari table 3.8 dapat dilihat ada 3 program dan 3 kegiatan yang menunjang kinerja sasaran strategis Meningkatnya Nilai Investasi PMDN/PMA. Program dan kegiatan ini berupa Meningkatkan pelaksanaan promosi investasi, pengendalian pelaksanaan kegiatan penanaman modal dengan memfasilitasi penyelesaian permasalahan pelaku usaha, melaksanakan bimtek pelaku usaha dan pengawasan kegiatan penanaman modal serta mengolah dan menyajikan data terkait dengan perizinan di DPMPTSP Kabupaten Pasaman Barat.

ANALISA EFISIENSI

Efisiensi adalah suatu ukuran keberhasilan sebuah kegiatan yang dinilai berdasarkan besarnya biaya/sumber daya yang digunakan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Dalam hal ini, semakin sedikit sumber daya yang digunakan untuk mencapai hasil yang diharapkan maka prosesnya dapat dikatakan semakin efisien. Suatu kegiatan dapat dikatakan efisien jika ada perbaikan pada prosesnya, misalnya menjadi lebih cepat atau lebih murah.

Tabel 3.17
Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	KINERJA			ANGGARAN		
		Target	Realisasi	% Realisasi	Target (Rp.)	Realisasi	% Realisasi
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	1. B 2. 3 3. 60%	1. 100 2. 3 3. 100%	>100%	4.048.310.047	3.811.023.741	94,13
2.	Meningkatnya Pelayanan	85,60	88,16	>100%	115.534.800	96.069.150	83,15
3.	Meningkatnya Nilai Investasi PMDN/PMA	1,96%	-16,15%	>100 %	687.726.650	611.130.700	88,86%

Tabel di atas menjelaskan bahwa kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman Barat menunjukkan pencapaian kinerja >100%. Untuk sasaran strategis Meningkatnya Nilai Investasi di Daerah, capaian kinerja sebanyak >100% dengan realisasi anggaran sebesar 88,86 % dari total anggaran yang dialokasikan. Sedangkan untuk sasaran strategis Meningkatnya Pelayanan Perizinan yang Berkualitas sesuai standar pelayanan publik kinerjanya mencapai >100%. dengan penyerapan anggaran sebesar 83,15% dari besarnya total anggaran, serta untuk sasaran strategis Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja, telah mencapai kinerja sebanyak >100% dengan realisasi anggaran sebesar 94,15% dari total anggaran yang dialokasikan diluar belanja gaji dan tunjangan ASN.

Adanya sasaran yang berhasil dicapai dengan sumber daya yang efisien menunjukkan bahwa efisiensi anggaran telah mencapai tingkat yang tinggi ataupun sangat tinggi. Kondisi ini sejalan dengan prinsip pengelolaan anggaran publik dan lebih jauh, juga sejalan dengan prinsip pemerintahan yang baik, yang salah satunya adalah pengelolaan sumber daya anggaran yang efisien dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan. Tingkat efisiensi penggunaan sumber daya dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.18
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Tahun 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	% CAPAIAN KINERJA	% PENYERAPAN ANGGARAN	TINGKAT EFISIENSI
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	Nilai SAKIP Level Maturitas SPIP Persentase temuan BPK	>100% 100% >100%	94,15	5,87%
2.	Meningkatnya Pelayanan Perizinan yang Berkualitas	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	>100%	83,15	16,85%
3.	Meningkatnya Nilai Investasi PMDN/PMA	Kenaikan nilai Investasi PMDN/PMA	>100%	88,86%	11,14%

Sumber : Laporan Keuangan DPMDTSP Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2025

INOVASI

Pelayanan publik merupakan suatu tolok ukur kinerja pemerintah yang paling kasat mata. Masyarakat dapat menilai langsung kinerja pemerintah berdasarkan pelayanan yang diterimanya. Untuk itu kualitas pelayanan publik di semua kementerian/lembaga adalah suatu hal yang mendasar yang harus segera ditingkatkan. Dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 disebutkan bahwa pelayanan prima adalah pelayanan yang cepat, mudah, pasti, murah, dan akuntabel.

Untuk memacu peningkatan pelayanan publik, KemenPAN RB menerapkan kebijakan bahwa sejak tahun 2014 adalah tahun inovasi pelayanan publik. Seluruh instansi pemerintah, baik di pusat maupun daerah diharapkan dapat membuat suatu ide kreatif atau jawaban terhadap cara kerja/metode pelayanan publik. KemenPAN RB mengumpulkan dan menilai inovasi-inovasi yang telah dilakukan di sejumlah instansi di seluruh Indonesia. Semoga kualitas dan inovasi pelayanan publik BPS dapat selalu meningkat, sehingga bisa terus bersaing secara sehat dengan instansi lain.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman Barat yang merupakan ujung tombak dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat pada umumnya terkhusus untuk para investor dan pelaku usaha, terus melakukan inovasi – inovasi dalam pelayanannya sehingga pada tahun 2024 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman Barat sebagai juara 3 (tiga) tingkat Kabupaten Pasaman Barat dalam Inovasi OPD Tingkat Kabupaten Pasaman Barat tahun 2024 . Adapun inovasi – inovasi yang sudah dikembangkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman Barat tahun 2024, diantaranya :

Table 3.19

DAFTAR INOVASI YANG MASIH DIGUNAKAN DPMPTSP TAHUN 2024

No	Nama Inovasi	Tahapan Inovasi	Urusan Pemerintahan Utama	Waktu Uji Coba Inovasi Daerah	Waktu Penerapan Inovasi Daerah	Kematangan
1	Survey Kepuasan Masyarakat Buka Link (SUKA MABUL)	Penerapan	penanaman modal	08/02/2021	01/03/2021	80.00
2	Sistem Aplikasi Data Perizinan Terintegrasi (SAPA PINTER)	Penerapan	penanaman modal	01/01/2021	01/02/2021	70.00
3	Layanan Pengaduan Melalui Whatapp (LADU MELAWAS)	Penerapan	penanaman modal	04/11/2021	29/03/2021	76.00
4	Sistem Layanan dan Asistensi Jarak Jauh (SILASUAH)	Penerapan	penanaman modal	06/07/2020	07/07/2020	71.00

Sumber : Bidang Litbang, Rapelitbangda, 2023

PENGHARGAAN DAN PRESTASI KINERJA

Pada tahun 2024 DPMPTSP meraih Piagam Penghargaan dari Menteri Investasi dan Hilirisasi / kelapa Badan Koordinasi Penanaman Modal Atas Penilaian Kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Kinerja Percepatan Pelaksanaan Berusaha Pemerintah Daerah Tahun 2024 dengan kategori Sangat Baik



Sumber : DPMPTSP Kabupaten Pasaman Barat, 2024

3.4 REALIASASI ANGGARAN

1. Sasaran I : Meningkatnya Akuntabilitas Daerah

Anggaran yang disediakan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan tahun 2024 untuk pelaksanaan program/kegiatan yang mendukung pencapaian indikator kinerja Sasaran I “Meningkatnya Akuntabilitas Daerah” yaitu Nilai SAKIP adalah sebesar Rp. 4.013.179.647,- pagu anggaran termasuk untuk Gaji dan Tunjangan ASN dan terealisasi sebesar Rp. 3.803.959.140,- atau sebesar 94,78%.

Anggaran sebesar Rp. 4.013.179.647,- tersebut tersebar pada 1(satu) program, 8 (delapan) kegiatan dan 20 (dua puluh) sub kegiatan. Program, kegiatan dan sub kegiatan tersebut diharapkan efektif untuk mencapai indikator kinerja Nilai SAKIP, dan Realisasi anggaran dalam rangka pencapaian tujuan Nilai SAKIP, dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.20

Pagu dan Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan Mendukung Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi Tahun 2024

NO	URAIAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR	REALISASI s.d. DESEMBER 2024					
			FISIK		KEUANGAN			
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	ANGGARAN PERUBAHAN	REALISASI	CAPAIAN KEUANGA
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	100%	100%	4.013.179.647	3.803.929.140	94,78%
1.1	PENYUSUNAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	Persentase Capaian Target Kinerja sesuai dengan perencanaan dan penganggaran	100%	100%	100%	67.817.300	39.136.800	87,20%
1.1.1	PENYUSUNAN DAN UMUM PENENCANAAN PERANGKAT DAERAH	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 dokumen	6 dokumen	100%	38.624.000	37.670.600	97,53%
1.1.2	EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 LAPORAN	2 LAPORAN	100%	29.193.300	21.466.200	97,73%
1.2.	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Gaji, Tunjangan, dan Honorarium Pegawai	100%	100%	100%	3.254.182.745	3.247.250.959	99,78%
1.2.1	PENYULIHAN Gaji DAN TUNJANGAN ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	50 PNS	27 PNS	90%	3.153.612.745	3.149.620.959	99,81%
1.2.2	PENYULIHAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyelidikan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	100%	22.530.000	22.100.000	98%

1.2.4	PELAKSANAAN PENATASARJAHAN DAN PENGUJIAN/VERIFIKASI KEANGKATAN SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	100%	76.020.000	75.530.000	99,46%
1.3	ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH FATA PERANGKAT DAERAH	Jumlah BMD yang dikelola DPMDTSP	352 unit	100%	11.050.000	11.050.000	100%
1.3.1	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	100%	11.050.000	11.050.000	100%
1.4	ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	Persentase peningkatan Kapasitas Pegawai DPMDTSP	90%	100%	13.542.450	10.596.800	76,77%
1.4.1	PENYEBERIAN DAN PELATIHAN PEGAWAI HEBERASABEAN TUGAS DAN FUNGSI	Jumlah ASN yang mengikuti Diklat Priobatan dan Paktat Kepemimpinan (PKM)	2 orang	50%	3.703.000	3.610.000	97,49%
1.4.2	BIMBINGAN TENNIS IMPLEMENTASI PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknik Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	5 orang	100%	9.839.450	6.786.800	68,98%
1.5	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi dan Operasional Kantor	100%	100%	251.076.120	134.690.592	61,61%
1.5.1	PENYEDIAAN KAMPUS/INEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN RANGKAIAN KANTOR	Jumlah Paket Kompleksi Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6 Paket	100%	1.188.000	3.750.000	31,69%
1.5.2	PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	100%	37.043.700	15.644.200	42,29%
1.5.3	PENYEDIAAN PERALATAN KUMAH TANGGA	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	100%	10.754.920	5.016.452	46,64%
1.5.4	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGANTUNAN	Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengantunan yang disediakan	5 Paket	100%	4.650.000	2.910.000	62,58%
1.5.5	PENYELANGGARAAN RAPAT KAWIBINAS DAN KONSULTASI SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Kawibinasi dan Konsultasi SKPD	25 Laporan	100%	167.542.500	125.380.960	86,86%

1.7	PENGALAMAN BAKANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase pengadaan sarana dan prasarana penunjang pemerintahan	100%	100%	35.130.400	35.120.000	94,28%
1.7.2	PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	Jumlah Unit Perlatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	15 unit	4 unit	35.130.400	35.120.000	94,28%
1.8	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase pemenuhan penyediaan jasa layanan penunjang urusan kantor	100%	100%	153.795.252	141.802.283	92,07%
1.8.1	PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	Jumlah Laporan Penyediaan dan Surat Menyurat	12 laporan	12 laporan	21.220.000	15.045.000	70,90%
1.8.2	PENYEDIAAN JASA KEMAHUKASIHAN, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	Jumlah Laporan Penyediaan jasa Kemitraan, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	12 laporan	49.765.720	43.767.771	87,91%
1.8.2	PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	Jumlah Non PNS yang melaksanakan tugas KB	12 Laporan	12 laporan	82.780.512	82.780.512	100%
1.9	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase pemeliharaan BMD di DPMTSP	100%	100%	173.713.800	146.711.626	83,49%
1.9.1	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, JASA PEMELIHARAAN PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL/LAPANGAN	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional dan Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perawatannya	21 Unit	21 Unit	40.250.000	34.312.800	83,75%
1.9.2	PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	Jumlah Perlatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	30 unit	30 unit	119.349.800	110.803.726	92,42%
1.9.3	PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEJUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 unit	2 unit	16.116.000	1.893.100	11,70%
TOTAL					4.018.179.647	3.803.959.140	94,78%

Sumber : Laporan Keuangan DPMTSP Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2025

2. Sasaran II : Meningkatnya Pelayanan Perizinan yang Berkualitas

Anggaran yang disediakan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan tahun 2024 untuk pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung pencapaian Sasaran Strategis Meningkatnya Pelayanan Perizinan Yang Berkualitas adalah sebesar Rp. 115.534.800,- terealisasi sebesar Rp. 96.069.150,- atau sebesar 83,15%. dan Artinya anggaran yang digunakan sudah sebanding dengan capaian kinerja, karena pencapaian kinerja Meningkatnya Kualitas Pelayanan Terpadu Satu Pintu lebih tinggi dari realisasi anggaran yakni sebesar 102%.

Pagu Anggaran dan Realisasi anggaran yang digunakan dalam pencapaian kinerja Meningkatnya Kualitas Pelayanan Terpadu Satu Pintu, seperti tampak dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.21
Pagu dan Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan
Mendukung Meningkatkan Kualitas Pelayanan Terpadu Satu Pintu

NO	URAIAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR	REALISASI 31 DESEMBER 2024					
			FISIK		KEUANGAN			
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	ANGGARAN PERUBAHAN	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
4	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN AKTUAL	Persentase tingkat kesesuaian masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan perizinan	83,60	88,16	102%	113.334,800	96.069,150	83,13%
4.1	PELAYANAN PERIZINAN DAN NAIK PERIZINAN SELARA TERPADU SATU PINTU TERDIDAT PENANAMAN AKTUAL YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Perizinan yang diterbitkan tepat waktu Persentase Perizinan yang diterbitkan tepat waktu	86%	80%	93%	113.334,800	96.069,150	83,13%
4.1.1	PENYELIDIKAN PELAYANAN TERPADU PERIZINAN DAN NAIK PERIZINAN BERBASIS SISTEM PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SELARA ELEKTRONIK	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendaftar Pelayanannya Terpenuhi Perizinan dan NAIK Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik diterbitkan	2600 Pelaku Usaha	7600 Pelaku Usaha	292%	93.897,600	10.894,100	85,82%

4.1.2	Penyediaan dan pengelolaan layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah pelaku usaha yang memperoleh layanan konsultasi perizinan berusaha melalui sistem perizinan berbasis berbasis risiko terintegrasi secara elektronik	15 pelaku usaha	120%	19.637.200	10.694.100	95,48%
-------	--	--	-----------------	------	------------	------------	--------

Sumber : Laporan Keuangan DPMDTSP Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2025

3. Sasaran III : Meningkatnya Nilai Investasi PMDN/PMA

Anggaran yang disediakan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan tahun 2024 untuk pelaksanaan program, kegiatan sub kegiatan yang mendukung Sasaran Strategis Meningkatnya Nilai Investasi PMDN/PMA adalah sebesar Rp. 722.857.050,- dan terealisasi sebesar Rp. 611.130.700,- atau sebesar 84.54%. Artinya efisiensi dalam penggunaan anggaran sudah tercapai karena Realisasi Nilai Investasi Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) di Kabupaten Pasaman Barat terjadi peningkatan di tahun 2024.

Pagu Anggaran dan Realisasi anggaran yang digunakan dalam pencapaian Realisasi Nilai Investasi PMA dan PMDN, seperti tampak dalam tabel berikut :

Tabel 3.22
Pagu dan Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan
Mendukung Meningkatkan Nilai Investasi di Daerah
Tahun 2024

NO	URAIAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR	REALISASI s.d DESEMBER 2023					CAPAIAN KINERJA
			FISIK		KEUANGAN			
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN JAN	ANGGARAN PERUBAHAN	REALISASI	
2.	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Jumlah kesepukuatan investasi yang dikeuarkan	0 MoU	0 MoU	100%	45.540.400	34.996.800	76,85%
2.1	PENYELENGGARAAN PROMOSI PENANAMAN MODAL YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Jumlah dokumen pernyataan minat investasi dari calon investor terhadap potensi dan peluang investasi	1 dokumen	1 dokumen	100%	45.540.400	34.996.800	76,85%
2.1.1	PELAKSANAAN KEGIATAN PROMOSI PENANAMAN MODAL DAERAH KABUPATEN/KOTA	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	1dokumen	1 dokumen	100%	45.540.400	34.996.800	76,85%
5	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	% Kenaikan/penurunan realisasi investasi PMDN dan PMA	2,8%	64,63%	2308%	646.265.000	547.621.600	84,73%
5.1	PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH	Jumlah Laporan Kegiatan Penanaman Modal PMA/PMDN yang dilaporkan oleh PMDN/PMA	35 laporan	482 laporan	1377%	646.265.000	547.621.600	84,73%
5.1.1	PENYELESAIAN PERMASALAHAN DAN HAMBATAN YANG DIHADAPI PELAKU USAHA DALAM MEREALISASIKAN KEGIATAN USAHANYA	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	5 Kegiatan Usaha	5 kegiatan usaha	100%	92.132.000	48.892.900	53,07%

5.1.2	BIMBINGAN TERKINI KEPADA PELAKU USAHA	Jumlah pelaku usaha yang mengikuti bimbingan teknis/sosialisasi implementasi perizinan berusaha berbasis risiko dan pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko	500 pelaku usaha	459 Kegiatan Usaha	92%	337.820.000	313.432.000	92,78%
5.1.3	PENGAWASAN PENANAMAN MODAL	Jumlah pelaku usaha yang mengikuti bimbingan teknis/sosialisasi implementasi perizinan berusaha berbasis risiko dan pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko	34 Kegiatan Usaha	48 Kegiatan Usaha	141%	216.313.000	185.297.100	85,66%
6	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Tersedianya sistem data penanaman modal yang terintegrasi Berbasis Teknologi Informasi	100%	100%	100%	31.051.650	28.512.300	91,82%
6.1	PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI PERIZINAN DAN NON PERIZINAN PENANAMAN MODAL YANG TERINTEGRASI PADA TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan data dan informasi perizinan dan non perizinan yang terintegrasi	60%	60%	100%	31.051.650	28.512.300	91,82%
6.1.1	PENGOLAHAN, PENYAJIAN DAN PEMANFAATAN DATA DAN INFORMASI PERIZINAN DAN NON PERIZINAN BERBASIS SISTEM PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	1 Dokumen	1 dokumen	100%	31.051.650	28.512.300	91,82%

Sumber : Laporan Keuangan DPMTSP Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2023

BAB IV PENUTUP

Memenuhi maksud Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014, Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat menyelenggarakan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Output dari implementasi SAKIP adalah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat atas pencapaian Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pemerintah.

Laporan Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman Barat tahun 2024 memberikan informasi kinerja yang terukur kepada masyarakat terhadap kinerja yang diperjanjikan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman Barat tahun 2024. Berdasarkan uraian yang dijelaskan dalam bab-bab sebelumnya dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Laporan Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman Barat tahun 2024 memberikan informasi kepada stakeholders atas keberhasilan/kegagalan pencapaian 3 (tiga) tujuan daerah yang diukur oleh 3 (tiga) indikator kinerja daerah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2021 – 2026.
2. Laporan Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kabupaten Pasaman Barat tahun 2024, juga memberikan informasi kepada stakeholders atas keberhasilan/kegagalan pencapaian 3 (tiga) sasaran strategis OPD yang diukur oleh 3 (satu) indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2021 – 2026 perubahan Perjanjian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Kabupaten Pasaman Barat tahun 2024.

3. Untuk pencapaian 3 (tiga) sasaran strategis dengan dua indikator kinerja yang menjadi Indikator Kinerja Utama OPD, telah dialokasikan anggaran sebesar Rp. 4.485.103.591,- dengan realisasi sebesar Rp. 4.518.223.591,- (94,12%).
4. Sasaran Strategis Pertama " Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja " .Dengan 3 (Tiga) Indikator Kinerja yaitu Nilai SAKIP, Level Maturitas SPIP dan Persentase penurunan jumlah temuan BPK Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman Barat tahun 2024. Realisasi kinerja ketiga indikator diatas telah mencapai target yang ditetapkan. Dari capaian kinerja tersebut tidak ada permasalahan yang signifikan, karena sudah mencapai 100%, hal ini didukung oleh Adanya komitmen tinggi mulai dari unsur pimpinan sampai ke level staf dalam pelaksanaan program dan kegiatan.
5. Sasaran Strategis Kedua yaitu "Meningkatnya Pelayanan Perizinan yang Berkualitas " indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) tahun 2024 realisasinya sudah mencapai target yang ditetapkan 88,16 dari target 85,60 dengan hasil capaian kinerja masih dalam kategori "Memuaskan" sebesar >100%. Ada beberapa unsur penilaian yang menjadi prioritas utama untuk diperhatikan dan ditingkatkan oleh DPMPTSP dan menjadi keluhan bagi masyarakat, yaitu: Jangka waktu yang lama untuk menyelesaikan proses izin tertentu

6. Sasaran Strategis Ketiga yang menjadi Indikator Kinerja Daerah Meningkatnya Nilai Investasi PMDN / PMA" dengan indikator kinerja "Kenaikan Nilai Nilai Investasi PMDN/PMA" tahun 2024 dari yang ditargetkan dalam RPJMD dan Renstra OPD sebesar 1,96% direalisasikan sudah mencapai target yang ditetapkan dengan capaian kinerja sebesar 64,63% dengan tingkat capaian kinerja sebesar >100% termasuk kategori keberhasilan Memuaskan. Faktor penghambat dalam pencapaian target realisasi investasi di daerah, yaitu :
1. Promosi investasi tidak didukung oleh data yang akurat dan kegiatan promosi tidak terlaksana karena keterbatasan anggaran.
 2. Penyampaian Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) yang tidak tertib oleh perusahaan/investor yang dinyatakan wajib LKPM dan laporan tidak transparan mengenai investasi awal atau penambahan investasi

LANGKAH UNTUK MENINGKATKAN KINERJA DI MASA YANG AKAN DATANG.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dirancang untuk pengukuran dan peningkatan kinerja instansi pemerintah yang akan berdampak pada efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran. Dengan mengimplementasikan SAKIP diharapkan akan mendorong pelaksanaan *Money Follows Program*. Artinya alokasi anggaran harus digunakan untuk program pembangunan yang bermanfaat bagi masyarakat.

Berdasarkan hal tersebut, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman Barat akan terus melakukan perbaikan untuk meningkatkan implementasi SAKIP sehingga kinerja yang ditargetkan dapat dicapai dan bermanfaat bagi masyarakat sebagai stakeholders. Upaya yang akan

dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman Barat untuk meningkatkan kinerja di masa yang akan datang, antara lain:

1. Penyederhanaan jenis perizinan dan prosedur penyelenggaraan perizinan perubahan dari berbasis perizinan menjadi perizinan berusaha berbasis risiko pada kegiatan usaha yang sudah dikelompokkan dalam KBLI;
2. Kewajiban pemberian layanan perizinan berusaha oleh DPMPTSP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan dan NSPK;
3. Melakukan penyesuaian pada nomenklatur DPMPTSP sesuai dengan ketentuan pasal 38 PP Nomor 6 Tahun 2021 dengan tidak merumpunkan pada urusan pemerintahan lainnya;
4. Kewajiban bagi DPMPTSP untuk menggunakan/menerapkan Online Single Submission (OSS);
5. Melakukan penyesuaian peraturan kepala daerah terkait tentang pendelegasian kewenangan perizinan berbasis OSS dan RBA sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan;
6. Penyusunan RTRW dan RDTR digital dalam rangka mendukung penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah;
7. Mengalokasikan anggaran dalam rangka penyelenggaraan perizinan berusaha dan non perizinan serta Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal;
8. Monitoring dan evaluasi serta Pengawasan secara ketat dan berkesinambungan terhadap penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko baik pada saat maupun pasca perizinan berusaha berisiko;
9. Mengembangkan sistem pendukung pelaksanaan sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik sesuai dengan standar yang ditetapkan pemerintah pusat;

10. Meningkatkan komitmen dan pemahaman pimpinan dan seluruh aparatur sipil negara (ASN) untuk menerapkan SAKIP.
11. Memanfaatkan Cascading Kinerja yang telah dirumuskan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas penganggaran.

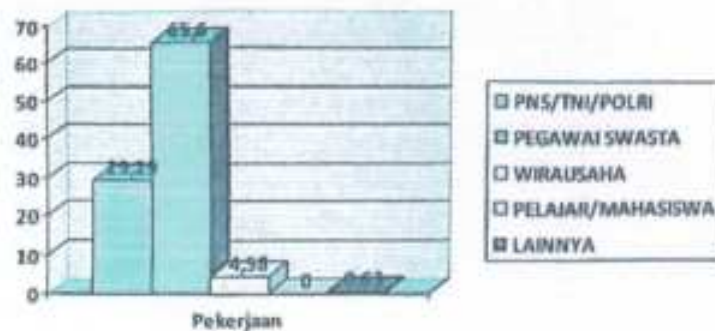
RENCANA AKSI 2024

Suati Kegiatan : Penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Ushanya	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan	2 kegiatan usaha	3 kegiatan usaha	3 kegiatan usaha	2 kegiatan usaha	Bidang Pengendalian dan Pengawasan	92.132.000,00
Suati Kegiatan :Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	0	100 pelaku usaha	100 pelaku usaha	72 pelaku usaha	Bidang Pengendalian dan Pengawasan	337.820.000,00
Suati Kegiatan :Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha dilakukan Inspeksi Lapangan serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Berdasar	5 kegiatan usaha	5 kegiatan usaha	5 kegiatan usaha	2 kegiatan usaha	Bidang Pengendalian dan Pengawasan	216.313.000,00
Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal						Bidang Pelayanan Informasi dan Pengaduan	33.225.600,00
Kegiatan : Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Kabupaten/Kota						Bidang Pelayanan Informasi dan Pengaduan	33.225.600,00
Suati Kegiatan : Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik					1 dokumen	Bidang Pelayanan Informasi dan Pengaduan	33.225.600,00

Sleman, 14 April 2025



NILAI IKM PERIZINAN 2024



Gambar 3. Karakteristik Responden Berdasarkan Pekerjaan

2.2 Deskripsi Jawaban Responden

Berikut ini merupakan nilai rata-rata unsur pelayanan hasil pengisian kuesioner yang dilakukan oleh responden.

Tabel 6. Nilai Rata-Rata Unsur Pelayanan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024

Unsur Pelayanan	Unsur Pelayanan	Nilai Rata-rata
U1	Persyaratan pelayanan	3,429
U2	Prosedur pelayanan	3,449
U3	Waktu pelayanan	3,294
U4	Biaya/Tarif	3,961
U5	Produk spesifikasi jenis	3,404
U6	Kompetensi pelayanan	3,410
U7	Perilaku pelayanan	3,468
U8	Sarana dan Prasarana	3,449
U9	Penanganan Pengaduan	3,872
Jumlah Nilai Unsur		4951
NRR Per Unsur		31,737
NRR tertimbang*		3,526
IKM**		88,159

Sumber : Data Primer, 2024

Keterangan :

- U1 s.d. U9 = Unsur-Unsur pelayanan
- NRR = Nilai Rata-rata
- IKM = Indeks Kepuasan Masyarakat
- *) = Jumlah NRR IKM tertimbang
- **) = Jumlah NRR Tertimbang x 25
- NRR Per Unsur = Jumlah nilai per unsur dibagi jumlah kuesioner yang terisi
- NRR Tertimbang = NRR per unsur x 0,111 per unsur

PERJANJIAN KINERJA 2024



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 KEPALA DINAS

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **FADLUS SABI, S.Sos, MM**

Jabatan : Kepala DPMPTSP

selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**

Nama : **H. HAMSUARDI**

Jabatan : Bupati Kab. Pasaman Barat

selaku atasan pihak kesatu, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK KESATU berjanji akan mewujudkan target kinerja yang sehanisnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.



Simpang Empat, 03 Januari 2024
PIHAK KESATU,
KEPALA DINAS,


FADLUS SABI, S.Sos.MM
NIP.19700814 199103 1 005

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

KEPALA DINAS,

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	Nilai SAKIP	8
		Level Maturitas SPIP	3
		Persentase penurunan jumlah temuan BPK	60%
2	Meningkatnya Pelayanan Perizinan Yang Berkualitas	Nilai IKM Perizinan	85,00
3	Meningkatnya Nilai Investasi PMDN / PMA	Kenaikan Nilai Investasi PMDN / PMA	1,00 %

No	Program/Kegiatan	Anggaran
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 4.200.032.247,-
2.	Program Program Promosi Penanaman Modal	Rp. 60.994.050,-
3.	Program Pelayanan Penanaman Modal	Rp. 120.185.000,-
4.	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Rp. 646.265.000,-
5.	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Rp. 33.225.600,-



Simpang Empat, 03 Januari 2024

PIHAK KESATU,

KEPALA DINAS,

FADLUS SABI, S.Sos.MM
NIP.19700814 199103 1 005



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 SEKRETARIS

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **AHMAD HANIF , S.IP**

Jabatan : Sekretaris Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kab. Pasaman Barat

selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**

Nama : **FADLUS SABI, S.Sos, MM**

Jabatan : Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kab. Pasaman Barat

selaku atasan pihak kesatu, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK KESATU berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Simpang Empat, 03 Januari 2024

PIHAK KEDUA,
Kepala DPMPTSP,

PIHAK KESATU,
SEKRETARIS,



FADLUS SABI, S.Sos, MM
NIP.19700814 199703 1 005



AHMAD HANIF, S.IP
NIP.19721104 200501 1 007

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

SEKRETARIS,

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Akuntabilitas kinerja	Persentase capaian target kinerja sesuai dengan perencanaan dan penganggaran	100%
		Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi, operasional, sarana dan prasarana kantor	100%
		Persentase kelengkapan Laporan Keuangan	100%

No	Kegiatan	Anggaran
1.	Perencanaan, penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp. 83.910.300,-
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp. 3.587.728.965,-
3.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Rp. 11.050.000,-
4.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp. 15.674.700,-
5.	Administrasi umum Perangkat Daerah	Rp. 159.790.670,-
6.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp. 35.130.400,-
7.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp. 152.023.512,-
8.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan pemerintah daerah	Rp. 154.723.700,-

PIHAK KEDUA,
KEPALA DPMPPTSP,



FADLUS SABI, S.Sos.MM
NIP.19700814 199103 1 005

Simpang Empat, 03 Januari 2024

PIHAK KESATU,
SEKRETARIS,



AHMAD HANIF, S.IP
NIP.19721104 200501 1 007



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 KEPALA BIDANG PENANAMAN MODAL

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **MEDIA TUWENTI, SE, MM**

Jabatan : Kepala Bidang Penanaman Modal

selanjutnya disebut **pihak KESATU**

Nama : **FADLUS SABI, S.Sos, MM**

Jabatan : Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kab. Pasaman Barat

selaku atasan pihak Kesatu, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK KESATU berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA,
Kepala DPMPTSP,



FADLUS SABI, S.Sos, MM
NIP.19700814 199103 1 005

Simpang Empat, 03 Januari 2024
PIHAK KESATU,
Kepala Bidang Penanaman Modal,



MEDIA TUWENTI, SE, MM
NIP. 19800527 200901 2 003

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BIDANG PENANAMAN MODAL

Sasaran	Indikator	Target
1. Meningkatnya realisasi investasi PMA/PMDN	Jumlah dokumen pernyataan minat investasi dari calon investor terhadap potensi dan peluang investasi	1 dokumen
	Capaian nilai investasi PMA/PMDN	53 Milyar

No	Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran
1	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 60.994.050.-

PIHAK KEDUA,
Kepala DPMPTSP,


FADLUS, SABI, S.Sos. MM
NIP. 19700814 199103 1 005

Simpang Empat, 03 Januari 2024
PIHAK KESATU,
Kepala Bidang Penanaman Modal,


MEDIA TUWENTI, SE, MM
NIP. 19800527 200901 2 003



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 KEPALA BIDANG PELAYANAN PERIZINAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **SEPRI WENTI, SE**

Jabatan : Kepala Bidang Pelayanan Perizinan

selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**

Nama : **FADLUS SABI, S.Sos, MM**

Jabatan : Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kab. Pasaman Barat

selaku atasan pihak kesatu, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK KESATU berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA,
Kepala DPMPTSP,

FADLUS SABI, S.Sos, MM
NIP.19700814 199103 1 005

Simpang Empat, 03 Januari 2024
PIHAK KESATU,
Kepala Bidang Pelayanan Perizinan

SEPRI WENTI, SE
NIP. 19730929 200604 2 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BIDANG PELAYANAN PERIZINAN

No	Sasaran	Indikator	Target
1	Meningkatnya Pelayanan Perizinan yang berkualitas	Jumlah Pelaku Usaha Yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	2600 Pelaku Usaha
		Persentase jumlah izin yang diterbitkan tepat waktu	86 %

No	Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran
1	Pelayanan perizinan dan non perizinan secara terpadu satu pintu di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah Kab/Kota	Rp. 97.298.100.-

PIHAK KEDUA,
Kepala DPMPTSP,



FADLUS SABI, S.Sos. MM
NIP. 19700814 199103 1 005

Simpang Empat, 03 Januari 2024
PIHAK KESATU,
Kepala Bidang Pelayanan Perizinan



SEPRI WENTI, SE
NIP. 19730929 200604 2 001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 KEPALA BIDANG PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **WIDYA RIZA LUBIS, S.STP, M.AP**

Jabatan : Kepala Bidang Pengawasan Dan Pengendalian

selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**

Nama : **FADLUS SABI, S.Sos, MM**

Jabatan : Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kab. Pasaman Barat

selaku atasan pihak Kesatu, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK KESATU berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA,
Kepala DPMPTSP,

FADLUS SABI, S.Sos, MM
NIP. 19706214 199103 1 005

Simpang Empat, 03 Januari 2024
PIHAK KESATU,
Kepala Bidang Pengawasan dan
Pengendalian

WIDYA RIZA LUBIS, S.STP, M.AP
NIP. 19920511 201507 2 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BIDANG PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Sasaran	Indikator Kinerja	Target
Meningkatnya realisasi investasi PMA/PMDN	Persentase Kenaikan Nilai Investasi PMA/PMDN	2,8 %
	Jumlah Laporan Kegiatan Penanaman Modal PMA/PMDN yang dilaporkan oleh PMA/PMDN	35 Laporan

No	Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran
1	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 646.265.000.-

PIHAK KEDUA,
Kepala DPMPTSP,


FADLUS SABI, S.Sos, MM
NIP.19700814 199103 1 005

Simpang Empat, 03 Januari 2024
PIHAK KESATU,
Kepala Bidang Pengawasan dan
Pengendalian


WIDYA RIZA LUBIS, S.STP, M.AP
NIP.19920511 201507 2 001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA BIDANG PELAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **ADE HANDAYANI, S.Kom**

Jabatan : Kepala Bidang Pelayanan Informasi Dan Pengaduan

selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**

Nama : **FADLUS SABI, S.Sos, MM**

Jabatan : Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab,
Pasaman Barat

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

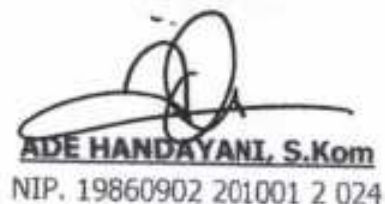
PIHAK KESATU berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA,
Kepala DPMPPTSP,


FADLUS SABI, S.Sos, MM
NIP.19700814 199103 1 005

Simpang Empat, 03 Januari 2024
PIHAK KESATU,
Kepala Bidang Pelayanan Informasi Dan
Pengaduan


ADE HANDAYANI, S.Kom
NIP. 19860902 201001 2 024

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BIDANG PELAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN

Sasaran		Indikator	Target
1. Meningkatkan realisasi investasi PMA/PMDN		Tersedianya Sistem Data Penanaman Modal	1 Sistem/Aplikasi
2. Meningkatnya Pelayanan Perizinan yang Berkualitas		Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan perizinan	85,60%
No	Kegiatan/Sub Kegiatan		Anggaran
1	Pengelolaan data dan informasi perizinan dan non perizinan yang terintegrasi pada tingkat daerah Kabupaten/Kota		Rp. 33.225.600,-
	Pelayanan perizinan dan non perizinan secara terpadu satu pintu di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah Kab/Kota		
2	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko		Rp. 22.886.900,-

PIHAK KEDUA
Kepala DPMPSTP


FADLUS SABI, S.Sos. MM
NIP.19700814 199103 1 005

Simpang Empat, 03 Januari 2024
PIHAK KESATU
Kabid Pelayanan Informasi Dan
Pengaduan


ADE HANDAYANI, S.Kom
NIP. 19860902 201001 2 024

REVISI PERJANJIAN KINERJA 2024



REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA DINAS

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **FADLUS SABI, S.Sos, MM**

Jabatan : Kepala DPMPTSP

selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**

Nama : **H. HAMSUARDI**

Jabatan : Bupati Kab. Pasaman Barat

selaku atasan pihak kesatu, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK KESATU berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Simpang Empat, 13 Desember 2024

PIHAK KESATU,
KEPALA DINAS,



FADLUS SABI, S.Sos.MM
NIP.19700814 199103 1 005

REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

KEPALA DINAS,

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	Nilai SAKIP	B
		Level Maturitas SPIP	3
		Persentase penurunan jumlah temuan BPK	60%
2	Meningkatnya Pelayanan Perizinan Yang Berkualitas	Nilai IKM Perizinan	85,60
3	Meningkatnya Nilai investasi PMDN / PMA	Kenaikan Nilai Investasi PMDN /PMA	1,96 %

No	Program/Kegiatan	Anggaran
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 4.048.310.047,-
2.	Program Program Promosi Penanaman Modal	Rp. 45.540.400,-
3.	Program Pelayanan Penanaman Modal	Rp. 115.534.800,-
4.	Program Pengendafian Pelaksanaan Penanaman Modal	Rp. 646.265.000,-
5.	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Rp. 31.051.650,-



Simpang Empat, 13 Desember 2024
PIHAK KESATU,
KEPALA DINAS,



FADNIS SABL, S.Sos.MM
NIP.19700814 199103 1 005



REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
SEKRETARIS

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **AHMAD HANIF, S.IP**

Jabatan : Sekretaris Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kab. Pasaman Barat

selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**

Nama : **FADLUS SABI, S.Sos, MM**

Jabatan : Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kab. Pasaman Barat

selaku atasan pihak kesatu, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK KESATU berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Kami.

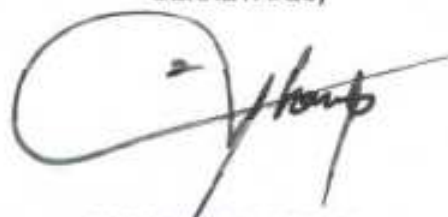
PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA,
Kepala DPMPTSP, .


FADLUS SABI, S.Sos, MM
NIP.19700814 199703 1 005

Simpang Empat, 13 Desember 2024

PIHAK KESATU,
SEKRETARIS,


AHMAD HANIF, S.IP
NIP.19721104 200501 1 007

REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

SEKRETARIS,

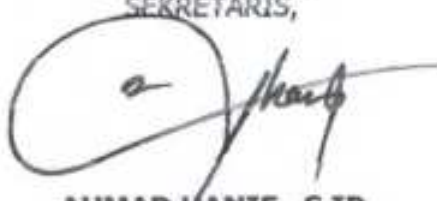
No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Akuntabilitas kinerja	Persentase capaian target kinerja sesuai dengan perencanaan dan penganggaran	100%
		Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi, operasional, sarana dan prasarana kantor	100%
		Persentase kelengkapan Laporan Keuangan	100%

No	Kegiatan	Anggaran
1.	Perencanaan, penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp. 67.817.300,-
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp. 3.340.182.745,-
3.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Rp. 11.050.000,-
4.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp. 13.542.450,-
5.	Administrasi umum Perangkat Daerah	Rp. 251.076.120,-
6.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp. 35.130.400,-
7.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp. 153.795.232,-
8.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan pemerintah daerah	Rp. 175.715.800,-

Simpang Empat, 13 Desember 2024

PIHAK KEDUA,
KEKALADP/DTSP,

FADLUS SABI, S.Pd, MM
NIP.19790814199103 1 005

PIHAK KESATU,
SEKRETARIS,

AHMAD MANIF, S.IP
NIP.19721104 200501 1 007



**REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA BIDANG PELAYANAN PERIZINAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **SEPRI WENTI, SE**

Jabatan : Kepala Bidang Pelayanan Perizinan

selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**

Nama : **FADLUS SABI, S.Sos, MM**

Jabatan : Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kab. Pasaman Barat

selaku atasan pihak kesatu, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK KESATU berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA,
Kepala Dinas TSP,

FADLUS SABI, S.Sos, MM
NIP. 19700914 199103 1 005

Simpang Empat, 13 Desember 2024
PIHAK KESATU,
Kepala Bidang Pelayanan Perizinan


SEPRI WENTI, SE
NIP. 19730929 200604 2 001

REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BIDANG PELAYANAN PERIZINAN

No	Sasaran	Indikator	Target
1	Meningkatnya Pelayanan Perizinan yang berkualitas	Jumlah Pelaku Usaha Yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	2600 Pelaku Usaha
		Persentase jumlah izin yang diterbitkan tepat waktu	86 %

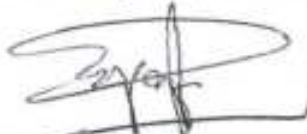
No	Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran
1	Pelayanan perizinan dan non perizinan secara terpadu satu pintu di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah Kab/Kota	Rp. 95.897.600.-

PIHAK KEDUA,
Kepala DPMTSP



FADLUS SABI, S.Sos, MM
NIP. 19700914 199109 1 005

Simpang Empat, 13 Desember 2024
PIHAK KESATU,
Kepala Bidang Pelayanan Perizinan



SEPRI WENTL. SE
NIP. 19730929 200604 2 001



**REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA BIDANG PENANAMAN MODAL**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **MEDIA TUWENTI, SE, MM**

Jabatan : Kepala Bidang Penanaman Modal

selanjutnya disebut **pihak KESATU**

Nama : **FADLUS SABI, S.Sos, MM**

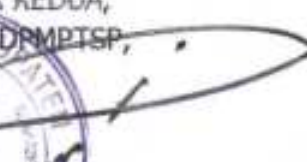
Jabatan : Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kab. Pasaman Barat

selaku atasan pihak Kesatu, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK KESATU berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA,
Kepala DPMPTSP,



FADLUS SABI, S.Sos. MM
NIP. 19470911009103 1 005

Simpang Empat, 13 Desember 2024
PIHAK KESATU,
Kepala Bidang Penanaman Modal,



MEDIA TUWENTI, SE, MM
NIP. 19800527 200901 2 003

REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BIDANG PENANAMAN MODAL

Sasaran	Indikator	Target
1. Meningkatnya realisasi investasi PMA/PMDN	Jumlah dokumen pernyataan minat investasi dari calon investor terhadap potensi dan peluang investasi	1 dokumen
	Capaian nilai investasi PMA/PMDN	53 Milyar

No	Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran
1	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 45.540.400.-

PIHAK KEDUA,
Kepala DPMTSP,



FADLUB SABIL S. Sos, MM
NIP.19700814 190103 1 005

Simpang Empat, 13 Desember 2024
PIHAK KESATU,
Kepala Bidang Penanaman Modal,



MEDIA TUWENTI, SE, MM
NIP. 19800527 200901 2 003



REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA BIDANG PELAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **ADE HANDAYANI, S.Kom**

Jabatan : Kepala Bidang Pelayanan Informasi Dan Pengaduan

selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**

Nama : **FADLUS SABI, S.Sos, MM**

Jabatan : Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Pasaman Barat

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK KESATU berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA,
Kepala DPMPTSP,

FADLUS SABI, S.Sos, MM
NIP. 19700614 20103 1 005

Simpang Empat, 13 Desember 2024
PIHAK KESATU,
Kepala Bidang Pelayanan Informasi Dan
Pengaduan

ADE HANDAYANI, S.Kom
NIP. 19860902 201001 2 024

REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

BIDANG PELAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN

Sasaran	Indikator	Target
1. Meningkatkan realisasi investasi PMA/PMDN	Tersedianya Sistem Data Penanaman Modal	1 Sistem/Aplikasi
2. Meningkatnya Pelayanan Perizinan yang Berkualitas	Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan perizinan	85,60%
No	Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran
1	Pengelolaan data dan informasi perizinan dan non perizinan yang terintegrasi pada tingkat daerah Kabupaten/Kota	Rp. 31.051.650,-
	Pelayanan perizinan dan non perizinan secara terpadu satu pintu di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah Kab/Kota	
2	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Rp. 19.637.200,-

PIHAK KEDUA
Kepala DPMPSTP


FADLUS SABI, S.Sos, MM
NIP. 19700814 199103 1 005

Simpang Empat, 13 Desember 2024
PIHAK KESATU
Kabid Pelayanan Informasi Dan
Pengaduan


ADE HANDAYANI, S.Kom
NIP. 19860902 201001 2 024

REALISASI INVESTASI 2024



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
(Di Sudawai Huta No. 05, Telp. 0911-8600000 Fax. 0911-8601100)

Sekolah Tinggi - Pasaman Barat - Sumatera Barat

LAPORAN REALISASI INVESTASI NON UMR TAHUN 2024

KABUPATEN PASAMAN BARAT

PERIODE LAPORAN	NAMA PELAKU USAHA	KBL	KINDAN KBL	STATUS PENANAMAN MODAL	ALUMAT	KECAMATAN	TAHAP LAPORAN	STATUS LAPORAN	Nilai Modal Tetap Rencana	TOTAL TAMBAHAN INVESTASI	Jumlah Rencana TKR	Jumlah Realisasi TKR	Jumlah Rencana TKR	Jumlah Realisasi TKR
Triwulan IV	USABAR SAWIT MANDIE	10431	Industri Minyak Mentah Kelapa Sawit (Crude Palm Oil)	PMA	PABT	Koto Balangla	PRODUKSI	Ditutupai	Rp. 3.75.000.000.000 Rp	140.123.383.27%	89	6	0	0
Triwulan IV	USABAR SAWIT MANDIE	01262	Perkebunan Buah Kelapa Sawit	PMA	PABT	Koto Balangla	PRODUKSI	Ditutupai	Rp. 40.000.000.000 Rp	140.124.389.27%	256	10	0	0
Triwulan IV	BERKAT SAWIT KAJAHITMA	10432	Industri Minyak Mentah (M) Kelapa Sawit (Crude Palm Oil) (M)	PMA	MELABIT KAJAHITMA	Gempang Tuhin	PRODUKSI	Ditutupai	Rp. 25.000.000.000 Rp	123.000.000.000%	15	30	0	0
Triwulan IV	ANAM KOTED	01262	Perkebunan Buah Kelapa Sawit	PMTN	BUK GADANG PASAMAN PASAMAN BARAT SUMEDAR	Pasaman	PRODUKSI	Ditutupai	Rp. 157.480.810.142 Rp	38.520.325.17%	60%	412	0	0
Triwulan IV	USABAR SAWIT MANDIE	10432	Industri Minyak Mentah (M) Kelapa Sawit (Crude Palm Oil) (M)	PMA	PABT	Koto Balangla	PRODUKSI	Ditutupai	Rp. 25.000.000.000 Rp	30.721.305.08%	35	5	0	0
Triwulan IV	AGROWIRATAMA	01262	Perkebunan Buah Kelapa Sawit	PMA	Indragiri Hilir, Negeri Karuh Air Hiji	Sungai Air	PRODUKSI	Ditutupai	Rp. 42.742.089.000 Rp	17.760.872.53%	82%	32	0	0
Triwulan IV	BANGUNAN RAUMAT	10431	Industri Minyak Mentah Kelapa Sawit (Crude Palm Oil)	PMTN	Indragiri Hilir	Banah Sapihan	KONSTRUKSI	Ditutupai	Rp. 2.000.000.000 Rp	16.274.883.10%	8	11	0	0
Triwulan IV	SARI RUKI SAWIT	10431	Industri Minyak Mentah Kelapa Sawit (Crude Palm Oil)	PMTN	Indragiri Hilir, Negeri Karuh	Kirah	PRODUKSI	Ditutupai	Rp. 41.100.000.000 Rp	6.111.440.81%	10%	2	0	0
Triwulan IV	PERUSAHAAN PERSEKUTUAN (PERSERO) PT. PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA	35102	TRANSMISI TENAGA LISTRIK	PACON	Persewa Sumatera Barat, Kabupaten Pasaman Barat dan Pasaman, Kecamatan Pasaman, Teluk, Lubuk Siquang, Panti, Buharibu/Desa Lingkarang Aun, Aun Buharibu, Rajah, Taki, Sunda, Aun Manggih, Panti Solajan	Pasaman	KONSTRUKSI	Ditutupai	Rp. 2.058.556.961.894 Rp	3.004.880.84%	600	0	0	0
Triwulan IV	ANDALAS AGRO INDUSTRI	10431	Industri Minyak Mentah Kelapa Sawit (Crude Palm Oil)	PMA	Air Pau Jorong Vi Tulu Solajan Negeri Karuh, Kecamatan Kirah Kabupaten Pasaman Barat Sumatera	Kirah	PRODUKSI	Ditutupai	Rp. 40.432.101.130 Rp	1.461.133.76%	110	0	0	0
Triwulan IV	ANDALAS AGRO INDUSTRI	10431	Industri Minyak Mentah Kelapa Sawit (Crude Palm Oil)	PMA	Air Pau Jorong Vi Tulu Solajan Negeri Karuh, Kecamatan Kirah Kabupaten Pasaman Barat Sumatera	Kirah	PRODUKSI	Ditutupai	Rp. 40.432.101.130 Rp	1.381.133.76%	110	0	0	0
Triwulan IV	LAKAS INTERNUA	01262	Perkebunan Buah Kelapa Sawit	PMTN	Dua Sebelah Kiri Jorong Kirah Kabupaten Pasaman Barat	Kirah	PRODUKSI	Ditutupai	Rp. 177.416.485.960 Rp	3.172.292.39%	1.240	0	0	0

Triwulan IV	GERINDO MINANG PLANTATION	10431	Industri Minyak Mentah Kelapa Sawit (Crude Palm Oil)	PMA	Tanjung Pangkal	Pasaman	PRODUKSI	Disetujui	Rp	199.777.146.945	Rp	2.704.448.236	148	0	0	0
Triwulan IV	GURUNG SAWIT ABADI	10431	INDUSTRI MINYAK MENTAH KELAPA SAWIT (CRUDE PALM OIL)	PMA	Banah Rambai, Jorong Langgam	Kinoli	PRODUKSI	Disetujui	Rp	134.847.835.992	Rp	1.797.098.494	116	0	0	0
Triwulan IV	GERINDO MINANG PLANTATION	01262	Perkebunan Buah Kelapa Sawit	PMA	Tanjung Pangkal	Pasaman	PRODUKSI	Disetujui	Rp	251.690.223.291	Rp	1.706.162.266	700	0	0	0
Triwulan IV	AGROWIRATAMA	10431	Industri Minyak Mentah Kelapa Sawit (Crude Palm Oil)	PMA	Jorong Air Haji, Nagari Tanah Air Haji	Sungai Aul	PRODUKSI	Disetujui	Rp	58.659.279.000	Rp	1.639.016.042	190	0	0	0
Triwulan IV	BINTARA TANI NUSANTARA	10431	INDUSTRI MINYAK MENTAH KELAPA SAWIT (CRUDE PALM OIL)	PMON	JL. DESA AIR HUNTING	Sungai Beremas	PRODUKSI	Disetujui	Rp	344.276.913.960	Rp	1.232.395.832	622	0	0	0
Triwulan IV	YAYASAN RUMAH SAKIT ISLAM SUMATERA BAGAT	86103	Aktivitas Rumah Sakit Swasta	PMON	Jln. M. Natsir No. 01, Pasaman Baru	Pasaman	PRODUKSI	Disetujui	Rp	66.000.000.000	Rp	1.168.477.557	252	4	0	0
Triwulan IV	DATA INDAH CERDAS	47111	Perdagangan Eceran Berbagai Macam Ilalang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tambahan Di Minimarket/Supermarket/Hypermaket	PMA	MIR, DIT Ruko Ujung Gading Lembah Melintang Pasaman Barat (XLBW), JL. Ujung Gading, Nagari Ujung Gading, Kec. Lembah Melintang, Kab. Pasaman Barat, Sumatera Barat, 26372	Lembah Melintang	PRODUKSI	Disetujui	Rp	10.030.000.000	Rp	800.000.000	10	0	0	0
Triwulan IV	PERMATA HUAL PASAMAN	01262	Perkebunan Buah Kelapa Sawit	PMA	-	Sarak Ranah Pasie	PRODUKSI	Disetujui	Rp	26.051.323.617	Rp	734.272.429	300	0	0	0
Triwulan IV	TULAS SAKTIJAYA	01262	Perkebunan Buah Kelapa Sawit	PMON	Nagari Muaro Klawi	Gunung Tuleh	PRODUKSI	Disetujui	Rp	21.500.000.000	Rp	671.772.621	25	26	0	0
Triwulan IV	PRIMATAMA MULIAJAYA	01262	Perkebunan Buah Kelapa Sawit	PMA	Jorong Kampung Pisang	Kinoli	PRODUKSI	Disetujui	Rp	52.601.812.841	Rp	466.502.821	436	0	0	0
Triwulan IV	BUKITTINGGI MANDIRI SEJAHTERA	46691	Perdagangan Besar Alat Laboratorium, Alat Farmasi Dan Alat Kedokteran Untuk Manusia	PMON	Jalan Tampuniak Jorong IV Koto Barat	Kinoli	KONSTRUKSI	Disetujui	Rp	567.500.000	Rp	439.356.013	4	0	0	0
Triwulan IV	SAWITA PASAMAN JAYA	10431	Industri Minyak Mentah Kelapa Sawit (Crude Palm Oil)	PMON	Nagari Parit, Koto Balingka	Koto Balingka	PRODUKSI	Disetujui	Rp	93.000.000.000	Rp	354.000.000	18	0	0	0
Triwulan IV	PASAMANNARAMA SEJAHTERA	10433	INDUSTRI PENGHASILAN/FRAKSINASI MINYAK MENTAH KELAPA SAWIT DAN MINYAK MENTAH INTI KELAPA SAWIT	PMON	ujung gading	Lembah Melintang	PRODUKSI	Disetujui	Rp	89.581.989.610	Rp	187.330.137	880	0	0	0
Triwulan IV	BUKITTINGGI MANDIRI SEJAHTERA	46339	Perdagangan Besar Makanan Dan Minuman Lainnya	PMON	Jalan Tampuniak Jorong IV Koto Barat	Kinoli	PRODUKSI	Disetujui	Rp	156.353.867	Rp	108.431.437	72	0	0	0
Triwulan IV	BUKITTINGGI MANDIRI SEJAHTERA	46442	Perdagangan Besar Obat Tradisional Untuk Manusia	PMON	Jalan Tampuniak Jorong IV Koto Barat	Kinoli	PRODUKSI	Disetujui	Rp	22.000.000	Rp	108.431.437	1	0	0	0
Triwulan IV	BUKITTINGGI MANDIRI SEJAHTERA	46499	Perdagangan Besar Berbagai Barang Dan Perlengkapan Rumah Tangga Lainnya Yudi	PMON	Jalan Tampuniak Jorong IV Koto Barat	Kinoli	PRODUKSI	Disetujui	Rp	156.353.867	Rp	108.431.437	72	0	0	0
Triwulan IV	SABANA MITRA SAUDARA	19291	Industri Produk Dari Hasil Kelang Minyak Bumi	PMON	Jalan Lintae Simpang 4 - Ujung Gading Km 27	Gunung Tuleh	KONSTRUKSI	Disetujui	Rp	1.000.000.000	Rp	50.000.000	8	0	0	0

Triwulan IV	SWARNADWI/PA JAYA PRATAMA	23963	Industri Barang Dari Batu Untuk Keperluan Rumah Tangga, Pejangan, dan Bahan Bangunan	PM/DN	Jorong AEX Nabirong, Nagari Permating Perajang	Koto Balingka	KONSTRUKSI	Disetujui	Rp	4.100.000.000	Rp	35.000.000	5	0	0	0
Triwulan IV	SWARNADWI/PA JAYA PRATAMA	23990	Industri Barang Galian Bukan Logam Lainnya Ydi	PM/DN	Jorong Sidauripun, Nagari Butuhan	Ranah Batahan	KONSTRUKSI	Disetujui	Rp	3.385.000.000	Rp	30.000.000	7	0	0	0
Triwulan IV	HAYATI PRATAMA MANDIRI	45403	Perdagangan Eceran Sepeda Motor Baru	PM/DN	Jl. Lintas kinali kampung dalam	Kinali	PRODUKSI	Disetujui	Rp	61.671.250	Rp	18.398.000	10	0	0	0
Triwulan IV	HAYATI PRATAMA MANDIRI	45403	PERDAGANGAN ECERAN SEPEDA MOTOR BARU	PM/DN	Jl. lntas manggopoh simpang empat	Pasaman	PRODUKSI	Disetujui	Rp	9.505.621.572	Rp	8.105.000	47	0	0	0
Triwulan IV	CIPTA NIAGA SEMESTA	46339	Perdagangan Besar Makanan Dan Minuman Lainnya	PM/DN	JORONG BANDAUEJO NAGARI	Pasaman	PRODUKSI	Disetujui	Rp	1.377.777.778	Rp	2.600.000	36	0	0	0
Triwulan IV	SARANA MITRA SAUDARA	23990	Industri Barang Galian Bukan Logam Lainnya Ydi	PM/DN	Jalan Lintas Simpang 4 Ujung Gading KM 27	Gunung Tuleh	KONSTRUKSI	Disetujui	Rp	900.000.000	Rp	1.000.000	2	0	0	0
Triwulan IV	TUAHAJA BARU	45407	Reparasi Dan Perawatan Sepeda Motor	PM/DN	Jl. Lintas Manggopoh - Batang Luan	Pasaman	PRODUKSI	Disetujui	Rp	-	Rp	840.000	7	0	0	0
Triwulan IV	DAYA INDAH YASA	47111	Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembako Di Minimarket/supermarket/ty permarket	PM/DN	Ruko Simpang Ampel Jln. Lintas Sili Manggopoh	Pasaman	PRODUKSI	Disetujui	Rp	9.885.000.000	Rp	736.700	10	0	0	0
Triwulan IV	SABARA MITRA SAUDARA	23963	Industri Barang Dari Batu Untuk Keperluan Rumah Tangga, Pejangan, dan Bahan Bangunan	PM/DN	Jl. Lintas Simpang Empat - Ujung Gading	Gunung Tuleh	KONSTRUKSI	Disetujui	Rp	1.000.000.000	Rp	-	2	0	0	0
Triwulan IV	OIPO INTERNASIONAL PAHALA OTOMOTIF	45104	PERDAGANGAN ECERAN MOBIL BEKAS	PM/DN	Jl. Jenderal Sudirman KM 1, Jorong Simpang Empat, Nagari Lingsuang Aua	Pasaman	KONSTRUKSI	Disetujui	Rp	400.000.000.000	Rp	-	7	0	0	0
Triwulan IV	HAYATI PRATAMA MANDIRI	45407	Reparasi Dan Perawatan Sepeda Motor	PM/DN	Jl. Lintas kinali kampung dalam	Kinali	PRODUKSI	Disetujui	Rp	258.671.250	Rp	-	4	0	0	0
Triwulan IV	HAYATI PRATAMA MANDIRI	45406	Perdagangan Eceran Suku Cadang Sepeda Motor Dan Aksesorisnya	PM/DN	Jl. LINTAS KINALI KAMPUNG DALAM	Kinali	PRODUKSI	Disetujui	Rp	61.671.250	Rp	-	2	0	0	0
Triwulan IV	HAYATI PRATAMA MANDIRI	45407	REPARASI DAN PERAWATAN SEPEDA MOTOR	PM/DN	Jl lntas manggopoh - simpang empat	Pasaman	PRODUKSI	Disetujui	Rp	9.505.621.572	Rp	-	47	0	0	0
Triwulan IV	HAYATI PRATAMA MANDIRI	45406	PERDAGANGAN ECERAN SUKU CADANG SEPEDA MOTOR DAN AKSESORIANYA	PM/DN	Jln Lintas Manggopoh - Simpang Empat	Pasaman	PRODUKSI	Disetujui	Rp	9.505.621.572	Rp	-	47	0	0	0
Triwulan IV	OPTIMA TIRTA ENERGY	35111	Pembangkitan Tenaga Listrik	PM/A	Desa Kaji dan Aur Kuning, Kecamatan Talamau dan Pasaman	Talamau	PRODUKSI	Disetujui	Rp	203.000.000.000	Rp	-	29	0	0	0
Triwulan IV	INTI BANGUN SEJAHTERA	41206	Konstruksi Sentral Telekomunikasi	PM/DN	RT 03 Kampung V Keljorongan Mahakarya Nagari Koto Baru Kecamatan Lubuk Nani Duo Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat	Luhak Nan Duo	KONSTRUKSI	Disetujui	Rp	1.328.023.234	Rp	-	1	0	0	0

Triwulan IV	INTI BANGUN SELAJHTERA	42206	Konstruksi Sentral Telekomunikasi	PMON	Alamanda Jorong Bunsuk, Nagari Kineli, Kecamatan Kineli, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat	Kineli	KONSTRUKSI	Disetujui	Rp	1.425.728.823	Rp	0	0	1	0	0	0
Triwulan IV	INTI BANGUN SELAJHTERA	42206	Konstruksi Sentral Telekomunikasi	PMON	Alamanda Jorong Bunsuk, Nagari Kineli, Kecamatan Kineli, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat	Kineli	KONSTRUKSI	Disetujui	Rp	1.425.728.823	Rp	0	0	1	0	0	0
Triwulan IV	MEGA ENERGI KARYATAMA	35111	Pembangkitan Tenaga Listrik	PMA	PLTM Babi Jonggor (Sungai Kenakan)	Gunung Tuleh	PRODUKSI	Disetujui	Rp	129.572.200.000	Rp	0	0	12	0	0	0
Triwulan IV	BINTARA TANI WUSANTARA	46315	Perdagangan Besar Minyak dan Lemak Nabati	PMON	JORONG SIDAUMPAH	Ranah Betahan	KONSTRUKSI	Disetujui	Rp	344.276.913.960	Rp	0	0	121	0	0	0
Triwulan IV	BINTARA TANI WUSANTARA	01262	Perkebunan Buah Kelapa Sawit	PMON	JL. DESA AIR BUNDING	Sungai Beremas	KONSTRUKSI	Disetujui	Rp	344.276.913.960	Rp	0	0	622	0	0	0
Triwulan IV	BINTARA TANI WUSANTARA	10431	INDUSTRI MINYAK MENTAH KELAPA SAWIT (CRUDE PALM OIL)	PMON	Jorong Siduampan	Ranah Betahan	KONSTRUKSI	Disetujui	Rp	344.276.913.960	Rp	0	0	121	0	0	0
Triwulan IV	BINTARA TANI WUSANTARA	01262	Perkebunan Buah Kelapa Sawit	PMON	Jorong Siduampan	Ranah Betahan	KONSTRUKSI	Disetujui	Rp	344.276.913.960	Rp	0	0	751	0	0	0
Triwulan IV	TRI BAHTERA SRIKANDI	01262	PERKEBUNAN BUAH KELAPA SAWIT	PMON	Jorong Taming	Ranah Betahan	PRODUKSI	Disetujui	Rp	3.510.024.000	Rp	0	0	40	0	0	0
Triwulan IV	BAKRIE PASAMIN PLANTATIONS	01262	Perkebunan Buah Kelapa Sawit	PMON	Nagari Koto Tui, Kecamatan Koto Balingka, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat	Koto Balingka	PRODUKSI	Disetujui	Rp	30.818.295.980	Rp	0	0	1298	0	0	0
Triwulan IV	TELEKOMUNIKASI SELULAR	42206	Konstruksi Sentral Telekomunikasi	PMA	Jalan Simpang Empat Timur Jorong Kangkung Cubadak Nagari Unghuang Aua,	Pasaman	KONSTRUKSI	Disetujui	Rp	-	Rp	0	0	4	0	0	0
Triwulan IV	EVERBRIGHT	46900	Perdagangan Besar Berbagai Macam Barang	PMON	Jalur 1 No. 14 Jambak Kec. Luhak Nan Duo Kab. Pasaman Barat	Luhak Nan Duo	PRODUKSI	Disetujui	Rp	100.000.000	Rp	0	0	1	0	0	0
Triwulan IV	WAGATAMA KENCANA	52101	PENGUDANGAN DAN PENYIMPANAN	PMON	Tampuniak Kajerongan IV Koto Barat	Kineli	PRODUKSI	Disetujui	Rp	676.320.000	Rp	0	0	2	0	0	0
Triwulan IV	DAYAMITRA TELEKOMUNIKASI	42217	KONSTRUKSI SENTRAL TELEKOMUNIKASI	PMON	Pilubang Jorong Kamplung Alang, Nagari Kajar, Kec. Talaman	Talaman	PRODUKSI	Disetujui	Rp	189.337.805	Rp	0	0	2	0	0	0
Triwulan IV	SABANA NITRA SAUDARA	19291	Industri Produk Dari Hasil Kelang Minyak Bumi	PMON	Jl. Lintas Simpang Empat-Ujung Gading	Gunung Tuleh	KONSTRUKSI	Disetujui	Rp	1.000.000.000	Rp	0	0	3	0	0	0
Triwulan IV	SABANA NITRA SAUDARA	46534	Perdagangan Besar Semen, Kapur, Pasir Dan Batu	PMON	Jl. Lintas Simpang 4 - Ujung Gading Km. 27	Gunung Tuleh	KONSTRUKSI	Disetujui	Rp	200.000.000	Rp	0	0	1	0	0	0
Triwulan IV	PASAMANNAMA RAMA SELAJHTERA	01262	Perkebunan Buah Kelapa Sawit	PMON	Lembah Melintang	Sungai Aur	KONSTRUKSI	Disetujui	Rp	65.956.402.470	Rp	0	0	880	0	0	0
Triwulan IV	DAYAMITRA TELEKOMUNIKASI	42206	Konstruksi Sentral Telekomunikasi	PMON	Jorong Simpang Gading, Nagari Sungai Aur, Kecamatan Sungai Aur, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat	Sungai Aur	PRODUKSI	Disetujui	Rp	1.552.977.200	Rp	0	0	B	0	0	0
Triwulan IV	PASAMANNAMA RAMA SELAJHTERA	10431	INDUSTRI MINYAK MENTAH KELAPA SAWIT (CRUDE PALM OIL)	PMON	ujung gading	Lembah Melintang	KONSTRUKSI	Disetujui	Rp	89.581.989.610	Rp	0	0	880	0	0	0

Triwulan IV	PASAMANMAMARAMA SEJAHTERA	10437	INDUSTRI MINYAK GORENG KELAPA SAWIT	PM/DN	ujung gading	Lembah Melintang	KONSTRUKSI	Disetujui	Rp	89.581.989.610	Rp	-	880	0	0	0	0
Triwulan IV	PASAMANMAMARAMA SEJAHTERA	01262	Perkebunan Buah Kelapa Sawit	PM/DN	ujung gading	Lembah Melintang	KONSTRUKSI	Disetujui	Rp	65.955.402.470	Rp	-	880	0	0	0	0
Triwulan IV	PASAMANMAMARAMA SEJAHTERA	46315	Perdagangan Besar Minyak dan Lemak Nabati	PM/DN	ULUNG GADING	Lembah Melintang	KONSTRUKSI	Disetujui	Rp	89.581.989.610	Rp	-	125	0	0	0	0
Triwulan IV	DAYAMITRA TELEKOMUNIKASI	42206	Konstruksi Sentral Telekomunikasi	PM/DN	Pasar Lama Lubuk Gadang	Koto Balingka	PRODUKSI	Disetujui	Rp	1.528.596.176	Rp	-	8	0	0	0	0
Triwulan IV	DAYAMITRA TELEKOMUNIKASI	42206	Konstruksi Sentral Telekomunikasi	PM/DN	Jorong Huta Tunga	Gunung Tuluh	PRODUKSI	Disetujui	Rp	1.528.596.176	Rp	-	8	0	0	0	0
Triwulan IV	DAYAMITRA TELEKOMUNIKASI	42206	Konstruksi Sentral Telekomunikasi	PM/DN	Jorong Sungai Air 2	Gunung Tuluh	PRODUKSI	Disetujui	Rp	1.528.596.176	Rp	-	8	0	0	0	0
Triwulan IV	ANUGERAH WAHYUDI SEJAHTERA	52109	Perdagangan dan Penyimpangan Lainnya	PM/DN	JALAN JAMBAK JALUR VIII TIMUR	Pasaman	KONSTRUKSI	Disetujui	Rp	4.000.000	Rp	-	7	0	0	0	0
Triwulan IV	ANUGERAH WAHYUDI SEJAHTERA	46314	Perdagangan Besar Minuman Non Alkohol Bukan Susu	PM/DN	JALAN JAMBAK JALUR VIII TIMUR	Pasaman	KONSTRUKSI	Disetujui	Rp	4.000.000	Rp	-	7	0	0	0	0
Triwulan IV	ANUGERAH WAHYUDI SEJAHTERA	46314	Perdagangan Besar Kopi, Teh Dan Kakao	PM/DN	JALAN JAMBAK JALUR VIII TIMUR	Pasaman	KONSTRUKSI	Disetujui	Rp	4.000.000	Rp	-	7	0	0	0	0
Triwulan IV	ANUGERAH WAHYUDI SEJAHTERA	46100	Perdagangan Besar Asas Dasar Batah Jasa (Fase) Atau Kontrak	PM/DN	JALAN JAMBAK JALUR VIII TIMUR	Pasaman	KONSTRUKSI	Disetujui	Rp	4.000.000	Rp	-	9	0	0	0	0
Triwulan IV	ANUGERAH WAHYUDI SEJAHTERA	46491	Perdagangan Besar Peredaran Dan Perlingtapan Rumah Tangga	PM/DN	JALAN JAMBAK JALUR VIII TIMUR	Pasaman	KONSTRUKSI	Disetujui	Rp	4.000.000	Rp	-	7	0	0	0	0
Triwulan IV	ANUGERAH WAHYUDI SEJAHTERA	46331	Perdagangan Besar Gula, Coklat Dan Kembang Gula	PM/DN	JALAN JAMBAK JALUR VIII TIMUR	Pasaman	KONSTRUKSI	Disetujui	Rp	4.000.000	Rp	-	7	0	0	0	0
Triwulan IV	ANUGERAH WAHYUDI SEJAHTERA	52101	Perdagangan dan Penyempnan	PM/DN	JALAN JAMBAK JALUR VIII TIMUR	Pasaman	KONSTRUKSI	Disetujui	Rp	4.000.000	Rp	-	7	0	0	0	0
Triwulan IV	ANUGERAH WAHYUDI SEJAHTERA	46691	Perdagangan Besar Alat Laboratorium, Alat Farmasi Dan Alat Kosokoran Untuk Manusia	PM/DN	JALAN JAMBAK JALUR VIII TIMUR	Pasaman	KONSTRUKSI	Disetujui	Rp	4.000.000	Rp	-	7	0	0	0	0
Triwulan IV	ANUGERAH WAHYUDI SEJAHTERA	46135	Perdagangan Besar Rotok Dan Tembaku	PM/DN	JALAN JAMBAK JALUR VIII TIMUR	Pasaman	KONSTRUKSI	Disetujui	Rp	4.000.000	Rp	-	7	0	0	0	0
Triwulan IV	ANUGERAH WAHYUDI SEJAHTERA	46310	Perdagangan Besar Bahan Makanan Dan Minuman Hasil Pertanian Lainnya	PM/DN	JALAN JAMBAK JALUR VIII TIMUR	Pasaman	KONSTRUKSI	Disetujui	Rp	4.000.000	Rp	-	7	0	0	0	0
Triwulan IV	ANUGERAH WAHYUDI SEJAHTERA	46900	Perdagangan Besar Berbagai Macam Barang	PM/DN	JALAN JAMBAK JALUR VIII TIMUR	Pasaman	KONSTRUKSI	Disetujui	Rp	4.000.000	Rp	-	7	0	0	0	0
Triwulan IV	ANUGERAH WAHYUDI SEJAHTERA	46499	Perdagangan Besar Berbagai Barang Dan Perlingtapan Rumah Tangga Lainnya Ydi	PM/DN	JALAN JAMBAK JALUR VIII TIMUR	Pasaman	KONSTRUKSI	Disetujui	Rp	4.000.000	Rp	-	7	0	0	0	0
Triwulan IV	ANUGERAH WAHYUDI SEJAHTERA	46339	Perdagangan Besar Makanan Dan Minuman Lainnya	PM/DN	JALAN JAMBAK JALUR VIII TIMUR	Pasaman	KONSTRUKSI	Disetujui	Rp	4.000.000	Rp	-	7	0	0	0	0
Triwulan IV	AGRO WIRA LIGATSA	10431	Industri Minyak Mentah Kelapa Swett (Crude Palm Oil)	PM/DN	Jorong Simpang Tiga Allen, Nagan Muaro Kluwut Kecamatan Gunung Tuluh, Kabupaten Pasaman Barat	Gunung Tuluh	PRODUKSI	Disetujui	Rp	104.824.577.857	Rp	-	106	0	0	0	0

Triwulan IV	SIMBO PANJANG SUMBER MAKMUR	10431	Industri Minyak Mentah Kelapa Sawit (Crude Palm Oil)	PMON	RIMBO PANJANG, JORONG VI KOTO UTARA KENAGARIAN KINALI	Kinali	PRODUKSI	Disetujui	Rp	94.500.000.000	Rp	0	0	0	0
Triwulan IV	AGROWIRATAMA	01262	Perkebunan Buah Kelapa Sawit	PMA	Nagari Muara Kiawai	Gunung Tuleh	KONSTRUKSI	Disetujui	Rp	28.202.200.000	Rp	0	0	0	0
Triwulan IV	AGROWIRATAMA	10431	Industri Minyak Mentah Kelapa Sawit (Crude Palm Oil)	PMA	Jorong Air Haji, Nagari Ranah Air Haji	Sungai Aur	PRODUKSI		Rp	58.699.279.000	Rp	0	0	0	0
Triwulan IV	ANDALAS AGRO INDUSTRI	10431	Industri Minyak Mentah Kelapa Sawit (Crude Palm Oil)	PMA	Air Rau Jorong VI Koto Selatan Nagari Kinali, Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat Sumatera Barat	Kinali	PRODUKSI		Rp	40.432.101.138	Rp	0	0	0	0
Triwulan IV	ANDALAS AGRO INDUSTRI	10431	Industri Minyak Mentah Kelapa Sawit (Crude Palm Oil)	PMA	Air Rau Jorong VI Koto Selatan Nagari Kinali, Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat Sumatera Barat	Kinali	PRODUKSI		Rp	40.432.101.138	Rp	0	0	0	0
Triwulan IV	AGROWIRATAMA	01262	Perkebunan Buah Kelapa Sawit	PMA	Jorong Air Haji, Nagari Ranah Air Haji	Sungai Aur	PRODUKSI		Rp	42.742.089.000	Rp	32	0	0	0
Triwulan IV	AGROWIRATAMA	01262	Perkebunan Buah Kelapa Sawit	PMA	Nagari Muara Kiawai	Gunung Tuleh	PRODUKSI		Rp	28.202.200.000	Rp	0	0	0	0
Triwulan IV	NIAGATAMA KENCANA	52101	PERDANGAN DAN PENYIMPANAN	PMON	Tampuniak Kajirongan IV Koto Barat	Kinali	PRODUKSI		Rp	876.320.000	Rp	0	0	0	0
Triwulan III	PERKEBUNAN NUSANTARA IV	01262	Perkebunan Buah Kelapa Sawit	PMON	Desa Tango	Sungai Beremas	KONSTRUKSI	Disetujui	Rp	425.901.440	Rp	0	0	0	0
Triwulan III	AGROWIRATAMA	10431	Industri Minyak Mentah Kelapa Sawit (Crude Palm Oil)	PMA	Jorong Air Haji, Nagari Ranah Air Haji	Sungai Aur	PRODUKSI	Disetujui	Rp	58.699.279.000	Rp	0	0	0	0
Triwulan III	PERKEBUNAN NUSANTARA IV	01262	Perkebunan Buah Kelapa Sawit	PMON	Jorong seriak Nagari Koto	Luhak Nan Duo	KONSTRUKSI	Disetujui	Rp	34.602.292.424	Rp	0	0	0	0
Triwulan III	LARAS INTERNUSA	01262	Perkebunan Buah Kelapa Sawit	PMON	Desa Silodadi Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat	Kinali	PRODUKSI	Disetujui	Rp	177.438.485.990	Rp	368	0	0	2
Triwulan III	PERKEBUNAN NUSANTARA IV	10431	Industri Minyak Mentah Kelapa Sawit (Crude Palm Oil)	PMON	Kinali	Kinali	KONSTRUKSI	Disetujui	Rp	26.000.000.000	Rp	0	0	0	0
Triwulan III	ANAM KOTO	01262	Perkebunan Buah Kelapa Sawit	PMON	AIA GADANG PASAMAN PASAMAN BARAT SUMBAR	Pasaman	PRODUKSI	Disetujui	Rp	157.690.810.143	Rp	404	0	0	0
Triwulan III	PASAMANMAMA SEJAHTERA	10433	INDUSTRI PEMISAHAN/FRAKSINASI MINYAK MENTAH KELAPA SAWIT DAN MINYAK MENTAH INTI KELAPA SAWIT	PMON	ujung gading	Lambah Melintang	PRODUKSI	Disetujui	Rp	89.581.989.610	Rp	0	0	0	0
Triwulan III	ANDALAS AGRO INDUSTRI	10431	Industri Minyak Mentah Kelapa Sawit (Crude Palm Oil)	PMA	Air Rau Jorong VI Koto Selatan Nagari Kinali, Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat Sumatera Barat	Kinali	PRODUKSI	Disetujui	Rp	40.432.101.138	Rp	20	0	0	1
Triwulan III	ANDALAS AGRO INDUSTRI	10431	Industri Minyak Mentah Kelapa Sawit (Crude Palm Oil)	PMA	Air Rau Jorong VI Koto Selatan Nagari Kinali, Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat Sumatera Barat	Kinali	PRODUKSI	Disetujui	Rp	40.432.101.138	Rp	20	0	0	1

Timulan III	IAVATI PRATAMA MANDIRI	Reparasi Dan Perawatan Sepeda Motor	PMDN	Jl. Lintas Kiriul kampung dalam	Kiriul	PRODUKSI	Diterima	Rp	258.671.250	Rp	-	4	0	0	0	0
Timulan III	BINTARA TANI NUSANTARA	Perkebunan Buah Kelapa Sawit	PMDN	Jl. DESA AIR RUNDING	Sungai Beremas	KONSTRUKSI	Diterima	Rp	344.275.913.960	Rp	-	522	0	0	0	0
Timulan III	BINTARA TANI NUSANTARA	Perdagangan Besar Minyak dan Lemak Nabati	PMDN	JORONG SUDAMPAH	Remah Betahan	KONSTRUKSI	Diterima	Rp	344.275.913.960	Rp	-	121	0	0	0	0
Timulan III	BINTARA TANI NUSANTARA	INDUSTRI MINYAK MENTAH KELAPA SAWIT (CRUDE PALM OIL)	PMDN	Jorong sidampam	Remah Betahan	KONSTRUKSI	Diterima	Rp	344.275.913.960	Rp	-	121	0	0	0	0
Timulan III	BINTARA TANI NUSANTARA	Perkebunan Buah Kelapa Sawit	PMDN	Jorong Sidampam	Remah Betahan	KONSTRUKSI	Diterima	Rp	344.275.913.960	Rp	-	751	0	0	0	0
Timulan III	BINTARA TANI NUSANTARA	INDUSTRI MINYAK MENTAH KELAPA SAWIT (CRUDE PALM OIL)	PMDN	Jl. DESA AIR RUNDING	Sungai Beremas	PRODUKSI	Diterima	Rp	344.275.913.960	Rp	-	522	0	0	0	0
Timulan III	AGROWIBATAMA	Perkebunan Buah Kelapa Sawit	PMA	Negeri Muara Kemas	Guntung Tuluh	KONSTRUKSI	Diterima	Rp	28.202.200.000	Rp	-	41	0	0	0	0
Timulan III	NIAGATAMA KENCANA	PERGUDANGAN DAN PENYIMPANAN	PMDN	Tanjungkat Kejorongan IV Koto Barak	Kiriul	PRODUKSI	Diterima	Rp	676.320.000	Rp	-	2	0	0	0	0
Timulan III	PASAMAMBARAWA SELAHTERA	Perkebunan Buah Kelapa Sawit	PMDN	Lembah Melintang	Sungai Aue	KONSTRUKSI	Diterima	Rp	65.956.402.470	Rp	-	880	0	0	0	0
Timulan III	SABANA MITRA SALICARA	Industri Produk Dari Hasil Kelapa Minyak Bumi	PMDN	Jl. Lintas Simpang Empat- Ujung Gading	Guntung Tuluh	KONSTRUKSI	Diterima	Rp	1.000.000.000	Rp	-	3	0	0	0	0
Timulan III	PASAMAMBARAWA SELAHTERA	INDUSTRI MINYAK MENTAH KELAPA SAWIT (CRUDE PALM OIL)	PMDN	Ujung gading	Lembah Melintang	KONSTRUKSI	Diterima	Rp	89.581.989.510	Rp	-	880	0	0	0	0
Timulan III	PASAMAMBARAWA SELAHTERA	Perkebunan Buah Kelapa Sawit	PMDN	Ujung gading	Lembah Melintang	KONSTRUKSI	Diterima	Rp	65.956.402.470	Rp	-	880	0	0	0	0
Timulan III	PASAMAMBARAWA SELAHTERA	INDUSTRI MINYAK GORENG KELAPA SAWIT	PMDN	Ujung gading	Lembah Melintang	KONSTRUKSI	Diterima	Rp	89.581.989.510	Rp	-	880	0	0	0	0
Timulan III	PASAMAMBARAWA SELAHTERA	Perdagangan Besar Minyak dan Lemak Nabati	PMDN	ULUNG GADING	Lembah Melintang	KONSTRUKSI	Diterima	Rp	89.581.989.510	Rp	-	125	0	0	0	0
Timulan III	AGRO WIRTA LIGATSA	Industri Minyak Menth Kelapa Sawit (Crude Palm Oil)	PMDN	Jorong Simpang Tiga Alin, Negeri Muaro Kemas Kecamatan Gunung Tuluh, Kabupaten Pasaman Barat	Guntung Tuluh	PRODUKSI	Diterima	Rp	104.824.577.857	Rp	-	106	0	0	0	0
Timulan III	TIJAHAYA BARIJ	Reparasi Dan Perawatan Sepeda Motor	PMDN	Jl. Lintas Melangpoh - Batang Luan	Pasaman	PRODUKSI	Diterima	Rp	-	Rp	-	7	0	0	0	0
Timulan III	PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA	Konstruksi Sentral Telekomunikasi	PMDN	Jl. IRIAN JORONG TALUAK AMBUN	Lembah Melintang	KONSTRUKSI	Diterima	Rp	-	Rp	-	4	0	0	0	0
Timulan III	PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA	Konstruksi Sentral Telekomunikasi	PMDN	Jl. IRIAN JORONG TALUAK AMBUN	Lembah Melintang	KONSTRUKSI	Diterima	Rp	-	Rp	-	4	0	0	0	0
Timulan III	PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA	Konstruksi Sentral Telekomunikasi	PMDN	Jl. Jawa Jorong Berastagi	Lembah Melintang	KONSTRUKSI	Diterima	Rp	-	Rp	-	4	0	0	0	0
Timulan III	PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA	Konstruksi Sentral Telekomunikasi	PMDN	Jl. Jawa Jorong Berastagi	Lembah Melintang	KONSTRUKSI	Diterima	Rp	-	Rp	-	4	0	0	0	0
Timulan III	PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA	Konstruksi Sentral Telekomunikasi	PMDN	Jl. Jawa Jorong Berastagi	Lembah Melintang	KONSTRUKSI	Diterima	Rp	-	Rp	-	4	0	0	0	0
Timulan III	PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA	Konstruksi Sentral Telekomunikasi	PMDN	Jl. Jawa Jorong Berastagi	Lembah Melintang	KONSTRUKSI	Diterima	Rp	-	Rp	-	4	0	0	0	0

Triwulan III	PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT. PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA	35102	TRANSMISI TENAGA LISTRIK	PMON	Provinsi Sumatera Barat, Kabupaten Pasaman Barat dan Pasaman, Kecamatan Pasaman, Talamau, Lubuk Sikaping, Panti, Kelurahan/Desa Lingkuang Aui, Aui Kuning, Kaji, Tali, Sundaia, Ala Manggih, Panti Selatan.	Pasaman	KONSTRUKSI	Disetujui	Rp 2.058.666.961.694	Rp 1.733.876.799	600	0	0	0
Triwulan III	VAYASAM BUMAH SAKIT (SLAM) SUMATERA BARAT	86108	Aktivitas Rumah Sakit Swasta	PMON	Jln. M. Naser No. 01, Pasaman Baru	Pasaman	PRODUKSI	Disetujui	Rp 66.000.000.000	Rp 1.546.129.190	252	6	0	0
Triwulan III	GUNUNG SAWIT ABADI	10431	INDUSTRI MINYAK MENTAH KELAPA SAWIT (CRUDE PALM OIL)	PMA	Bonah Rambai, Jorong Langgam	Kinai	PRODUKSI	Disetujui	Rp 134.847.835.992	Rp 1.348.243.600	116	0	0	0
Triwulan III	BERKAT SAWIT SEJAHTERA	10432	Industri Minyak Mentah Inti Kelapa Sawit (Crude Palm Kernel Oil)	PMA	MAJARO KAWAI	Gunung Tuluh	PRODUKSI	Disetujui	Rp 25.000.000.000	Rp 1.143.000.000	15	0	0	0
Triwulan III	SARI BUAH SAWIT	10431	Industri Minyak Mentah Kelapa Sawit (Crude Palm Oil)	PMON	Jorong Langgam Sepakat Nagari Kinai	Kinai	PRODUKSI	Disetujui	Rp 42.500.000.000	Rp 1.100.745.932	103	0	0	0
Triwulan III	BUKITTINGGI MANDIRI SEJAHTERA	46442	Perdagangan Besar Obat Tradisional Untuk Manusia	PMON	Jalan Tampuniak Jorong IV Koto Barat	Kinai	KONSTRUKSI	Disetujui	Rp 22.000.000	Rp 764.998.833	1	0	0	0
Triwulan III	BUKITTINGGI MANDIRI SEJAHTERA	46591	Perdagangan Besar Alat Laboratorium, Alat Farmasi Dan Alat Kedokteran Untuk Manusia	PMON	Jalan Tampuniak Jorong IV Koto Barat	Kinai	KONSTRUKSI	Disetujui	Rp 567.500.000	Rp 764.998.833	4	0	0	0
Triwulan III	IGERSINDO MINANG PLANTATION	10431	Industri Minyak Mentah Kelapa Sawit (Crude Palm Oil)	PMA	Tanjung Pangkal	Pasaman	PRODUKSI	Disetujui	Rp 199.777.146.945	Rp 685.975.917	148	0	0	0
Triwulan III	RMBO PANJANG SUMBER MAKUR	10431	Industri Minyak Mentah Kelapa Sawit (Crude Palm Oil)	PMON	RMBO PANJANG, JORONG VI KOTO UTARA KENAGARIAN KINAI	Kinai	PRODUKSI	Disetujui	Rp 94.500.000.000	Rp 500.000.000	103	0	0	0
Triwulan III	BUKITTINGGI MANDIRI SEJAHTERA	46499	Perdagangan Besar Berbagai Barang Dan Perlengkapan Rumah Tangga Lainnya Yudi	PMON	Jalan Tampuniak Jorong IV Koto Barat	Kinai	PRODUKSI	Disetujui	Rp 156.353.867	Rp 422.755.371	72	2	0	0
Triwulan III	BUKITTINGGI MANDIRI SEJAHTERA	46339	Perdagangan Besar Makanan Dan Minuman Lainnya	PMON	Jalan Tampuniak Jorong IV Koto Barat	Kinai	PRODUKSI	Disetujui	Rp 156.353.867	Rp 422.755.371	72	0	0	0
Triwulan III	USAHA SAWIT MANDIRI	10431	Industri Minyak Mentah Kelapa Sawit (Crude Palm Oil)	PMA	PARIT	Koto Balingka	PRODUKSI	Disetujui	Rp 170.000.000.000	Rp 370.638.643	89	0	0	0
Triwulan III	PRIMATAMA MULIAJAYA	01262	Perkebunan Buah Kelapa Sawit	PMA	Jorong Kampung Pisang	Kinai	PRODUKSI	Disetujui	Rp 52.601.812.841	Rp 248.834.427	436	0	0	0
Triwulan III	IGERSINDO MINANG PLANTATION	01262	Perkebunan Buah Kelapa Sawit	PMA	Tanjung Pangkal	Pasaman	PRODUKSI	Disetujui	Rp 251.690.223.291	Rp 187.775.579	700	0	0	0
Triwulan III	PERKEBUNAN ANAK NEGERI PASAMAN	01262	Perkebunan Buah Kelapa Sawit	PMA	Desa VI Koto, Aniam Koto Selatan	Kinai	PRODUKSI	Disetujui	Rp 17.695.594.837	Rp 134.400.000	100	0	0	0
Triwulan III	MULYA REZKINA SEJAHTERA	47301	PERDAGANGAN ECEBAN BAHAN BAKAR KENDARAAN DI SPBU	PMON	Jorong Limpato	Talameu	PRODUKSI	Disetujui	Rp 500.000.000	Rp 87.000.000	15	0	0	0
Triwulan III	AGROWIRATAMA	01262	Perkebunan Buah Kelapa Sawit	PMA	Jorong Air Haji, Nagari Ranah Air Haji	Sungai Aur	PRODUKSI	Disetujui	Rp 42.742.089.000	Rp 78.800.000	823	0	0	0

Triwulan III	HAYATI PRATAMA MAHDIRI	45407	Reparasi Dan Perawatan Sepeda Motor	PM/DM	Jl. Lintas kirah Lampung dalam	Konab	PRODUKSI	Ditertajui	Rp	258.671.250	Rp	-	4	0	0	0
Triwulan III	BINTARA TANI NUSANTARA	01262	Perkebunan Buah Kelapa Sawit	PM/DM	Jl. DESA AIR BUNIHES	Sungai Berenjat	KONSTRUKSI	Ditertajui	Rp	344.276.913.960	Rp	-	622	0	0	0
Triwulan III	BINTARA TANI NUSANTARA	06315	Perdagangan Besar Minyak dan Lemak Nabati	PM/DM	JORONG SOUAMPAN	Ranah Batahan	KONSTRUKSI	Ditertajui	Rp	344.276.913.960	Rp	-	121	0	0	0
Triwulan III	BINTARA TANI NUSANTARA	10431	INDUSTRI MINYAK MENTAH KELAPA SAWIT (CRUDE PALM OIL)	PM/DM	Jorong subangpan	Ranah Batahan	KONSTRUKSI	Ditertajui	Rp	344.276.913.960	Rp	-	121	0	0	0
Triwulan III	BINTARA TANI NUSANTARA	01262	Perkebunan Buah Kelapa Sawit	PM/DM	Jorong Sidhupan	Ranah Batahan	KONSTRUKSI	Ditertajui	Rp	344.276.913.960	Rp	-	751	0	0	0
Triwulan III	BINTARA TANI NUSANTARA	10431	INDUSTRI MINYAK MENTAH KELAPA SAWIT (CRUDE PALM OIL)	PM/DM	Jl. DESA AIR BUNIHES	Sungai Berenjat	PRODUKSI	Ditertajui	Rp	344.276.913.960	Rp	-	622	0	0	0
Triwulan III	AGROWINATAMA	01262	Perkebunan Buah Kelapa Sawit	PM/DM	Nagari Muara Kawat	Gunung Tuleh	KONSTRUKSI	Ditertajui	Rp	28.202.200.000	Rp	-	41	0	0	0
Triwulan III	NIASATAMA KENCANA	52301	PERGUDANGAN DAN PENYIMPANAN	PM/DM	Tampunak Keperangan IV Koto Barak	Kinab	PRODUKSI	Ditertajui	Rp	676.320.000	Rp	-	2	0	0	0
Triwulan III	PASAMAMARAMA SELAJTERA	01262	Perkebunan Buah Kelapa Sawit	PM/DM	Lembah Melintang	Sungai Aur	KONSTRUKSI	Ditertajui	Rp	65.956.402.470	Rp	-	880	0	0	0
Triwulan III	SARANA MITRA SAUDARA	19291	Industri Produk Dan Hasil Kelapa Sawit (Crude Palm Oil)	PM/DM	Jl. Lintas Simpang Empat-Ujung Sealing	Gunung Tuleh	KONSTRUKSI	Ditertajui	Rp	1.000.000.000	Rp	-	3	0	0	0
Triwulan III	PASAMAMARAMA SELAJTERA	10431	INDUSTRI MINYAK MENTAH KELAPA SAWIT (CRUDE PALM OIL)	PM/DM	ujung gading	Lembah Melintang	KONSTRUKSI	Ditertajui	Rp	89.581.989.610	Rp	-	880	0	0	0
Triwulan III	PASAMAMARAMA SELAJTERA	01262	Perkebunan Buah Kelapa Sawit	PM/DM	ujung gading	Lembah Melintang	KONSTRUKSI	Ditertajui	Rp	65.956.402.470	Rp	-	880	0	0	0
Triwulan III	PASAMAMARAMA SELAJTERA	10437	INDUSTRI MINYAK GORENG KELAPA SAWIT	PM/DM	ujung gading	Lembah Melintang	KONSTRUKSI	Ditertajui	Rp	89.581.989.610	Rp	-	880	0	0	0
Triwulan III	PASAMAMARAMA SELAJTERA	46315	Perdagangan Besar Minyak dan Lemak Nabati	PM/DM	ULUNG GADING	Lembah Melintang	KONSTRUKSI	Ditertajui	Rp	89.581.989.610	Rp	-	125	0	0	0
Triwulan III	AGRO WIRA LIGATSA	10431	Industri Minyak Mentah Kelapa Sawit (Crude Palm Oil)	PM/DM	Jorong Simpang Tiga Alin, Nagari Muara Kawat Kecamatan Gunung Tuleh, Kabupaten Pesawaran Barat	Gunung Tuleh	PRODUKSI	Ditertajui	Rp	104.824.577.857	Rp	-	106	0	0	0
Triwulan III	TAHAJA BARU	45407	Reparasi Dan Perawatan Sepeda Motor	PM/DM	Jl. Lintas Mangrove - Barang Luan	Pesaman	PRODUKSI	Ditertajui	Rp	-	Rp	-	7	0	0	0
Triwulan III	PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA	42206	Konstruksi Sentral Telekomunikasi	PM/DM	Jl. IRAN JORONG TALUAK AMBUN	Lembah Melintang	KONSTRUKSI	Ditertajui	Rp	-	Rp	-	4	0	0	0
Triwulan III	PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA	42206	Konstruksi Sentral Telekomunikasi	PM/DM	Jl. IRAN JORONG TALUAK AMBUN	Lembah Melintang	KONSTRUKSI	Ditertajui	Rp	-	Rp	-	4	0	0	0
Triwulan III	PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA	42206	Konstruksi Sentral Telekomunikasi	PM/DM	Jl. Jawa Jorong Berastagi	Lembah Melintang	KONSTRUKSI	Ditertajui	Rp	-	Rp	-	4	0	0	0
Triwulan III	PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA	42206	Konstruksi Sentral Telekomunikasi	PM/DM	Jl. Jawa Jorong Berastagi	Lembah Melintang	KONSTRUKSI	Ditertajui	Rp	-	Rp	-	4	0	0	0
Triwulan III	PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA	42206	Konstruksi Sentral Telekomunikasi	PM/DM	Jl. Jawa Jorong Berastagi	Lembah Melintang	KONSTRUKSI	Ditertajui	Rp	-	Rp	-	4	0	0	0
Triwulan III	PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA	42206	Konstruksi Sentral Telekomunikasi	PM/DM	Jl. Jawa Jorong Berastagi	Lembah Melintang	KONSTRUKSI	Ditertajui	Rp	-	Rp	-	4	0	0	0

Triwulan III	USAHA SAWIT MANDIRI	10432	Industri Minyak Mentah Inti Kelapa Sawit (Crude Palm Kernel Oil)	PMA	PABT	Koto Balingka	PRODUKSI	Disebut	Rp	25.000.000.000	Rp	-	15	0	0	0
Triwulan III	THI BAHTERA SRIKANDI	01262	PERKEBUNAN BUAH KELAPA SAWIT	PMON	Jorong Taming	Ramah Batuhan	PRODUKSI	Disebut	Rp	3.510.024.000	Rp	-	40	0	0	0
Triwulan III	DAYAMITRA TELEKOMUNIKASI	42206	Konstruksi Sentral Telekomunikasi	PMON	Jorong Simpang Gadang, Nagari Sungai Aur, Kecamatan Sungai Aur, Kabupaten Pasaman Barat, Propinsi Sumatera Barat	Sungai Aur	PRODUKSI	Disebut	Rp	1.552.977.200	Rp	-	8	0	0	0
Triwulan III	DAYAMITRA TELEKOMUNIKASI	42206	Konstruksi Sentral Telekomunikasi	PMON	Jorong Sungai Aur 2	Gunung Tuleh	PRODUKSI	Disebut	Rp	1.528.596.176	Rp	-	8	0	0	0
Triwulan III	DAYAMITRA TELEKOMUNIKASI	42206	Konstruksi Sentral Telekomunikasi	PMON	Pasar Lama Lubuk Gadang	Koto Balingka	PRODUKSI	Disebut	Rp	1.528.596.176	Rp	-	8	0	0	0
Triwulan III	DAYAMITRA TELEKOMUNIKASI	42206	Konstruksi Sentral Telekomunikasi	PMON	Jorong Hula Tonga	Gunung Tuleh	PRODUKSI	Disebut	Rp	1.528.596.176	Rp	-	8	0	0	0
Triwulan III	DAYAMITRA TELEKOMUNIKASI	42217	KONSTRUKSI SENTRAL TELEKOMUNIKASI	PMON	Piluhang Jorong Kampung Alam, Nagari Kajai, Kec. Telamau	Telamau	PRODUKSI	Disebut	Rp	169.337.805	Rp	-	2	0	0	0
Triwulan III	BERHAT SAWIT SEJAHTERA	01262	Perkebunan Buah Kelapa Sawit	PMA	MUARO KAWAL	Gunung Tuleh	PRODUKSI	Disebut	Rp	170.000.000.000	Rp	-	0	0	0	0
Triwulan III	CIPTA RIAGA SEMESTA	46339	Perdagangan Besar Makanan Dan Minuman Lainnya	PMON	JORONG BANDAHEJO NAGARI	Pasaman	PRODUKSI	Disebut	Rp	1.377.777.776	Rp	-	36	0	0	0
Triwulan III	ANUSIERAH WAHYUDI SEJAHTERA	46691	Perdagangan Besar Alat Laboratorium, Alat Farmasi Dan Alat Kedokteran Untuk Manusia	PMON	JALAN JAMBAL JALUR VIII TIMUR	Pasaman	KONSTRUKSI	Disebut	Rp	4.000.000	Rp	-	7	0	0	0
Triwulan III	BAKRIE PASAMAN PLANTATIONS	01262	Perkebunan Buah Kelapa Sawit	PMON	Nagari Koto Tuo, Kecamatan Koto Balingka, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat	Koto Balingka	PRODUKSI	Disebut	Rp	30.818.295.980	Rp	-	1298	0	0	0
Triwulan III	PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA	42206	Konstruksi Sentral Telekomunikasi	PMON	Air tunding nagari	Koto Balingka	KONSTRUKSI	Disebut	Rp	-	Rp	-	30	0	0	0
Triwulan III	USAHA SAWIT MANDIRI	01262	Perkebunan Buah Kelapa Sawit	PMA	PABT	Koto Balingka	PRODUKSI	Disebut	Rp	40.000.000.000	Rp	-	250	0	0	0
Triwulan III	AGRO BISNIS SUMBER MAKUR	01262	PERKEBUNAN BUAH KELAPA SAWIT	PMON	DESA SARIK SIMPANG (OPH 97 PM VI)	Luhak Nan Duo	KONSTRUKSI	Disebut	Rp	16.410.222.711	Rp	-	0	0	0	0
Triwulan III	HAYATI PRATAMA MANDIRI	45407	REPARASI DAN PERAWATAN SEPEDA MOTOR	PMON	Jl lintas manggopoh - simpang empat	Pasaman	PRODUKSI	Disebut	Rp	9.505.621.572	Rp	-	47	0	0	0
Triwulan III	HAYATI PRATAMA MANDIRI	45406	PERDAGANGAN ECEBAN SIKU CADANG SEPEDA MOTOR DAN AKSESORIYA	PMON	Jln Lintas Manggopoh - Simpang Empat	Pasaman	PRODUKSI	Disebut	Rp	9.505.621.572	Rp	-	47	0	0	0
Triwulan III	TELEKOMUNIKASI SELULAR	42206	Konstruksi Sentral Telekomunikasi	PMA	Jalan Simpang Empat Timur Jorong Kampung Cubadak Nagari Lingsuang Aui,	Pasaman	KONSTRUKSI	Disebut	Rp	-	Rp	-	4	0	0	0
Triwulan III	EVERBRIGHT	46900	Perdagangan Besar Berbagai Macam Barang	PMON	Jalur 1 No. 14 Jambak Kec. (Luhak Nan Duo Kuth. Pasaman Barat	Luhak Nan Duo	PRODUKSI	Disebut	Rp	100.000.000	Rp	-	1	0	0	0

Triwulan III	PERMATA HILAU PASAMAN	01262	Perkebunan Buah Kelapa Sawit	PNIA	-	Sesak Rantau Pasisie	PRODUKSI	Ditertujui	Rp	26.051.323.617	Rp	67.128.818	300	0	0	0
Triwulan III	SAWITA PASAMAN JAYA	10431	Industri Minyak Mentah Kelapa Sawit (Crude Palm Oil)	PMON	Nagari Parit, Koto Balingha	Koto Balingha	PRODUKSI	Ditertujui	Rp	93.000.000.000	Rp	66.886.577	18	0	0	0
Triwulan III	DIPO INTERNASIONAL PAHALA OTOMOTIF	45104	PERDAGANGAN ECERAN MOBIL BEKAS	PMON	Jl. Jenderal Sudirman Km 1, Jorong Simpang Empat, Nagari Lingsuang Aua	Pasaman	KONSTRUKSI	Ditertujui	Rp	400.000.000.000	Rp	51.350.000	7	0	0	0
Triwulan III	TULAS SAKTIJAYA	01262	Perkebunan Buah Kelapa Sawit	PMON	Nagari Muaro Gawe	Gunung Tuleh	PRODUKSI	Ditertujui	Rp	23.500.000.000	Rp	28.323.574	25	0	0	0
Triwulan III	MULYA REZKINA SEJAHTERA	47301	PERDAGANGAN ECERAN BAHAN BAKAR KENDARAAN DI SPBU	PMON	AIR BANGIS- SIMPANG EMPAT, JORONG KAMPUNG ALANG	Gunung Tuleh	KONSTRUKSI	Ditertujui	Rp	500.000.000	Rp	10.000.008	10	0	0	0
Triwulan III	HAYATI PRATAMA MANDIRI	45403	PERDAGANGAN ECERAN SEPEDA MOTOR BARU	PMON	Jl. Lintas Pangrehop Simpang empat	Pasaman	PRODUKSI	Ditertujui	Rp	9.505.621.572	Rp	6.885.000	47	0	0	0
Triwulan III	MULYA REZKINA SEJAHTERA	47301	Perdagangan Eceran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas (BKG), dan Liquefied Petroleum Gas (LPG) di Sarana Pengisian Bahan Bakar Transportasi Darat, Laut, dan Udara	PMON	Jl. KAMPUNG JUAR, JORONG BAHAN SALIDO	Lembah Melintang	PRODUKSI	Ditertujui	Rp	4.505.862.000	Rp	6.500.000	24	0	0	0
Triwulan III	HAYATI PRATAMA MANDIRI	45403	Perdagangan Eceran Sepeda Motor Baru	PMON	Jl. Lintas kinai kampung dalam	Kinai	PRODUKSI	Ditertujui	Rp	61.671.250	Rp	6.495.000	10	0	0	0
Triwulan III	INTERCOM MOBILINDO	45101	PERDAGANGAN BESAR MOBIL BARU	PMON	Jl. Simpang Empat Manggopoh, Jambak Jujur III	Luhak Nan Duo	PRODUKSI	Ditertujui	Rp	3.295.923.503	Rp	5.006.000	11	0	0	0
Triwulan III							PRODUKSI	Ditertujui	Rp	-	Rp	5.000.000	NaN	0	NaN	0
Triwulan III	HAYATI PRATAMA MANDIRI	45406	Perdagangan Eceran Suku Cadang Sepeda Motor Dan Aksesorisnya	PMON	Jl. LINTAS KINAI KAMPUNG DALAM	Kinai	PRODUKSI	Ditertujui	Rp	61.671.250	Rp	4.377.840	2	0	0	0
Triwulan III	DAYA INDAH YASA	47111	Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tambakau Di Minimarket/Supermarket/Hypermarket	PMON	Ruko Simpang Ampok Jln. Lintas Sri Manggopoh	Pasaman	PRODUKSI	Ditertujui	Rp	9.885.000.000	Rp	3.784.376	10	0	0	0
Triwulan III	MULYA REZKINA SEJAHTERA	47301	Perdagangan Eceran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas (BKG), dan Liquefied Petroleum Gas (LPG) di Sarana Pengisian Bahan Bakar Transportasi Darat, Laut, dan Udara	PMON	Jorong Bungo Tanjung	Sungai Beremas	PRODUKSI	Ditertujui	Rp	500.000.000	Rp	3.500.000	10	0	0	0
Triwulan III							PRODUKSI	Ditertujui	Rp	-	Rp	500.000	NaN	0	NaN	0
Triwulan III	SARANA MITRA SAUDARA	23963	Industri Barang Dari Batu Untuk Keperluan Rumah Tinggal, Pagar, dan Bahan Bangunan	PMON	Jl. Lintas Simpang Empat-Ujung Gading	Gunung Tuleh	KONSTRUKSI	Ditertujui	Rp	1.000.000.000	Rp	500.000	2	0	0	0
Triwulan III	SARANA MITRA SAUDARA	46634	Perdagangan Besar Semen, Kapur, Pasir Dan Batu	PMON	Jl. Lintas Simpang 4 - Ujung Gading Km. 27	Gunung Tuleh	KONSTRUKSI	Ditertujui	Rp	200.000.000	Rp	300.000	1	0	0	0
Triwulan III							KONSTRUKSI	Ditertujui	Rp	-	Rp	100.000	NaN	0	NaN	0
Triwulan III							KONSTRUKSI	Ditertujui	Rp	-	Rp	50.000	NaN	0	NaN	0

Triwulan III	IGAMINDRA MITRAKESUMA	07102	Pertambangan Biji Besi	PMA	Air Bangli	Sungai Beremas	PRODUKSI	Ditetujui	Rp	87.000.000.000	Rp	-	15	0	0	0
Triwulan III	OPTIMA TIRTA ENERGY	35111	Pembangkitan Tenaga Listrik	PMA	Desa Kajai dan Aur Kuning, Kecamatan Talamus dan Pasaman	Talamau	PRODUKSI	Ditetujui	Rp	203.000.000.000	Rp	-	29	0	0	0
Triwulan III	PERKUBUNGAN ANAK NEGERI PASAMAN	01262	Perkubunan Buah Kelapa Sawit	PMA	Desa VI Koto, Anau Koto Selatan	Kinali	PRODUKSI	Ditetujui	Rp	17.695.594.837	Rp	-	0	48	0	0
Triwulan III	PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA	42206	Konstruksi Sentral Telekomunikasi	PMDN	Air runding nagan	Koto Balingga	KONSTRUKSI	Ditetujui	Rp	-	Rp	-	10	0	0	0
Triwulan II	SARI BUAH SAWIT	10431	Industri Minyak Mentah Kelapa Sawit (Crude Palm Oil)	PMDN	Jorong Langgam Sepahat, Nagan Kinali	Kinali	PRODUKSI	Ditetujui	Rp	42.500.000.000	Rp	2.017.884.323	103	0	0	0
Triwulan II	PASAMAMBARAMA SEJAHTERA	10433	INDUSTRI PEMISAHAN/FAKSIASI MINYAK MENTAH KELAPA SAWIT DAN MINYAK MENTAH INTI KELAPA SAWIT	PMDN	ujung gading	Lembah Melintang	PRODUKSI	Ditetujui	Rp	89.581.989.610	Rp	1.082.349.924	880	0	0	0
Triwulan II	AGROWIRATAMA	10431	Industri Minyak Mentah Kelapa Sawit (Crude Palm Oil)	PMA	Jorong Air Haji, Nagan Ranuh Air Haji	Sungai Aur	PRODUKSI	Ditetujui	Rp	58.699.279.000	Rp	773.050.000	190	0	0	0
Triwulan II	DAYAMITRA TELEKOMUNIKASI	42206	Konstruksi Sentral Telekomunikasi	PMDN	Lubuk Barang, Jorong Kapa Utara, Nagan Kapa, Kecamatan Lubuk Nan Duo	Lubuk Nan Duo	KONSTRUKSI	Ditetujui	Rp	1.634.715.440	Rp	644.715.440	10	0	0	0
Triwulan II	BUKITINGGI MANDIRI SEJAHTERA	46442	Perdagangan Besar Obat Tradisional Untuk Malaria	PMDN	Jalan Tempuruk Jorong IV Koto Barak	Kinali	KONSTRUKSI	Ditetujui	Rp	22.000.000	Rp	595.456.295	1	2	0	0
Triwulan II	DAYAMITRA TELEKOMUNIKASI	42206	Konstruksi Sentral Telekomunikasi	PMDN	Dusun Hutanin Baru, Jorong Siruak Barat, Nagan Ujung Gading, Kecamatan Lembah Melintang	Lembah Melintang	KONSTRUKSI	Ditetujui	Rp	1.573.843.724	Rp	583.843.724	10	0	0	0
Triwulan II	PERMATA HILAU PASAMAN	01262	Perkubunan Buah Kelapa Sawit	PMA	-	Sesak Ranuh Pasisie	PRODUKSI	Ditetujui	Rp	26.051.323.617	Rp	523.293.384	300	0	0	0
Triwulan II	DAYAMITRA TELEKOMUNIKASI	42206	Konstruksi Sentral Telekomunikasi	PMDN	Jorong Simpang Gadang, Nagan Sungai Aur, Kecamatan Sungai Aur, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat	Sungai Aur	PRODUKSI	Ditetujui	Rp	1.552.977.200	Rp	477.977.200	8	0	0	0
Triwulan II	DAYAMITRA TELEKOMUNIKASI	42206	Konstruksi Sentral Telekomunikasi	PMDN	Jorong Huta Tonga	Gumung Tuleh	PRODUKSI	Ditetujui	Rp	1.528.596.176	Rp	448.596.176	8	0	0	0
Triwulan II	DAYAMITRA TELEKOMUNIKASI	42206	Konstruksi Sentral Telekomunikasi	PMDN	Pasar Lama Lubuk Gadang	Gumung Tuleh	PRODUKSI	Ditetujui	Rp	1.528.596.176	Rp	448.596.176	8	0	0	0
Triwulan II	ANDALAS AGRO INDUSTRI	10431	Industri Minyak Mentah Kelapa Sawit (Crude Palm Oil)	PMA	Air Bau Jorong VI Koto Selatan Nagan Kinali, Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat Sumatera Barat	Koto Balingga	PRODUKSI	Ditetujui	Rp	1.528.596.176	Rp	448.596.176	8	0	0	0
Triwulan II	ANDALAS AGRO INDUSTRI	10431	Industri Minyak Mentah Kelapa Sawit (Crude Palm Oil)	PMA	Air Bau Jorong VI Koto Selatan Nagan Kinali, Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat Sumatera Barat	Kinali	PRODUKSI	Ditetujui	Rp	40.432.101.138	Rp	352.315.880	110	0	0	0
Triwulan II	ANDALAS AGRO INDUSTRI	10431	Industri Minyak Mentah Kelapa Sawit (Crude Palm Oil)	PMA	Air Bau Jorong VI Koto Selatan Nagan Kinali, Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat Sumatera Barat	Kinali	PRODUKSI	Ditetujui	Rp	40.432.101.138	Rp	352.315.880	110	0	0	0

Triwulan II	OPTIMA TIRTA ENERGY	35111	Pembangkitan Tenaga Listrik	PMA	Desa Kajar dan Aur Kuning, Kecamatan Telamau dan Pasaman	Telamau	PRODUKSI	Disetujui	Rp	203.000.000.000	Rp	-	29	0	0	0
Triwulan II	TLAJAJA BARI	45407	Reparasi Dan Perawatan Sepeda Motor	PMON	Jl. Lintas Mangapoh - Batang Luan	Pasaman	PRODUKSI	Disetujui	Rp	-	Rp	-	7	0	0	0
Triwulan II	AGRO WIRA LIGATSA	10431	Industri Minyak Mentah Kelapa Sawit (Crude Palm Oil)	PMON	Jorong Simpang Tiga Alin, Nagari Muaro Klawat Kecamatan Gunung Tuleh, Kabupaten Pasaman Barat	Gunung Tuleh	PRODUKSI	Disetujui	Rp	104.824.577.857	Rp	-	106	0	0	0
Triwulan II	EVERBRIGHT	46900	Perdagangan Besar Berbagai Macam Barang	PMON	Jalur 1 No. 14 Jambak Krc. Luhak Nan Duo Kab. Pasaman Barat	Luhak Nan Duo	PRODUKSI	Disetujui	Rp	100.000.000	Rp	-	1	0	0	0
Triwulan II	BINTARA TANI NUSANTARA	10431	INDUSTRI MINYAK MENTAH KELAPA SAWIT (CRUDE PALM OIL)	PMON	Jorong sibumpang	Ranah Barahan	KONSTRUKSI	Disetujui	Rp	344.276.913.960	Rp	-	121	0	0	0
Triwulan II	CIPTA NIAGA SEMESTA	46339	Perdagangan Besar Makanan Dan Minuman Lainnya	PMON	JORONG BANDAREJO NAGARI	Pasaman	PRODUKSI	Disetujui	Rp	1.377.777.778	Rp	-	36	0	0	0
Triwulan II	BIMBO PANJANG SUMBER MAKMUR	10431	Industri Minyak Mentah Kelapa Sawit (Crude Palm Oil)	PMON	BIMBO PANJANG, JORONG VI KOTO UTARA KENAGARIAN KINALI	Kinali	PRODUKSI	Disetujui	Rp	94.500.000.000	Rp	-	103	0	0	0
Triwulan II	DAYAMITRA TELEKOMUNIKASI	42217	KONSTRUKSI SENTRAL TELEKOMUNIKASI	PMON	Plubang Jorong Kempung Alang, Nagari Kajar, Kec. Telamau	Telamau	PRODUKSI	Disetujui	Rp	169.337.805	Rp	-	2	0	0	0
Triwulan II	USAHA SAWIT MANDIRI	01262	Perkebunan Buah Kelapa Sawit	PMA	PARIT	Koto Balingka	PRODUKSI	Disetujui	Rp	40.000.000.000	Rp	-	250	0	0	0
Triwulan II	USAHA SAWIT MANDIRI	10432	Industri Minyak Mentah Inti Kelapa Sawit (Crude Palm Kernel Oil)	PMA	PARIT	Koto Balingka	PRODUKSI	Disetujui	Rp	25.000.000.000	Rp	-	15	0	0	0
Triwulan II	PASAMAMARAMA SEJAHTERA	10431	INDUSTRI MINYAK MENTAH KELAPA SAWIT (CRUDE PALM OIL)	PMON	ujung gading	Lembah Melintang	KONSTRUKSI	Disetujui	Rp	89.581.989.610	Rp	-	660	0	0	0
Triwulan II	PASAMAMARAMA SEJAHTERA	10437	INDUSTRI MINYAK GORENG KELAPA SAWIT	PMON	ujung gading	Lembah Melintang	KONSTRUKSI	Disetujui	Rp	89.581.989.610	Rp	-	660	0	0	0
Triwulan II	PASAMAMARAMA SEJAHTERA	01262	Perkebunan Buah Kelapa Sawit	PMON	Lembah Melintang	Sungai Aur	KONSTRUKSI	Disetujui	Rp	65.956.402.470	Rp	-	880	0	0	0
Triwulan II	TRI BAUTERA SRIKANDI	01262	PERKEBUNAN BUAH KELAPA SAWIT	PMON	Jorong Taming	Ranah Barahan	PRODUKSI	Disetujui	Rp	3.510.024.000	Rp	-	40	0	0	0
Triwulan II	PASAMAMARAMA SEJAHTERA	01262	Perkebunan Buah Kelapa Sawit	PMON	ujung gading	Lembah Melintang	KONSTRUKSI	Disetujui	Rp	65.956.402.470	Rp	-	660	0	0	0
Triwulan II	DIPO INTERNASIONAL PAHALA OTOMOTIF	45104	PERDAGANGAN ECERAN MOBIL BEKAS	PMON	Jl. Jenderal Sudirman KM 1, Jorong Simpang Empat, Nagari Lingkang Aua	Pasaman	KONSTRUKSI	Disetujui	Rp	400.000.000.000	Rp	-	7	0	0	0
Triwulan II	BAKRIE PASAMAN PLANTATIONS	01262	Perkebunan Buah Kelapa Sawit	PMON	Nagari Koto Tuo, Kecamatan Koto Balingka, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat	Koto Balingka	PRODUKSI	Disetujui	Rp	30.818.295.980	Rp	-	1298	0	0	0
Triwulan II							KONSTRUKSI		Rp	-	Rp	-	NAN	0	NAN	0
Triwulan I	BAKRIE PASAMAN PLANTATIONS	10431	Industri Minyak Mentah Kelapa Sawit (Crude Palm Oil)	PMON	Nagari Koto Tuo, Kecamatan Koto Balingka, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat	Koto Balingka	PRODUKSI	Disetujui	Rp	30.818.295.980	Rp	574.699.916.503	1298	254	0	0
Triwulan I	TULAS SAKTIJAYA	01262	Perkebunan Buah Kelapa Sawit	PMON	Nagari Muaro Klawat	Gunung Tuleh	PRODUKSI	Disetujui	Rp	23.500.000.000	Rp	26.621.276.335	25	52	0	0

Triwulan II	TULAS SAKTIJAYA	01252	Perkebunan Buah Kelapa Sawit	PMON	Nagari Musaro Kiewi	Gumung Tuleh	PRODUKSI	Direktugal	Rp	23.500.000.000	Rp	254.433.964	25	0	0	0
Triwulan II	PRIMATAMA MULLAJAYA	01262	Perkebunan Buah Kelapa Sawit	PMA	Jorong Kampung Pisang	Kinoli	PRODUKSI	Direktugal	Rp	52.601.812.841	Rp	188.050.606	436	0	0	0
Triwulan II	ANDALAS SUMBER LESTARI	02113	Pemanfaatan Kayu hutan tanaman rakyat	PMA	BUKIT MALINTANG	Gumung Tuleh	KONSTRUKSI	Direktugal	Rp	10.000.000.000	Rp	154.608.819	4	0	0	0
Triwulan II	GERSENGO MINANG PLANTATION	30431	Industri Minyak Mentah Kelapa Sawit (Crude Palm Oil)	PMA	Tanjung Pangkal	Pasaman	PRODUKSI	Direktugal	Rp	199.777.146.945	Rp	139.034.981	348	0	0	0
Triwulan II	BUKITINGGI MANDIRI SEJAHTERA	46499	Perdagangan Besar Berbagai Barang Dan Perlengkapan Rumah Tangga Lainnya Yidi	PMON	Jalan Tampunak Jorong IV Koto Barat	Kinoli	PRODUKSI	Direktugal	Rp	156.353.867	Rp	129.575.000	72	0	0	0
Triwulan II	BUKITINGGI MANDIRI SEJAHTERA	46691	Perdagangan Besar Alat Laboratorium, Alat Farmasi Dan Alat kedokteran Untuk Manusia	PMON	Jalan Tampunak Jorong IV Koto Barat	Kinoli	KONSTRUKSI	Direktugal	Rp	567.500.000	Rp	129.575.000	4	0	0	0
Triwulan II	BUKITINGGI MANDIRI SEJAHTERA	46339	Perdagangan Besar Makanan Dan Minuman Lainnya	PMON	Jalan Tampunak Jorong IV Koto Barat	Kinoli	PRODUKSI	Direktugal	Rp	156.353.867	Rp	129.575.000	72	0	0	0
Triwulan II	ANDALAS AGRO INDUSTRI	30432	Industri Minyak Mentah Ind Kelapa Sawit (Crude Palm Kernel Oil)	PMA	Air Rau Jorong VI Kolip Selatan Nagari Kinoli, Kecamatan Kinoli Kabupaten Pasaman Barat Sumatera Barat	Kinoli	PRODUKSI	Direktugal	Rp	10.265.025.285	Rp	72.684.120	60	0	0	0
Triwulan II	GUNUNG SAWIT ABAOI	30431	INDUSTRI MINYAK MENTAH KELAPA SAWIT (CRUDE PALM OIL)	PMA	Bancak Rambat, Jorong Langgam	Kinoli	PRODUKSI	Direktugal	Rp	134.847.835.992	Rp	27.621.874	116	0	0	0
Triwulan II	HAYATI PRATAMA MANDIRI	45407	REPARASI DAN PERAWATAN SEPEDA MOTOR	PMON	Jl lintas manggopoh - simpang empat	Pasaman	PRODUKSI	Direktugal	Rp	9.505.621.572	Rp	5.847.000	47	0	0	0
Triwulan II	HAYATI PRATAMA MANDIRI	45403	PERDAGANGAN ECERAN SEPEDA MOTOR BARU	PMON	Jl lintas manggopoh simpang empat	Pasaman	PRODUKSI	Direktugal	Rp	9.505.621.572	Rp	5.345.000	47	0	0	0
Triwulan II	HAYATI PRATAMA MANDIRI	45407	Reparasi Dan Perawatan Sepeda Motor	PMON	Jl Lintas kinoli kempung dalam	Kinoli	PRODUKSI	Direktugal	Rp	258.671.250	Rp	5.927.000	4	0	0	0
Triwulan II	INTERCOM MOBILINDO	45101	PERDAGANGAN BESAR MOBIL BARU	PMON	Jl. Simpang Empat Manggopoh, Jambak Jalar II)	Luhak Nan Duo	PRODUKSI	Direktugal	Rp	3.295.923.503	Rp	4.036.037	11	2	0	0
Triwulan II	SABANA MITRA SAUDARA	46634	Perdagangan Besar Semen, Kapur, Pasir Dan Batu	PMON	Jl. Lintas Simpang 4 - Ujung Gading Km. 27	Gumung Tuleh	KONSTRUKSI	Direktugal	Rp	200.000.000	Rp	500.000	1	0	0	0
Triwulan II							PRODUKSI	Direktugal	Rp	-	Rp	500.000	NaN	0	NaN	0
Triwulan II							PRODUKSI	Direktugal	Rp	-	Rp	500.000	NaN	0	NaN	0
Triwulan II	DAYA INDAH YASA	47111	Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tambakan Di Minimarket/Supermarket/ty peamarket	PMON	Rulu Simpang Ampok Jhs Lintas Sili Manggopoh	Pasaman	PRODUKSI	Direktugal	Rp	9.885.000.000	Rp	320.000	10	0	0	0
Triwulan II							KONSTRUKSI	Direktugal	Rp	-	Rp	100.000	NaN	0	NaN	0

Triwulan I	PASAMANWARAMA SEJAHTERA	10433	INDUSTRI PEMISAHAN/FRAKSINASI MINYAK MENTAH KELAPA SAWIT DAN MINYAK MENTAH INTI KELAPA SAWIT	PMON		ujung gedung	Lambung Mentang	PRODUKSI	Disebutuji	Rp 89.581.989.610	Rp 15.959.399.067	880	0	0	0
Triwulan I	GUNUNG SAWIT ABADI	10431	INDUSTRI MINYAK MENTAH KELAPA SAWIT (CRUDE PALM OIL)	PMA		Bancak Rambai, Jorong Langgam	Kinali	PRODUKSI	Disebutuji	Rp 134.847.835.992	Rp 12.607.442.274	116	2	0	0
Triwulan I	SARI BUAH SAWIT	10431	Industri Minyak Mentah Kelapa Sawit (Crude Palm Oil)	PMON		Jorong Langgam Sepakat, Nagari Kinali	Kinali	PRODUKSI	Disebutuji	Rp 42.500.000.000	Rp 11.579.004.090	103	2	0	0
Triwulan I	AGROWATAMA	01262	Perkebunan Buah Kelapa Sawit	PMA		Jorong Air Haji, Nagari Ranah Air Haji	Sungai Aur	PRODUKSI	Disebutuji	Rp 42.742.089.000	Rp 10.063.092.818	823	0	0	0
Triwulan I	USAHA SAWIT MANCURI	10431	Industri Minyak Mentah Kelapa Sawit (Crude Palm Oil)	PMA		PABT	Koto Balingka	PRODUKSI	Disebutuji	Rp 170.000.000.000	Rp 8.831.843.532	89	0	0	0
Triwulan I	AGRO WIRA LIGATSA	10431	Industri Minyak Mentah Kelapa Sawit (Crude Palm Oil)	PMON		Jorong Simpang Tiga Alin, Nagari Mazro Klawi Kecamatan Gunung Tuleh, Kabupaten Pasaman Barat	Gunung Tuleh	PRODUKSI	Disebutuji	Rp 104.824.577.857	Rp 8.736.907.727	106	0	0	0
Triwulan I	LAMAS INTERNUSA	01262	Perkebunan Buah Kelapa Sawit	PMON		Desa Sidodadi Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat	Kinali	PRODUKSI	Disebutuji	Rp 177.438.485.990	Rp 4.416.164.286	1246	0	0	0
Triwulan I	GERSINDO MINANG PLANTATION	10431	Industri Minyak Mentah Kelapa Sawit (Crude Palm Oil)	PMA		Tanjung Pangkal	Pasaman	PRODUKSI	Disebutuji	Rp 199.777.146.945	Rp 3.320.474.402	148	10	0	0
Triwulan I	BIKTABA TANI NUSANTARA	10431	INDUSTRI MINYAK MENTAH KELAPA SAWIT (CRUDE PALM OIL)	PMON		JL. DESA AIR RUHONG	Sungai Beremas	PRODUKSI	Disebutuji	Rp 344.276.913.960	Rp 1.950.000.000	622	0	0	0
Triwulan I	ANDALAS AGRO INDUSTRI	10431	Industri Minyak Mentah Kelapa Sawit (Crude Palm Oil)	PMA		Air Rau Jorong VI Koto Selatan Nagari Kinali, Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat Sumatera Barat	Kinali	PRODUKSI	Disebutuji	Rp 40.432.101.138	Rp 1.296.440.274	110	0	0	0
Triwulan I	ANDALAS AGRO INDUSTRI	10431	Industri Minyak Mentah Kelapa Sawit (Crude Palm Oil)	PMA		Air Rau Jorong VI Koto Selatan Nagari Kinali, Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat Sumatera Barat	Kinali	PRODUKSI	Disebutuji	Rp 40.432.101.138	Rp 1.296.440.274	110	0	0	0
Triwulan I	GERSINDO MINANG PLANTATION	01262	Perkebunan Buah Kelapa Sawit	PMA		Tanjung Pangkal	Pasaman	PRODUKSI	Disebutuji	Rp 251.690.233.291	Rp 765.510.416	700	20	0	0
Triwulan I	SAWITA PASAMAN JAYA	10431	Industri Minyak Mentah Kelapa Sawit (Crude Palm Oil)	PMON		Nagari Parit	Koto Balingka	PRODUKSI	Disebutuji	Rp 90.000.000.000	Rp 717.536.585	99	0	0	0
Triwulan I	PERUSAHAAN PERBEROM (PERBERO) PT. PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA	35102	TRANSMISI TENAGA LISTRIK	PMON		Provinsi Sumatera Barat, Kabupaten Pasaman Barat dan Pasaman, Kecamatan Pasaman, Talamau, Lubuk Sikaping, Parit, Kelurahan/Desa Lingkuang Aur, Aur Kuntang, Kajeh, Telo, Sundara, Ala Manggh, Panti Solatan.	Pasaman	KONSTRUKSI	Disebutuji	Rp 2.058.666.961.694	Rp 591.321.454	680	0	0	0

Triwulan I	BUKITTINGGI MANDIRI SEJAHTERA	46442	Perdagangan Besar Obat- Tradisional Untuk Manusia	PMDN	Jalan Tampuniak Jorong IV Koto Barat	Kinali	KONSTRUKSI	Disetujui	Rp	22.000.000	Rp	571.613.634	1	0	0	0
Triwulan I	ANDALAS SUMBER LESTARI	02113	Pernikahan Kavu hutun tanaman rakyat	PMA	BUKIT MALINTANG	Gungung Tuleh	KONSTRUKSI	Disetujui	Rp	10.000.000.000	Rp	515.482.650	4	0	0	0
Triwulan I	YAYASAN RUMAH SAKIT ISLAM SUMATERA BARAT	46103	Aktivitas Rumah Sakit Swasta	PMDN	Jln. M. Nibir No. 01, Pasaman Barat	Pasaman	PRODUKSI	Disetujui	Rp	66.000.000.000	Rp	389.216.591	252	6	0	0
Triwulan I	PERMATA HUALI PASAMAN	01262	Perkebunan Buah Kelapa Sawit	PMA	-	Sesak Ranah Pasise	PRODUKSI	Disetujui	Rp	26.051.323.617	Rp	353.919.243	300	0	0	0
Triwulan I	AGROWIRATAMA	10431	Industri Minyak Mentah Kelapa Sawit (Crude Palm Oil)	PMA	Jorong Air Haji, Nagel Ranah Air Haji	Sungai Aur	PRODUKSI	Disetujui	Rp	58.699.279.000	Rp	282.600.000	190	0	0	0
Triwulan I	ANDALAS AGRO INDUSTRI	10432	Industri Minyak Mentah (M) Kelapa Sawit (Crude Palm Kernel Oil)	PMA	Air Rau Jorong VI Koto Selatan Nagari Kinali, Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat Sumatera Barat	Kinali	PRODUKSI	Disetujui	Rp	10.205.025.285	Rp	257.478.975	60	0	0	0
Triwulan I	BUKITTINGGI MANDIRI SEJAHTERA	46339	Perdagangan Besar Makanan Dan Minuman Lainnya	PMDN	Jalan Tampuniak Jorong IV Koto Barat	Kinali	PRODUKSI	Disetujui	Rp	156.353.867	Rp	156.353.867	72	0	0	0
Triwulan I	BUKITTINGGI MANDIRI SEJAHTERA	46499	Perdagangan Besar Berbagai Barang Dan Perlengkapan Rumah Tangga Lainnya Yudi	PMDN	Jalan Tampuniak Jorong IV Koto Barat	Kinali	PRODUKSI	Disetujui	Rp	156.353.867	Rp	156.353.867	72	2	0	0
Triwulan I	BUKITTINGGI MANDIRI SEJAHTERA	46691	Perdagangan Besar Alat- Laboratorium, Alat Farmasi Dan Alat Kedokteran Untuk Manusia	PMDN	Jalan Tampuniak Jorong IV Koto Barat	Kinali	KONSTRUKSI	Disetujui	Rp	557.500.000	Rp	156.353.867	4	0	0	0
Triwulan I	PEKEBUNAN ANAK NEGERI PASAMAN	01262	Perkebunan Buah Kelapa Sawit	PMA	Desa VI Koto, Anam Koto Selatan	Kinali	PRODUKSI	Disetujui	Rp	17.695.594.837	Rp	134.400.000	0	0	0	0
Triwulan I	PRIMATAMA MULAJAYA	01262	Perkebunan Buah Kelapa Sawit	PMA	Jorong Kampung Pisang	Kinali	PRODUKSI	Disetujui	Rp	57.601.812.841	Rp	53.610.885	436	0	0	0
Triwulan I	INTERCOM MOBILINDO	45101	PERDAGANGAN BESAR MOBIL BARU	PMDN	Jl. Simpang Empat Mangopoh, Jambak Jalur III	Luhak Nam Duo	PRODUKSI	Disetujui	Rp	3.295.923.503	Rp	18.750.601	11	0	0	0
Triwulan I	CIPTA NIAGA SEMESTA	46339	Perdagangan Besar Makanan Dan Minuman Lainnya	PMDN	JORONG BANDASEJO NAGARI	Pasaman	PRODUKSI	Disetujui	Rp	1.377.777.778	Rp	10.494.450	36	0	0	0
Triwulan I							PRODUKSI	Disetujui	Rp	-	Rp	10.000.000	NaN	0	NaN	0
Triwulan I	FIYATI PRATAMA MANDIRI	45407	REPARASI DAN PERAWATAN SEPEDA MOTOR	PMDN	Jl Intas mangopoh - simpang empat	Pasaman	PRODUKSI	Disetujui	Rp	9.505.621.572	Rp	7.373.728	47	0	0	0
Triwulan I	SARANA MITRA SALEBARA	46634	Perdagangan Besar Semen, Kapur, Pasir Dan Batu	PMDN	Jl. Lintas Simpang 4 - Ujung Gading Km. 27	Gunung Tuleh	KONSTRUKSI	Disetujui	Rp	200.000.000	Rp	4.887.387	1	0	0	0
Triwulan I	DAYA INDAH YASA	47111	Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tambakau Di Minimarket/Supermarket/7-11 permarket	PMDN	Ruko Simpang Ampak Jln. Lintas Sisi Mangopoh,	Pasaman	PRODUKSI	Disetujui	Rp	9.885.000.000	Rp	1.468.900	10	0	0	0
Triwulan I							PRODUKSI	Disetujui	Rp	-	Rp	50.000	NaN	0	NaN	0

Triwulan I	SABANA MITRA SALUDARA	23963	Industri Barang Dier Batu Untuk Keperluan Rumah Tinggal, Pajangan, dan Bahan Bangunan	PMON	Jl. Lintas Simpang Empat-Ujung Gading	Gunung Tuleh	KONSTRUKSI	Disetujui	Rp	1.000.000.000	Rp	-	2	0	0	0
Triwulan I	INTI BANGUN SELAJTERA	42206	Konstruksi Sentral Telekomunikasi	PMON	RT 03 Kampung V Kajorongan Mahakarya Nagari Koto Baru Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat	Luhak Nan Duo	PRODUKSI	Disetujui	Rp	1.326.023.234	Rp	-	1	0	0	0
Triwulan I	BINTARA TANI NUSANTARA	01262	Perkebunan Buah Kelapa Sawit	PMON	JL. DESA AIR RUNDING	Sungai Beremas	KONSTRUKSI	Disetujui	Rp	344.276.913.960	Rp	-	622	0	0	0
Triwulan I	BINTARA TANI NUSANTARA	10431	INDUSTRI MINYAK MENTAH KELAPA SAWIT (CRUDE PALM OIL)	PMON	Jorong Siduampan	Ranah Batahan	KONSTRUKSI	Disetujui	Rp	344.276.913.960	Rp	-	121	0	0	0
Triwulan I	BINTARA TANI NUSANTARA	01262	Perkebunan Buah Kelapa Sawit	PMON	Jorong Siduampan	Ranah Batahan	KONSTRUKSI	Disetujui	Rp	344.276.913.960	Rp	-	751	0	0	0
Triwulan I	SABANA MITRA SALUDARA	19291	Industri Produk Dari Hasil Kilang Minyak Bumi	PMON	Jl. Lintas Simpang Empat-Ujung Gading	Gunung Tuleh	KONSTRUKSI	Disetujui	Rp	1.000.000.000	Rp	-	3	0	0	0
Triwulan I	HAYATI PRIATAMA MANDIRI	45407	Reparasi Dan Perawatan Sepeda Motor	PMON	Jl. Lintas Kinali kampung dalam	Kinali	PRODUKSI	Disetujui	Rp	258.671.250	Rp	-	NaN	0	NaN	0
Triwulan I	USAHA SAWIT MANDIRI	10432	Industri Minyak Mentah Inti Kelapa Sawit (Crude Palm Kernel Oil)	PMA	PAKIT	Koto Balingka	PRODUKSI	Disetujui	Rp	25.000.000.000	Rp	-	15	0	0	0
Triwulan I	CENTRATAMA MENARA INDONESIA	42206	Konstruksi Sentral Telekomunikasi	PMON	Jorong Tonbrang Padang Hiller Nagari Aua	Sungai Aur	KONSTRUKSI	Disetujui	Rp	550.000.000	Rp	-	1	0	0	0
Triwulan I	TELEKOMUNIKASI SELULAR	42206	Konstruksi Sentral Telekomunikasi	PMA	Jalan Simpang Empat Timur Jorong Kampung Cubadak Nagari Lingsuang Aua,	Pasaman	KONSTRUKSI	Disetujui	Rp	-	Rp	-	4	0	0	0
Triwulan I	BERKAT SAWIT SELAJTERA	01262	Perkebunan Buah Kelapa Sawit	PMA	MUARO KAWAI	Gunung Tuleh	PRODUKSI	Disetujui	Rp	170.000.000.000	Rp	-	0	0	0	0
Triwulan I	USAHA SAWIT MANDIRI	01262	Perkebunan Buah Kelapa Sawit	PMA	PAKIT	Koto Balingka	PRODUKSI	Disetujui	Rp	40.000.000.000	Rp	-	250	0	0	0
Triwulan I	NIAGATAMA KENCANA	52101	PERGUDANGAN DAN PENYIMPANAN	PMON	Tampuhak Kajorangan IV Koto Barat	Kinali	PRODUKSI	Disetujui	Rp	676.320.000	Rp	-	2	0	0	0
Triwulan I	BERKAT SAWIT SELAJTERA	10432	Industri Minyak Mentah Inti Kelapa Sawit (Crude Palm Kernel Oil)	PMA	MUARO KAWAI	Gunung Tuleh	PRODUKSI	Disetujui	Rp	25.000.000.000	Rp	-	15	0	0	0
Triwulan I	PASAMMANMARAMA SELAJTERA	10437	INDUSTRI MINYAK GORENG KELAPA SAWIT	PMON	ujung gading	Lembah Melintang	KONSTRUKSI	Disetujui	Rp	89.581.989.610	Rp	-	880	0	0	0
Triwulan I	PASAMMANMARAMA SELAJTERA	01262	Perkebunan Buah Kelapa Sawit	PMON	ujung gading	Lembah Melintang	KONSTRUKSI	Disetujui	Rp	65.956.402.470	Rp	-	880	0	0	0
Triwulan I	EVERBRIGHT	40900	Pendagangan Besar Berbagai Macam Barang	PMON	Jalur 1 No. 14 Jambak Kec. Luhak Nan Duo Kab. Pasaman Barat	Luhak Nan Duo	PRODUKSI	Disetujui	Rp	100.000.000	Rp	-	1	0	0	0
Triwulan I	PASAMMANMARAMA SELAJTERA	10431	INDUSTRI MINYAK MENTAH KELAPA SAWIT (CRUDE PALM OIL)	PMON	ujung gading	Lembah Melintang	KONSTRUKSI	Disetujui	Rp	89.581.989.610	Rp	-	880	0	0	0
Triwulan I	TAHAJA BARU	45407	Reparasi Dan Perawatan Sepeda Motor	PMON	Jl. Lintas Manggopoh - Batang Luan	Pasaman	PRODUKSI	Disetujui	Rp	-	Rp	-	7	0	0	0
Triwulan I	DIPO INTERNASIONAL PAHALA OTOMOTIF	45104	PERDAGANGAN ECERAN MOBIL BEKAS	PMON	Jl. Jendral Sudirman KM 1, Jorong Simpang Empat, Nagari Lingsuang Aua	Pasaman	KONSTRUKSI	Disetujui	Rp	400.000.000.000	Rp	-	7	0	0	0

Triwulan I	NIAGATAMA KENCANA	68110	REAL ESTAT YANG DIMILIKI SENDIRI ATAU DISEWA	PMON	Jl. Tampunjak Jorong IV Koto Barat	Kinali	PRODUKSI	Disetujui	Rp	63.940.000	Rp	-	1	0	0	0
Triwulan I	OPTIMA TIETA ENERGY	35111	Pembangkitan Tenaga Listrik	PMIA	Desa Kajal dan Aur Kuning, Kecamatan Talamau dan, Pasaman	Talamau	PRODUKSI	Disetujui	Rp	203.000.000.000	Rp	-	29	0	0	0
Triwulan I	HAYATI PRATAMA MANDIRI	45403	Perdagangan Eceran Sepeda Motor Baru	PMON	Jl Lintas kinali kampung dalam	Kinali	PRODUKSI	Disetujui	Rp	61.671.250	Rp	-	10	0	0	0
Triwulan I	HAYATI PRATAMA MANDIRI	45403	PERDAGANGAN EGERAN SEPEDA MOTOR BARU	PMON	Jl lintas manggopoh simpang empat	Pasaman	PRODUKSI	Disetujui	Rp	9.505.621.572	Rp	-	47	0	0	0
Triwulan I	DAYAMITRA TELEKOMUNIKASI	42217	KONSTRUKSI SENTRAL TELEKOMUNIKASI	PMON	Pluang Jorong Kampung Alang, Nagari Kajal, Kec. Talamau	Talamau	PRODUKSI	Disetujui	Rp	169.337.805	Rp	-	2	0	0	0
Triwulan I	INTI BANGUN SELAHTEHA	42206	Konstruksi Sentral Telekomunikasi	PMON	Alamanda Jorong Bunuk, Nagari Kinali, Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat.	Kinali	KONSTRUKSI	Disetujui	Rp	1.425.728.823	Rp	-	1	0	0	0
Triwulan I	HAYATI PRATAMA MANDIRI	45406	Perdagangan Eceran Suku Cadang Sepeda Motor Dan Aksesorisnya	PMON	Jl LINTAS KINALI KAMPUNG DALAM	Kinali	PRODUKSI	Disetujui	Rp	61.671.250	Rp	-	2	0	0	0
Triwulan I							KONSTRUKSI	Disetujui	Rp	-	Rp	-	NaN	0	NaN	0
Triwulan I	HAYATI PRATAMA MANDIRI	45406	PERDAGANGAN EGERAN SUPU CADANG SEPEDA MOTOR DAN AKSESORINYA	PMON	Jln Lintas Manggopoh - Simpang Empat	Pasaman	PRODUKSI	Disetujui	Rp	9.505.621.572	Rp	-	47	0	0	0
Triwulan I	RIMBO PANJANG SUMBER MAKMUR	10431	Industri Minyak Mentah Kelapa Sawit (Crude Palm Oil)	PMON	RIMBO PANJANG, JORONG VI KOTO UTARA KENAGARIAN KINALI	Kinali	PRODUKSI	Disetujui	Rp	94.500.000.000	Rp	-	103	0	0	0
TOTAL REALISASI INVESTASI									Rp	26.555.728.909.565	Rp	1.317.369.874.598				
TARGET REALISASI INVESTASI									Rp	1.414.500.000.000	Rp	95%				
PERSENTASE CAPAIAN REALISASI INVESTASI																







LAPORAN HASIL EVALUASI
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
TAHUN 2023
NOMOR : 700.1.2.1/06/Inspekt-LHE/IX/2023
TANGGAL : 18 SEPTEMBER 2023

Daftar Isi	Halaman
I. BAB I Pendahuluan.....	1
A. Dasar Hukum Evaluasi.....	1
B. Latar Belakang Evaluasi	1
C. Tujuan Evaluasi	2
D. Ruang Lingkup Evaluasi	2
E. Metodologi dan Penilaian.....	2
F. Gambaran Umum Perangkat Daerah.....	4
G. Gambaran Umum Implementasi SAKIP.....	5
H. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya	6
II. BAB II Gambaran Hasil Evaluasi	8
A. Kondisi Hasil Evaluasi AKIP.....	8
III. BAB III Penutup	16
A. Simpulan	16
B. Dorongan terhadap Implementasi SAKIP yang Lebih Baik	17

LAPORAN HASIL EVALUASI
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PASAMAN BARAT
TAHUN 2023

BAB. I
PENDAHULUAN

A. Dasar Hukum Evaluasi

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata cara tentang revidi atas laporan kinerja Instansi Pemerintah ;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Instansi Pemerintah;
6. Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor : 100.3.3.2/335/BUP-PASBAR/2023 tentang Penetapan Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Resiko pada Inspektorat Kabupaten Pasaman Barat.
7. Surat Perintah Tugas Inspektur Nomor : SPT. 000.1.2/759/INSPEKT – 2023 tanggal 1 Agustus 2023

B. Latar Belakang Evaluasi

Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan Reformasi Birokrasi, untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, pemerintahan yang kapabel, serta meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Untuk mengetahui sejauh mana implementasi SAKIP dilaksanakan, serta untuk mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat

sasaran dan berorientasi hasil, maka perlu dilakukan evaluasi AKIP atau evaluasi atas implementasi SAKIP.

Evaluasi AKIP ini diharapkan dapat mendorong setiap instansi pemerintah untuk berkomitmen dan secara konsisten meningkatkan implementasi SAKIP dalam mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang telah direncanakan.

C. Tujuan Evaluasi

Tujuan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2023 adalah :

1. Memperoleh informasi tentang implementasi Sistem AKIP;
2. Menilai tingkat implementasi SAKIP;
3. Menilai tingkat akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
4. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP; dan
5. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

D. Ruang Lingkup Evaluasi

Ruang Lingkup evaluasi meliputi :

1. Penilaian kualitas perencanaan kinerja yang selaras yang akan dicapai untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan;
2. Penilaian pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan yang telah menjadi kebutuhan dalam penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja;
3. Penilaian pelaporan kinerja yang menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, baik keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya yang memberikan dampak besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya;
4. Penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang memberikan kesan nyata (dampak) dalam peningkatan implementasi SAKIP untuk efektifitas dan efisiensi kinerja; dan penilaian capaian kinerja atas output dan outcome serta kinerja lainnya.

E. Metodologi dan Penilaian

Metodologi evaluasi AKIP dilakukan dengan cara kombinasi dari metodologi kualitatif dan kuantitatif dengan mempertimbangkan segi kepraktisan dan kegunaan (kemanfaatan) sesuai dengan tujuan evaluasi yang diterapkan dan mempertimbangkan kendala yang ada sehingga dapat menghasilkan rekomendasi untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja.

Teknik evaluasi yang digunakan, antara lain checklist pengumpulan data informasi, komunikasi melalui tanya dan jawab sederhana, observasi, dan studi dokumentasi

Penilaian dilakukan pada sub-komponen evaluasi AKIP, dan setiap sub-komponen dinilai berdasarkan pemenuhan kualitas dari kriteria. Sub-komponen akan dinilai dengan pilihan jawaban AA/A/BB/B/CC/C/D/E, jika kondisi atau gambaran kriteria sesuai dengan gradasi nilai sebagai berikut :

AA (Bobot nilai 100)	<u>Aspek Keberadaan :</u> Jika seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) dan telah dipertahankan dalam setidaknya 5 tahun terakhir. <u>Aspek Kualitas dan Pemanfaatan :</u> Jika kualitas seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) dan terdapat upaya inovatif serta layak menjadi percontohan secara nasional.
A (Bobot nilai 90)	<u>Aspek Keberadaan :</u> Jika seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) dan telah dipertahankan dalam setidaknya 1 tahun terakhir. <u>Aspek Kualitas dan Pemanfaatan :</u> Jika kualitas seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) dan terdapat beberapa upaya yang bisa dihargai dari pemenuhan kriteria tersebut.
BB (Bobot nilai 80)	Jika kualitas seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) sesuai dengan mandat kebijakan.
B (Bobot nilai 70)	Jika kualitas sebagian besar kriteria telah terpenuhi (>75%-100%).
CC (Bobot nilai 60)	Jika kualitas sebagian terpenuhi (>50%-75%).
C (Bobot nilai 50)	Jika kualitas sebagian terpenuhi (>25%-50%).
D (Bobot nilai 30)	Jika kriteria penilaian akuntabilitas kinerja telah mulai dipenuhi (>0%-25%).
E (Bobot nilai 0)	Jika sama sekali tidak ada upaya dalam pemenuhan kriteria penilaian akuntabilitas kinerja.

Setiap sub-komponen kriteria yang telah diberikan nilai dalam pemenuhan kriteria harus dilengkapi dengan catatan berupa keterangan beserta bukti daftar dokumen yang mendukung dan relevan. Nilai pada sub-komponen yang telah terisi akan terakumulasi sehingga diperoleh nilai total (hasil akhir) di setiap komponen.

Nilai hasil akhir dari penjumlahan komponen-komponen memberikan gambaran tingkat AKIP, dengan kategori predikat sebagai berikut :

Predikat	Interprestasi
AA Nilai > 90 - 100	Sangat Memuaskan Telah terwujud <i>Good Governance</i> . Seluruh kinerja dikelola dengan sangat memuaskan di seluruh unit kerja. Telah terbentuk pemerintah yang yang dinamis, adaptif, dan efisien (<i>Reform</i>). Pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level individu
A Nilai >80 - 90	Memuaskan Terdapat gambaran bahwa instansi pemerintah/unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 4/Pengawas/Subkoordinator
BB Nilai >70 - 80	Sangat Baik Terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik pada 2/3 unit kerja, baik itu unit kerja utama, maupun unit kerja pendukung. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan
B Nilai >60 - 70	Baik Terdapat gambaran bahwa AKIP sudah baik pada 1/3 unit kerja, khususnya pada unit kerja utama. Terlihat masih perlu adanya sedikit perbaikan pada unit kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja. Pengukuran kinerja baru dilaksanakan sampai dengan level eselon 2/unit kerja
CC Nilai >50 - 60	Cukup (Memadai) Terdapat gambaran bahwa AKIP cukup baik. Namun demikian, masih perlu banyak perbaikan walaupun tidak mendasar khususnya akuntabilitas kinerja pada unit kerja
C Nilai >30 - 50	Kurang Sistem dan tatanan dalam AKIP kurang dapat diandalkan. Belum terimplementasi sistem manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan mendasar di level pusat
D Nilai >0 - 30	Sangat Kurang Sistem dan tatanan dalam AKIP sama sekali tidak dapat diandalkan. Sama sekali belum terdapat penerapan manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan/perubahan yang sifatnya sangat mendasar, khususnya dalam implementasi SAKIP

F. Gambaran Umum Perangkat Daerah

Sesuai dengan amanat Undang – undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal, dinyatakan bahwa Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan perangkat daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Penanaman Modal di daerah. Atas dasar amanat tersebut, dalam melaksanakan tanggung

jawab serta sebagai upaya pencapaian visi dan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu selalu berupaya untuk terus meningkatkan kinerjanya sebagai lembaga Penanaman Modal dan investasi yang handal dengan menjadikan organisasi Penanaman Modal dalam semua aspek termasuk Pelayanan Perizinan Dalam lima tahun ke depan, memprioritaskan pada Peningkatan Investasi Daerah dan Pelayanan Perizinan yang Berkualitas.

G. Gambaran Umum Implementasi SAKIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman Barat.

Implementasi SAKIP pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman Barat tahun 2022 dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Perencanaan Kinerja

Dokumen Perencanaan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu telah tersedia. Dokumen Perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang Spesifik, Measurable, Achievable, Reliable dan Timebond (SMART), menggunakan penyelarasan (cascading) disetiap level secara logis. Perencanaan Kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan, namun setiap unit/satuan kerja belum memahami dan peduli, serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan.

2. Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja secara umum pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sudah dilakukan. Pengukuran kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan kinerja secara efektif dan efisien dan telah dilakukan secara berjenjang, data kinerja yang dikumpulkan telah relevan untuk mengukur capaian kinerja yang diharapkan, telah menggunakan teknologi informasi (aplikasi) dalam pengumpulan data kinerja, namun belum memanfaatkan teknologi informasi dalam pengukuran data kinerja.

Pemanfaatan pengukuran kinerja sudah dijadikan dasar dalam pemberian Reward dan Punishment, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien, telah menjadi dasar dalam penempatan / penghapusan Jabatan baik struktural maupun fungsional, namun belum mempengaruhi penyesuaian (refocusing) organisasi, pengukuran kinerja belum mempengaruhi penyesuaian kebijakan dalam mencapai

kinerja, dan setiap pegawai belum peduli atas hasil pengukuran kinerja (belum ada laporan kinerja pegawai per triwulan).

3. Pelaporan Kinerja

Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sudah terdapat Dokumen Laporan yang menggambarkan Kinerja, pada sub komponen kualitas dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi Standar yang menggambarkan Kualitas atas Pencapaian Kinerja, telah memuat informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya telah menginformasikan perbaikan/penyempurnaannya.

Pelaporan Kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya, Penyajian informasi dalam laporan kinerja telah menjadi perhatian utama pimpinan, telah menjadi kepedulian seluruh pegawai, telah digunakan dalam penyesuaian aktivitas untuk mencapai kinerja, namun belum mampu mempengaruhi budaya kinerja organisasi.

4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu telah dilaksanakan. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berkualitas dengan Sumber Daya yang memadai, namun belum memanfaatkan teknologi informasi dalam melaksanakan evaluasi akuntabilitas kinerja internal. Implementasi SAKIP pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu telah mengalami peningkatan sehingga memberikan kesan yang nyata dalam efektivitas dan efisiensi kinerja, namun hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal belum dimanfaatkan untuk menetapkan inovasi/budaya kerja/pengendalian untuk peningkatan akuntabilitas internal.

H. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi SAKIP Tahun Sebelumnya

Dari 8 (delapan) rekomendasi tahun sebelumnya, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu telah menindaklanjuti yaitu memformalkan Perjanjian Kinerja (PK) dan telah dipublikasikan ke website, telah membuat SOP pengumpulan data kinerja, telah meningkatkan kualitas pelaporan kinerja melalui pemberian informasi terkait dengan perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah dan perbandingan realisasi kinerja di level provinsi/nasional serta pemberian informasi

tentang efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja, serta telah menyediakan pedoman untuk evaluasi akuntabilitas kinerja internal.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu belum memanfaatkan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja, belum meningkatkan pemanfaatan pengukuran kinerja untuk refocusing, belum memanfaatkan pelaporan kinerja untuk mempengaruhi budaya kinerja, serta belum memanfaatkan teknologi informasi dalam pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja internal.

BAB II

GAMBARAN HASIL EVALUASI

A. Kondisi Hasil Evaluasi AKIP

Evaluasi dilaksanakan terhadap Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal. Hasil evaluasi dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari 0 sampai dengan 100, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman Barat mendapat nilai **75,35** dengan kategori : **BB** , dengan rincian hasil penilaian sebagai berikut :

No	Komponen Yang Dinilai	Bobot	Nilai 2023
1.	Perencanaan Kinerja	30,00	24,60
2.	Pengukuran Kinerja	30,00	20,70
3.	Pelaporan Kinerja	15,00	11,55
4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25,00	18,50
	Jumlah Hasil Evaluasi Kinerja	100,00	
	Nilai Hasil Evaluasi SAKIP		75,35
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja (Kategori)		BB

Nilai sebagaimana tersebut di atas, merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja dan capaian kinerja pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman Barat dengan penjelasan sebagai berikut :

I. Perencanaan Kinerja

Evaluasi terhadap perencanaan kinerja dengan bobot penilaian sebesar 30 dari 100, Sub komponen yang dievaluasi meliputi penilaian atas keberadaan dokumen perencanaan kinerja, kualitas dokumen perencanaan kinerja dan pemanfaatan dokumen perencanaan kinerja. Hasil Evaluasi terhadap perencanaan kinerja pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman Barat mendapatkan nilai 24,60 (maksimal bobot 30,00), yang ditunjukkan dengan kondisi sebagai berikut :

a) Keberadaan

Hasil evaluasi terhadap keberadaan dokumen perencanaan kinerja pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman Barat mendapat nilai 6,00 (maksimal bobot 6,00), dengan uraian sebagai berikut :

Semua kriteria yang sudah terpenuhi

- 1) Sudah terdapat pedoman teknis
- 2) Sudah terdapat dokumen perencanaan kinerja jangka panjang.
- 3) Sudah terdapat dokumen perencanaan kinerja jangka menengah.
- 4) Sudah terdapat dokumen perencanaan kinerja jangka pendek.
- 5) Sudah terdapat dokumen perencanaan aktivitas yang mendukung kinerja.
- 6) Sudah terdapat dokumen perencanaan anggaran yang mendukung kinerja

b) Kualitas

Hasil evaluasi terhadap kualitas dokumen Perencanaan Kinerja di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mendapatkan nilai 8,10 (maksimal bobot 9,00) dengan uraian sebagai berikut ;

Semua kriteria yang telah terpenuhi:

- 1) Dokumen Perencanaan Kinerja telah diformalkan
- 2) Dokumen Perencanaan Kinerja telah dipublikasikan tepat waktu
- 3) Dokumen Perencanaan Kinerja telah menggambarkan kebutuhan atas kinerja sebenarnya yang perlu dicapai
- 4) Kualitas Rumusan Hasil (Tujuan/Sasaran) telah jelas menggambarkan kondisi kinerja yang akan dicapai.
- 5) Ukuran Keberhasilan (Indikator Kinerja) telah memenuhi kriteria SMART.
- 6) Indikator Kinerja Utama (IKU) telah menggambarkan kondisi Kinerja Utama yang harus dicapai, tertuang secara berkelanjutan (sustainable - tidak sering diganti dalam 1 periode Perencanaan Strategis).
- 7) Target yang ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja dapat dicapai (achievable), menantang, dan realistis.
- 8) Setiap Dokumen Perencanaan Kinerja menggambarkan hubungan yang berkesinambungan, serta selaras antara Kondisi/Hasil yang akan dicapai di setiap level jabatan (Cascading).

- 9) Perencanaan kinerja dapat memberikan informasi tentang hubungan kinerja, strategi, kebijakan, bahkan aktivitas antar bidang/dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan (Crosscutting)
 - 10) Setiap unit/satuan kerja merumuskan dan menetapkan Perencanaan Kinerja
 - 11) Setiap pegawai merumuskan dan menetapkan Perencanaan Kinerja
- c) Pemanfaatan
- Hasil evaluasi terhadap pemanfaatan dokumen Perencanaan Kinerja pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah dengan nilai 10,5 (maksimal bobot 15,00), dengan uraian sebagai berikut :
- Kriteria yang sudah dipenuhi :
- 1) Anggaran yang ditetapkan telah mengacu pada Kinerja yang ingin dicapai.
 - 2) Aktivitas yang dilaksanakan telah mendukung Kinerja yang ingin dicapai.
 - 3) Target yang ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja telah dicapai dengan baik, atau setidaknya masih on the right track
 - 4) Rencana aksi kinerja dapat berjalan dinamis karena capaian kinerja selalu dipantau secara berkala.
 - 5) Terdapat perbaikan/penyempurnaan Dokumen Perencanaan Kinerja (DPA) yang terjadi dalam rangka mewujudkan kondisi/hasil yang lebih baik.
 - 6) Setiap Pegawai memahami dan peduli, serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan
- Kriteria yang belum dipenuhi :
- 1) Setiap unit/satuan kerja belum memahami dan peduli, serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan.

II. Pengukuran Kinerja

Evaluasi terhadap pengukuran kinerja dengan bobot penilaian sebesar 30 dari 100, Sub komponen yang dievaluasi meliputi penilaian atas keberadaan dokumen pengukuran kinerja, kualitas dokumen pengukuran kinerja dan pemanfaatan dokumen pengukuran kinerja. Hasil Evaluasi terhadap pengukuran kinerja pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman Barat mendapatkan nilai 20,70 (maksimal bobot 30,00), yang ditunjukkan dengan kondisi sebagai berikut :

a) Keberadaan

Hasil evaluasi terhadap keberadaan dokumen pengukuran kinerja pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman Barat mendapat nilai 5,40 (maksimal bobot 6,00), dengan uraian sebagai berikut :

Semua kriteria sudah dipenuhi :

- 1) Terdapat pedoman teknis pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja.
- 2) Terdapat Definisi Operasional yang jelas atas kinerja dan cara mengukur indikator kinerja.
- 3) Terdapat mekanisme yang jelas terhadap pengumpulan data kinerja yang dapat diandalkan.

b) Kualitas

Hasil evaluasi terhadap keberadaan kualitas dokumen pengukuran kinerja pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman Barat mendapat nilai 6,30 (maksimal bobot 9,00), dengan uraian sebagai berikut :

Kriteria yang sudah dipenuhi :

- 1) Pimpinan selalu terlibat sebagai pengambil keputusan dalam mengukur capaian kinerja (belum melampirkan dokumentasi)
- 2) Data kinerja yang dikumpulkan telah mendukung capaian kinerja yang diharapkan
- 3) Pengukuran kinerja telah dilakukan secara berkala
- 4) Setiap level organisasi telah melakukan pemantauan atas pengukuran capaian kinerja unit dibawahnya secara berjenjang
- 5) Pengumpulan data kinerja telah memanfaatkan Teknologi Informasi
- 6) Data kinerja yang dikumpulkan telah relevan untuk mengukur capaian kinerja yang diharapkan

Kriteria yang belum terpenuhi:

- 1) Pengukuran data kinerja belum memanfaatkan Teknologi Informasi

c) Pemanfaatan

Hasil evaluasi terhadap pemanfaatan pengukuran kinerja pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman Barat mendapat nilai 9,00 (maksimal bobot 15,00), dengan uraian sebagai berikut :

Kriteria yang sudah dipenuhi :

- 1) Pengukuran Kinerja telah menjadi dasar dalam penyesuaian (pemberian/pengurangan) tunjangan kinerja/penghasilan
- 2) Pengukuran Kinerja telah menjadi dasar dalam penempatan / penghapusan Jabatan baik struktural maupun fungsional
- 3) Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian Strategi dalam mencapai kinerja
- 4) Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian Aktivitas dalam mencapai kinerja.
- 5) Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian Anggaran dalam mencapai kinerja.
- 6) Terdapat efisiensi atas penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja.
- 7) Setiap pegawai memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja.

Kriteria yang belum dipenuhi :

- 1) Pengukuran kinerja belum mempengaruhi penyesuaian (Refocusing) Organisasi.
- 2) Pengukuran kinerja belum mempengaruhi penyesuaian Kebijakan dalam mencapai kinerja
- 3) Setiap unit/satuan kerja belum memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja.

III. Pelaporan Kinerja

Evaluasi terhadap pelaporan kinerja dengan bobot penilaian sebesar 15 dari 100, Sub komponen yang dievaluasi meliputi penilaian atas keberadaan dokumen pelaporan kinerja, kualitas dokumen pelaporan kinerja dan pemanfaatan dokumen pelaporan kinerja. Hasil Evaluasi terhadap pelaporan kinerja pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman Barat mendapatkan nilai 11,55 (maksimal bobot 15,00), yang ditunjukkan dengan kondisi sebagai berikut :

a) Keberadaan

Hasil evaluasi terhadap keberadaan dokumen pelaporan kinerja didapat nilai sebesar 2,70 (maksimal bobot 3,00) dengan uraian sebagai berikut :

Semua kriteria yang sudah dipenuhi :

- 1) Dokumen Laporan Kinerja telah disusun.
- 2) Dokumen Laporan Kinerja telah disusun secara berkala.

- 3) Dokumen Laporan Kinerja telah diformalkan.
- 4) Dokumen Laporan Kinerja telah direviu.
- 5) Dokumen Laporan Kinerja telah dipublikasikan.
- 6) Dokumen Laporan Kinerja telah disampaikan tepat waktu.

b) Kualitas

Hasil evaluasi terhadap kualitas dokumen pelaporan kinerja didapat nilai sebesar 3,60 (maksimal bobot 4,50) dengan uraian sebagai berikut :

Semua kriteria sudah dipenuhi :

- 1) Dokumen Laporan Kinerja disusun secara berkualitas sesuai dengan standar
- 2) Dokumen Laporan Kinerja telah mengungkap seluruh informasi tentang pencapaian kinerja
- 3) Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan target tahunan
- 4) Dokumen Laporan Kinerja belum menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah
- 5) Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya
- 6) Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level provinsi/nasional/(Benchmark kinerja)
- 7) Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan kualitas atas capaian kinerja beserta upaya nyata dan/atau hambatannya
- 8) Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja
- 9) Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (Rekomendasi perbaikan kinerja).

c) Pemanfaatan

Hasil evaluasi terhadap pemanfaatan dokumen pelaporan kinerja didapat nilai sebesar 5,25 (maksimal bobot 7,50) dengan uraian sebagai berikut :

Kriteria yang sudah dipenuhi :

- 1) Informasi dalam laporan kinerja berkala telah digunakan dalam penyesuaian penggunaan anggaran untuk mencapai kinerja.

- 2) Informasi dalam laporan kinerja telah digunakan dalam evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja.
- 3) Informasi dalam laporan kinerja telah digunakan dalam penyesuaian perencanaan kinerja yang akan dihadapi berikutnya.
- 4) Informasi dalam laporan kinerja telah menjadi perhatian utama pimpinan (Bertanggung Jawab).
- 5) Penyajian informasi dalam laporan kinerja telah menjadi kepedulian seluruh pegawai.
- 6) Informasi dalam laporan kinerja berkala telah digunakan dalam penyesuaian aktivitas untuk mencapai kinerja.

Kriteria yang belum dipenuhi :

- 1) Informasi dalam laporan kinerja belum mempengaruhi perubahan budaya kinerja organisasi.

IV. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Evaluasi terhadap Komponen Evaluasi Akuntabilitas kinerja internal dengan bobot penilaian sebesar 25 dari 100, Sub komponen yang dievaluasi meliputi penilaian atas keberadaan dokumen Evaluasi Akuntabilitas kinerja internal, kualitas dokumen Evaluasi Akuntabilitas kinerja internal dan pemanfaatan dokumen Evaluasi Akuntabilitas kinerja internal. Hasil Evaluasi terhadap komponen Evaluasi Akuntabilitas kinerja internal pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman Barat mendapatkan nilai 18,50 (maksimal bobot 25,00), yang ditunjukkan dengan kondisi sebagai berikut :

a) Keberadaan

Hasil evaluasi terhadap keberadaan dokumen Evaluasi Akuntabilitas kinerja internal didapat nilai sebesar 4,50 (maksimal bobot 5,00) dengan uraian sebagai berikut :

Semua kriteria telah dipenuhi :

- 1) Telah terdapat pedoman teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.
- 2) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan pada seluruh unit kerja/perangkat daerah
- 3) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berjenjang.

b) Kualitas

Hasil evaluasi terhadap kualitas dokumen Evaluasi Akuntabilitas kinerja internal didapat nilai sebesar 5,25 (maksimal bobot 7,50) dengan uraian sebagai berikut :

Kriteria yang telah dipenuhi :

- 1) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan sesuai standar.
- 2) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan oleh SDM yang memadai
- 3) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan dengan pendalaman yang memadai
- 4) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan pada seluruh unit kerja/perangkat daerah

Kriteria yang belum dipenuhi:

- 1) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal belum dilaksanakan dengan menggunakan Teknologi Informasi (Aplikasi).

c) Pemanfaatan

Hasil evaluasi terhadap pemanfaatan dokumen Evaluasi Akuntabilitas kinerja internal didapat nilai sebesar 8,75 (maksimal bobot 12,50) dengan uraian sebagai berikut :

Kriteria yang sudah dipenuhi :

- 1) Rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja telah ditindaklanjuti
- 2) Telah terjadi peningkatan implementasi SAKIP dengan melaksanakan tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal
- 3) Hasil dari evaluasi akuntabilitas kinerja internal telah dimanfaatkan dalam mendukung efektifitas dan efisiensi kinerja.
- 4) Telah terjadi perbaikan dan peningkatan kinerja dengan memanfaatkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal.

Kriteria yang belum dipenuhi:

- 1) Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja telah dimanfaatkan untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja

BAB. III

PENUTUP

A. Simpulan

Hasil evaluasi AKIP pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Perencanaan kinerja
 - a) Semua kriteria keberadaan dokumen perencanaan kinerja telah terpenuhi 100%
 - b) Semua kriteria kualitas dokumen perencanaan telah terpenuhi 100%
 - c) Kriteria pemanfaatan dokumen perencanaan baru terpenuhi sebesar 87%
2. Pengukuran kinerja
 - a) Semua kriteria keberadaan dokumen pengukuran kinerja telah terpenuhi 100%
 - b) Kriteria kualitas pengukuran kinerja baru terpenuhi sebesar 85%.
 - c) Kriteria pemanfaatan pengukuran kinerja baru terpenuhi sebesar 70%
3. Pelaporan kinerja
 - a) Seluruh kriteria keberadaan dokumen pelaporan kinerja telah terpenuhi 100%
 - b) Seluruh kriteria kualitas pelaporan kinerja telah terpenuhi 100%
 - c) Kriteria pemanfaatan pelaporan kinerja baru terpenuhi 85%.
4. Akuntabilitas kinerja
 - a) Semua kriteria keberadaan dokumen Akuntabilitas kinerja telah terpenuhi 100%
 - b) Kriteria kualitas Akuntabilitas kinerja baru terpenuhi 80%
 - c) Kriteria pemanfaatan Akuntabilitas kinerja baru terpenuhi 80%

B. Dorongan terhadap implementasi SAKIP yang lebih baik

Demikian kami sampaikan hasil evaluasi atas implementasi Sistem AKIP sebagai penerapan manajemen kinerja. Kami menghargai upaya Saudara beserta seluruh jajaran dalam menerapkan Sistem AKIP secara utuh di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman Barat sebagai bagian dari penerapan Reformasi Birokrasi yang dibuktikan dengan hasil evaluasi dengan predikat **SANGAT BAIK**

Harapan Kami di masa yang akan datang kiranya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman Barat dapat lebih meningkatkan predikat kinerjanya, maka kami menyarankan agar :

1. Meningkatkan pemahaman dan kepedulian pegawai terhadap perencanaan kinerja melalui pemantauan kinerja secara berkala
2. Meningkatkan kualitas pengukuran kinerja melalui pemanfaatan teknologi informasi (aplikasi) dalam rangka pengukuran capaian kinerja.
3. Meningkatkan pemanfaatan pengukuran kinerja dengan menjadikan pengukuran kinerja sebagai dasar dalam penyesuaian (refocusing) di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman Barat.
4. Memanfaatkan pengukuran kinerja untuk penyesuaian kebijakan dalam mencapai kinerja
5. Meningkatkan pengukuran kinerja pegawai melalui laporan kinerja triwulan
6. Meningkatkan pemanfaatan pelaporan kinerja sehingga menimbulkan perubahan budaya kinerja pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman Barat.
7. Meningkatkan kualitas akuntabilitas kinerja pemanfaatan teknologi informasi (aplikasi) dalam pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja internal
8. Meningkatkan pemanfaatan kinerja untuk perbaikan akuntabilitas kinerja (misalnya ditetapkan inovasi/budaya kerja/pengendalian)

Demikian Laporan Hasil Evaluasi AKIP pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2023 untuk bahan perbaikan kinerja di masa yang akan datang dan untuk ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi.

PIK INSPEKTUR

EMNITA NADIRUA, SE,MM
NIP. 19750831 200604 2 005

Tembusan kepada Yth:

1. Bupati Pasaman Barat (sebagai laporan);
2. Wakil Bupati Pasaman Barat (sebagai laporan);
3. Sekretaris Daerah Pasaman Barat Cq. Bagian Organisasi;

**HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA
DPMPTSP
TAHUN 2023**

No	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Nilai Akuntabilitas Kinerja			
		2022		2023	
		Bobot	Nilai	Bobot	Nilai
1	Perencanaan Kinerja	30,00	22,80	30,00	24,60
2	Pengukuran Kinerja	30,00	20,40	30,00	20,70
3	Pelaporan Kinerja	15,00	9,60	15,00	11,55
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25,00	17,50	25,00	18,50
Nilai Akuntabilitas Kinerja			70,30		75,35
			BB		BB

No	Catatan
1	Saat wawancara tidak dapat menjelaskan capaian kinerja tanpa melihat SKP
2	Belum ada aplikasi pengukuran data kinerja
3	Belum ada refocusing
4	Belum ada reviu SOP/kebijakan
5	Belum ada laporan kinerja pegawai triwulan
6	Informasi pada laporan kinerja belum mempengaruhi budaya kinerja
7	Belum ada aplikasi evaluasi akuntabilitas kinerja internal
8	Informasi pada laporan kinerja belum mempengaruhi budaya kinerja
9	Belum ada upaya peningkatan akuntabilitas kinerja internal (misalnya ditetapkan inovasi/budaya kerja/pengendalian)

No	Rekomendasi
1	Meningkatkan pemahaman dan kepedulian pegawai terhadap perencanaan kinerja melalui pemantauan kinerja secara berkala
2	Meningkatkan kualitas pengukuran kinerja melalui pemanfaatan teknologi informasi (aplikasi) dalam rangka pengukuran capaian kinerja
3	Meningkatkan pemanfaatan pengukuran kinerja dengan menjadikan pengukuran kinerja sebagai dasar dalam refocusing
4	Memanfaatkan pengukuran kinerja untuk penyesuaian kebijakan dalam mencapai kinerja
5	Meningkatkan pengukuran kinerja pegawai melalui laporan kinerja triwulan
6	Meningkatkan pemanfaatan pelaporan kinerja sehingga menimbulkan perubahan budaya kinerja
7	Meningkatkan kualitas akuntabilitas kinerja pemanfaatan teknologi informasi
8	Meningkatkan pemanfaatan kinerja untuk perbaikan akuntabilitas kinerja (misalnya ditetapkan inovasi/budaya kerja/pengendalian)

8	Untuk Dokumen Perencanaan Kinerja mengartikan hal-hal yang berkaitan dengan, serta antara lain: kondisi/hasil yang akan dicapai di setiap level jabatan (Crossing).	Ya	1			Cascading menunjukkan keterkaitan antara tujuan dengan sasaran dan antara organisasi dengan unit kerja yang lebih tinggi untuk tujuan pencapaian kinerja masing-masing unit kerja (PK dengan Crossing)	Salah karena apabila setiap Dokumen Perencanaan Kinerja menunjukkan hal-hal yang berkaitan dengan, serta antara lain: kondisi/hasil yang akan dicapai di setiap level jabatan (PK dengan Crossing)	
9	Perencanaan kinerja dapat memberikan informasi tentang hal-hal yang berkaitan dengan, serta, kebijakan, tindakan, tindakan antisipasi, strategi, tujuan dan fungsi lain yang berkaitan (Crossing)	Ya	1			Tidak dan apabila sudah dalam pencapaian tujuan SDP perlu dukungan dari SDP lain.	Dengan crossing menunjukkan keterkaitan antara organisasi dengan unit kerja lain untuk pencapaian tujuan dan sasaran kinerja. Contoh pada Cross Performance adalah Program Pengukuran dan Pemantauan Pribadi yang menjadi bagian dari 2 unit kerja yaitu Bidang Pemasaran, Logistik dan Bidang Produksi Pemasaran yang menunjukkan keterkaitan dengan.	Dengan Crossing
10	Untuk unit/level kerja merumuskan dan menetapkan Perencanaan Kinerja.	Ya	1			Perencanaan kerja dibuat setiap 3 bulan sekali dan PK yang dibuat setiap 3 bulan sekali.	Dokumen PK dan kerja yang sudah ditandatangani	
11	Untuk pegawai merumuskan dan menetapkan Perencanaan Kinerja	Ya	1			Pegawai melakukan, fungsi, dan staff merencanakan Perencanaan Kinerja yang dilaksanakan oleh setiap fungsi sehingga kemudian akan pencapaian target kinerja	SDP	
1.4	Perencanaan Kinerja telah dilaksanakan untuk menghasilkan hasil yang berkesinambungan	100%	0	10,3				
Kriteria:								
1	Anggaran yang ditetapkan telah mengacu pada kinerja yang ingin dicapai.	Ya	1			Pengukuran untuk kinerja, target dan subtarget sudah menjadi bagian yang cukup untuk bisa dilaksanakan.	DPA	
2	Anggaran yang ditetapkan telah mendukung kinerja yang ingin dicapai.	Ya	1			Anggaran adalah subtarget dalam sub target (DPA) telah mendukung tujuan kinerja	DPA	
3	Target yang ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja telah dicapai dengan baik, atau setidaknya masih on the right track.	Ya	1			Apabila sudah target dalam PK merupakan target yang baik	Dokumen Capaian tahunan dengan dan rencana kinerja (Cap)	
4	Berapa kali kinerja dapat tercapai dengan secara konsisten untuk mencapai secara baik.	Ya	1			Pengukuran adalah monitoring terhadap Rencana Aksi secara berkala	Dokumen hasil monitoring/evaluasi	
5	Untuk perbaikan/perbaikan Dokumen Perencanaan Kinerja yang ditetapkan dari hasil analisis perbaikan kinerja sebelumnya.	Ya	1			Berikut dokumen perencanaan kinerja jika mendapat pemeliharaan yang baik bisa dihindari	Dokumen hasil monitoring/evaluasi	
6	Untuk perbaikan/perbaikan Dokumen Perencanaan Kinerja dalam mencapai kondisi/hasil yang lebih baik.	Ya	1			Angka sudah menunjukkan/evaluasi telah menunjukkan bahwa/antara SDP lebih baik dari sebelumnya	1. sistemisasi dari data sebelumnya tentang dokumen perencanaan kinerja 2. Dokumen hasil monitoring/evaluasi dan laporan kinerja/hasil/evaluasi	
7	Setiap unit/level kerja melakukan dan pada, serta berkaitan dalam mencapai kinerja yang telah ditetapkan	Tidak	0			Dokumen PK/SDP menunjukkan bahwa SDP berkaitan dalam mencapai kinerja	Unit tersebut sudah dapat melakukan tujuan kinerja target melalui SDP	
8	Setiap Pegawai melakukan dan pada, serta berkaitan dalam mencapai kinerja yang telah ditetapkan	Ya	1			Dokumen PK/SDP menunjukkan bahwa SDP berkaitan dalam mencapai kinerja	SDP/hasil wawancara terkait pencapaian dan pencapaian tujuan kinerja pegawai	
2	PENGUKURAN KINERJA	100%		10,3				
2.4	Pengukuran Kinerja telah dilakukan	100%	A	1,4				
Kriteria:								
1	Untuk pedoman teknis pengukuran kinerja dan pengukuran data kinerja	Ya	1			SDP adalah pengukuran dan pengukuran data kinerja (DPA, laporan, monitoring, hasil analisis fungsi bisnis, dll), PK dan perencanaan/hasil/evaluasi kinerja SDP pengukuran dan kinerja per PK, tidak hanya pengukuran kinerja secara keseluruhan	Dokumen pedoman teknis pengukuran kinerja dan pengukuran data kinerja	
2	Untuk Unit/level Organisasi yang telah ada kinerja dan ada mengukur kinerja	Ya	1			Capaian tercapai pada SDP pada PK	SDP	

[illegible]

[illegible]

4	Dokumen Laporan Kinerja telah mengidentifikasi perkembangan masalah kinerja dengan target jangka menengah	Ya	1		UGP memberikan informasi mengenai target yang akan dicapai pada tahun berakhir pada FY14/Diketahui, kemudian ditandatangani dengan capaian hasil atau masalah kinerja pada tahun berakhir. Setelah capaian kinerja secara keseluruhan (dari awal/periode FY14/Diketahui hingga tahun berakhir) melalui ditandatangani lagi dengan target akhir/awal pada FY14/Diketahui	Ukuran media dokumen UGP
5	Dokumen Laporan Kinerja telah mengidentifikasi perkembangan masalah kinerja	Ya	1		UGP memberikan informasi mengenai target dan masalah kinerja tahun berakhir (tahun 0) dan tahun-tahun sebelumnya (tahun n-1 dan tahun n-2) untuk statistik perkembangan kinerja	Ukuran media dokumen UGP
6	Dokumen Laporan Kinerja telah mengidentifikasi perkembangan masalah kinerja dengan masalah kinerja di level provinsi/daerah/kabupaten/kota	Ya	1		UGP memberikan informasi mengenai perkembangan masalah capaian kinerja CPO/berada dengan data masalah capaian masalah (contoh: data rata-rata capaian Penerimaan subsidi melalui data Kementerian, Badan Pusat Statistik, Lembaga Swasta/Perusahaan Industri, Asosiasi/Kota dalam 1 Provinsi) dan data masalah capaian nasional (contoh: rata-rata capaian lembaga internasional) berdasarkan laporan RPK, ASKASIK, dan World Bank	Ukuran media dokumen UGP
7		Ya	1		UGP memberikan informasi tentang masalah/masalah utama pelaksanaan program/kegiatan/kegiatan pemerintahan, uraian persoalan dari masalah tersebut yang menyebabkan masalah target tidak tercapai sesuai target kinerja	Ukuran media dokumen UGP
8	Dokumen Laporan Kinerja telah mengidentifikasi masalah dan permasalahan yang dihadapi masalah kinerja	Ya	1		UGP memberikan informasi mengenai upaya dan masalah efisiensi kinerja yang seperti karena efisiensi anggaran	Ukuran media dokumen UGP
9	Dokumen Laporan Kinerja telah mengidentifikasi upaya perbaikan dan permasalahan kinerja ke depan (dokumen perkembangan kinerja)	Ya	1		UGP memberikan informasi tentang permasalahan dan hambatan/masalah yang terjadi, uraian mengenai tahun dan tahun CPO	Ukuran media dokumen UGP
10	2.4. Pelaksanaan Kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam pencapaian strategi/kegiatan dalam mencapai kinerja berikutnya	Ya	8	N/A		
Keberhasilan						
1	Dokumen Laporan Kinerja telah menjadi pedoman dalam program (berdasarkan hasil)	Ya	1		Dokumen laporan UGP dan dokumen yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala CPO	Ukuran media dokumen UGP
2	Dokumen Laporan Kinerja telah menjadi pedoman dalam masalah program	Ya	1		Dokumen laporan UGP dan dokumen yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala CPO	Ukuran media dokumen UGP
3	Dokumen Laporan Kinerja telah menjadi pedoman dalam permasalahan kinerja	Ya	1		Dokumen laporan UGP dan dokumen yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala CPO	Ukuran media dokumen UGP
4	Dokumen Laporan Kinerja telah menjadi pedoman dalam permasalahan kinerja	Ya	1		Dokumen laporan UGP dan dokumen yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala CPO	Ukuran media dokumen UGP
5	Dokumen Laporan Kinerja telah menjadi pedoman dalam permasalahan kinerja	Ya	1		Dokumen laporan UGP dan dokumen yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala CPO	Ukuran media dokumen UGP
6	Dokumen Laporan Kinerja telah menjadi pedoman dalam permasalahan kinerja	Ya	1		Dokumen laporan UGP dan dokumen yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala CPO	Ukuran media dokumen UGP

7	Informasi dalam laporan kinerja telah mempengaruhi penilaian kinerja secara integral.	7000	0			Test dari Analisis apakah LARF dapat mempengaruhi kinerja secara integral	Informasi pada laporan kinerja telah mempengaruhi kinerja secara integral	Test praktis untuk KEAKUNTABILAN Internal Pemasokan TI (Akuntabel) Berencana pada proses akuntansi Kerangka Hakimiah Integritas Adaptasi Kedekatan
4	EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL	3500		14.5				
4.1	Penilaian Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan	500	A	4.5				
Kriteria								
1	1. Terjadi penilaian telah dilakukan Akuntabilitas Kinerja Internal	70	1			Adanya pedoman evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang telah dibuat/ditentukan. Evaluasi dilakukan dengan dasar target kinerja yang telah ditetapkan pada Rencana Aksi, sehingga evaluasi dilaksanakan tahunan.		Dokumen pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja OPD
2	2. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan pada seluruh unit kerja/pejabat daerah	70	1			Setiap unit kerja/pejabat melaksanakan/menjabarkan Laporan Evaluasi Kinerja Triwulan, Semester, Tahunan, dan 5 Tahunan secara berkala.		Laporan tahunan
3	3. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berjenjang	70	1			Bagian/Sub Bagian sesuai mekanisme pengumpulan data kinerja SOP secara berjenjang (dari staf ke Sub Bag. > Sekang > Kantor Penerimaan dan Pengiriman barang-barang)		Laporan tahunan
4.1	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berjenjang dengan Sumber Daya yang memadai	750	B	5.25				
Kriteria								
1	1. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan sesuai standar	70	1			Mayoritas terdapat dokumen yang berlaku untuk dengan prosedur/pedoman teknis yang telah ditetapkan		Standar BAKNAS/SOP
2	2. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan oleh SDM yang memadai	70	1			Pelaksana tugas dilakukan oleh pejabat yang memiliki kompetensi dan pernah mengikuti pelatihan/latihan mengenai pengumpulan dan pengumpulan masalah data kinerja. Pejabat Standar 2 dan 3 terdapat dalam pelaksanaan laporan dengan waktu sesuai target pada laporan		Survei dan/atau mengikuti pelatihan
3	3. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan dengan pendanaan yang memadai	70	1			Informasi pada laporan Triwulan harus meliputi target kinerja, masalah kinerja, faktor pendukung, faktor hambatan, dan rekomendasi		Laporan kinerja triwulan
4	4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan pada seluruh unit kerja/pejabat daerah	70	1			Sumber data dari (APORAS) Evaluasi Kinerja Internal terdapat dari semua pengantar PK (Sub Bag/Bag/Pejabat/Pejabat)		Laporan kinerja triwulan
5	5. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan menggunakan metode (Apak)	7000	0			Proses pengumpulan, pengolahan, dan analisis data target dan masalah kinerja proses yang pada laporan pengumpulan kinerja dan masalah (menggunakan metode) informasi/pejabat yang bertanggung jawab	Belum ada upaya evaluasi akuntabilitas kinerja internal	Survei dan/atau
4.1	Implementasi SAAP telah mencapai semua indikator Akuntabilitas Kinerja Internal sehingga memberikan hasil yang nyata (jangka) dalam efisiensi dan efektivitas kinerja	1250	B	6.75				
Kriteria								
1	1. Berencana atau hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal telah dilaksanakan	70	1			Adanya monitoring pelaksanaan perbaikan atau tidak berdasarkan pada laporan yang dilaksanakan dengan adanya pengumpulan masalah target pada laporan Triwulan bertahap		Tidak terdapat rekomendasi atau saran perbaikan

2	Tidak terjadi pelanggaran implementasi SAPS dengan melibatkannya tidak terjadi atau terkonsentrasi hasil analisis akreditasi Energi Internal.	Ya	1			Auditor memastikan implementasi hasil UJI SAPS Tahun sebelumnya telah dilaksanakan oleh CPO dengan melibatkan pengkaji atau eksekusi SAPS tahun evaluasi berapapun dengan tahun sebelumnya		terjadi pelanggaran oleh hasil CPO dibanding tahun kemarin
3	Hasil Evaluasi Akreditasi Energi Internal telah dimanfaatkan untuk perbaikan dan peningkatan akreditasi energi.	Tidak	0			Ada informasi upaya upaya perbaikan dan peningkatan akreditasi energi (misalnya efisiensi tenaga/biaya kerja/pengendalian) sebagai tidak terjadi akreditasi hasil akhir sesuai target tercapai	belum ada upaya peningkatan akreditasi energi internal (misalnya efisiensi tenaga/biaya kerja/pengendalian)	Tidak terjadi hasil evaluasi akreditasi
4	Hasil dari Evaluasi Akreditasi Energi Internal telah dimanfaatkan dalam mendukung efisiensi dan efektivitas kinerja.	Ya	1			Salah satu aspek aspek yang dan rekomendasi yang diberikan telah dimanfaatkan untuk perbaikan dan peningkatan akreditasi energi (misalnya efisiensi tenaga/biaya kerja/pengendalian) yang tidak mempunyai DPA yang sudah tercapai tahun SAPS (tahun) dengan cara melalui kemitraan DPA yang diberikan kepada bawahan yang tidak tercapai dengan pencapaian target yang telah ditentukan		terjadi target hasil evaluasi akreditasi
5	Tidak terjadi perbaikan dan peningkatan kinerja dengan memanfaatkan hasil evaluasi akreditasi energi internal.	Ya	1			Analisis saran dan rekomendasi apakah telah memberikan dampak perbaikan dan peningkatan kinerja dalam mencapai sasaran dan tujuan SAPS		adanya perbaikan UGP dibanding tahun sebelumnya (perbandingan data tahun kemarin)

Pj. INSPEKTUR

